INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

rumah integritas

Balikpapan

LAKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP INSPEKTORAT 2025



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya kita diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025.

Setiap tahunnya, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen perjanjian kinerja Inspektur dengan Wali Kota Balikpapan dan selanjutnya pertanggungjawabannya dituangkan dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 selain menjadi sarana pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi dan perbaikan atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

Balikpapan, 27 Februari 2026

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN INSPEKTORAT

SILVIA RAHMADINA, AP. CGCAE., CGRE., QIA.

Ringkasan Eksekutif



Laporan Kinerja Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja, penjelasan yang memadai tentang pencapaian kinerja dan perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Laporan Kinerja Perangkat Daerah memuat perencanaan, pencapaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis, indikator kinerja yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran strategis, dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Visi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman.

Misi yang harus dicapai oleh Inspektorat Kota Balikpapan adalah mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Tahun 2025 merupakan masa transisi Perencanaan maka penyusunan LAKIP ini berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Renstra Inspektorat tahun 2021-2026, capaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan indikator Maturitas SPIP sesuai target yang ditetapkan tercapai 100%, yaitu berada pada level 3.
2. Sasaran strategis meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan memiliki target yang ditetapkan yaitu 81,15 dan tercapai sebesar 100,95% dengan nilai 81,92.

Sedangkan berdasarkan Renstra Inspektorat tahun 2025-2029, capaian kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Tujuan terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Maturitas SPIP dan target 3,317 pada tahun 2025 tercapai 90,98% yaitu memperoleh nilai 3,018.
2. Sasaran strategis Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan indikator Kapabilitas APIP memiliki target pada tahun 2025 yaitu 3,025 dan tercapai sebesar 80,33% yaitu dengan nilai 2,43.
3. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan indikator Nilai AKIP Inspektorat memiliki target target yang ditetapkan yaitu 81,15 dan tercapai sebesar 100,95% dengan nilai 81,92.

Berikut adalah infografis capaian tahun 2025 berdasarkan Renstra Inspektorat tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat tahun 2025-2029:

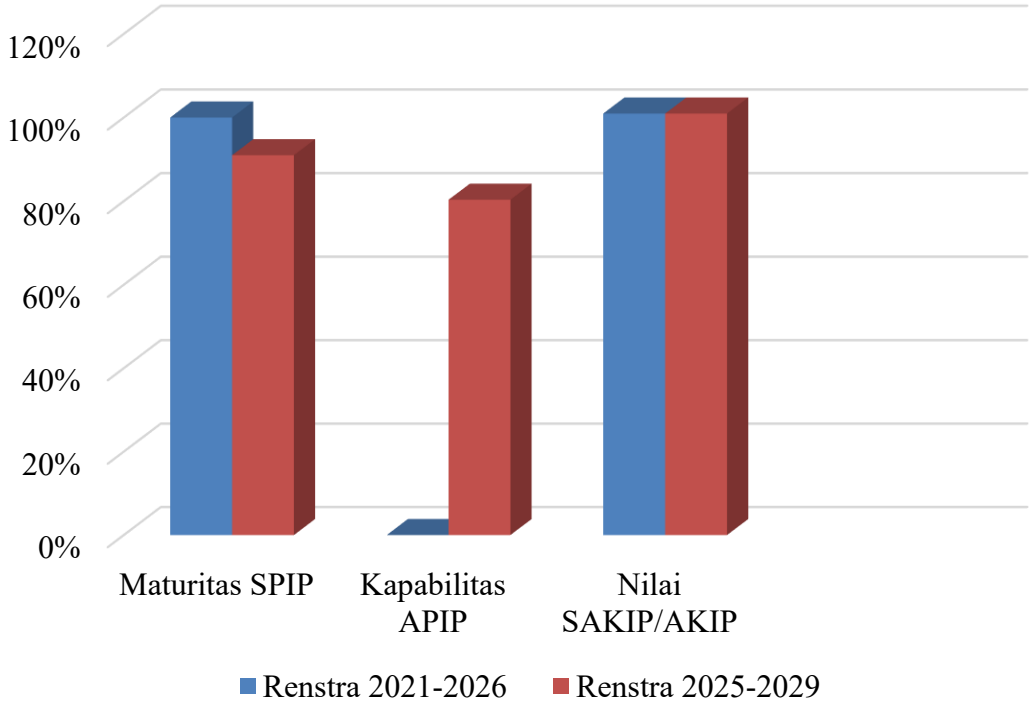


Diagram 1
Realisasi Capaian Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Faktor yang berpengaruh terhadap capaian pelaksanaan program / kegiatan yang tertuang dalam Renja tahun 2025, antara lain:

1. Evaluasi dan Monitoring dari pimpinan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perencanaan;
2. Komitmen seluruh pegawai untuk penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan guna tercapainya target sasaran strategis Inspektorat Kota Balikpapan;
3. Beberapa pekerjaan memerlukan perubahan penganggaran sehingga baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV setelah penetapan APBD P TA 2025;

4. Lini 3 berperan aktif dalam melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Balikpapan, 27 Februari 2026

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
INSPEKTORAT

SILVIA RAHMADENA, AP. CGCAE., CGRE., QIA.



"Pengawasan adalah bentuk kepedulian organisasi terhadap integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap proses berjalan benar, risiko terkendali dan tujuan organisasi tercapai secara akuntabel."

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..... **i**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR DIAGRAM ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah 4

1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama 10

1.6. Sistematika Penulisan 13

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 17

2.1. Perencanaan Strategis 17

2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 29

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 35

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 44

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya 44

3.2 Capaian Kinerja Organisasi 59

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 59

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir ……. 62

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah pada Rencana Strategis ….. ……. 66

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja)…….. …….. 69

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan……... 76

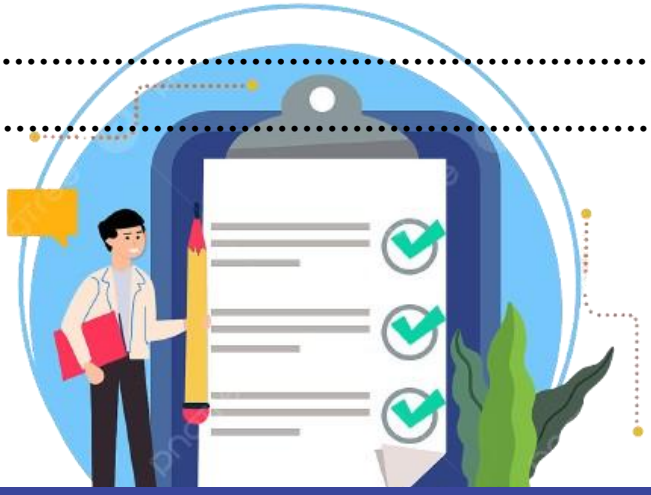
3.2.6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) …… 93

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ……..…… 113

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025 …….. 124

BAB IV. PENUTUP …… 128

LAMPIRAN …….. 131



Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Jumlah ASN Inspektorat Kota Balikpapan menurut Jabatan dan Jenis Kelamin ……..	7
Tabel 1.2.	Aspek Strategis Inspektorat Kota Balikpapan	10
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026..	21
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2025-2029...	24
Tabel 2.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ……	25
Tabel 2.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021 - 2026……	29
Tabel 2.5.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2025-2029……	32
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 …..……	35
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 …..……..	36
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025-2029…….	37
Tabel 2.9.	Rencana Anggaran Inspektorat Tahun 2025……..	39
Tabel 3.1.	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2025 ……	45
Tabel 3.2.	Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2025 ……	47
Tabel 3.3.	Progres Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2025 ……	53
Tabel 3.4.	Predikat Capaian Kinerja …….....	59
Tabel 3.5.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 ……..	60
Tabel 3.6.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	61

Tabel 3.7. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir …….. 63

Tabel 3.8. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir …….. 65

Tabel 3.9. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Tahun 2021-2026 …… 67

Tabel 3.10. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Tahun 2025-2029…… 68

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja) ……. 69

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Tahun 2025-2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)…….. 73



Tabel 3.13. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025…….. 77
Tabel 3.14. Analisis Penyebab Kebrhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja atas Rencana Strategis Tahun 2025-2029……. 79
Tabel 3.15. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra …….. 94
Tabel 3.16. Jumlah ASN Inspektorat Kota Balikpapan menurut Jabatan dan Jenis Kelamin …… 115
Tabel 3.17. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Balikpapan …… 118
Tabel 3.18. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya Anggaran …
Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 ……... 125



Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Balikpapan…… 4

Gambar 1.2. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah……..... 6

Gambar 1.3. Isu Strategis Inspektorat Kota Balikpapan…… 11

Gambar 2.1. Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ……. 19

Gambar 2.2. Tujuan, Sasaran dan Program Inspektorat Kota Balikpapan .. ……. 20

Gambar 2.3. Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.. …… 22

Gambar2.4. Tujuan, Sasaran dan Program Inspektorat Kota Balikpapan Renstra 2025-2029 ……. 23

Gambar 3.1. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Kota Balikpapan.. 45

Gambar 3.2. Saran/Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2025 …… 46

Gambar 3.3. Perubahan Bobot Penilaian Kapabilitas APIP …….. 63

Gambar 3.4. Level Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Timur … 71

Gambar 3.5. Nilai AKIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur…….. 71

Gambar 3.6. Penyerahan Piagam AKIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 72

Gambar 3.7 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur 75

Gambar 3.8 Nilai Kapabilitas APIP Kota se Provinsi Kalimantan Timur 75

Gambar 3.9. Rumus Efisiensi Anggaran …… 120

Daftar Diagram

Diagram 1. Realisasi Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025 iv

Diagram 1.1 Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Balikpapan Menurut Tingkat Pendidikan 9

Diagram 3.1 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Inspektorat Kota Balikpapan Menurut Tingkat Pendidikan .....



1. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3. Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025
4. Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025
5. Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2025
6. Rencana Aksi (RENAKSI) Perubahan Tahun 2025
7. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026
8. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029
9. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
10. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 (Form E81)
11. Piagam Penghargaan Tahun 2025
12. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Tahun Sebelumnya



BAB I

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas serta melakukan pengukuran kinerja yang baik dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang dikenal sebagai SAKIP dan diperjelas dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kewajiban ini harus dijalankan oleh masing-masing institusi pemerintah agar bisa memberikan informasi, baik keberhasilan maupun kegagalan suatu program yang telah dilaksanakan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP diamanatkan bahwa setiap Perangkat

Daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Balikpapan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan LAKIP sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
h. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026;
i. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
j. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
k. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
l. Keputusan Inspektur Kota Balikpapan Nomor 188.46/042/ITKOT tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
m. Keputusan Inspektur Kota Balikpapan Nomor : 188.46/001/ITKOT tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Balikpapan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen LAKIP Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut:

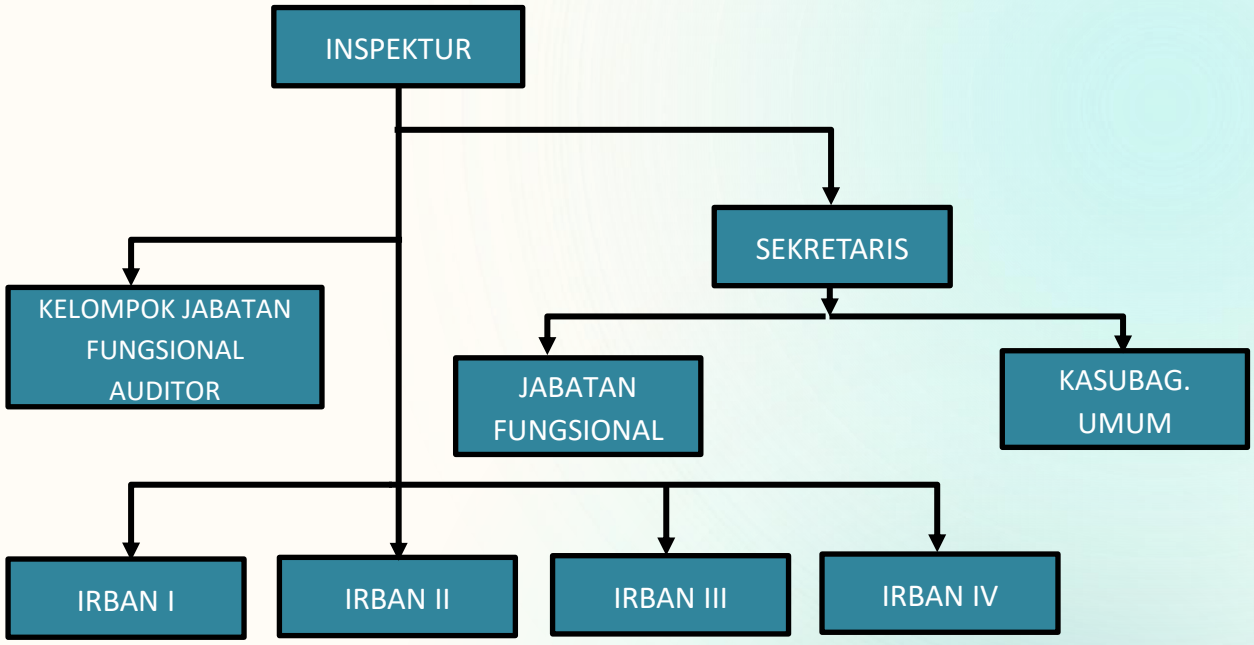
a. Untuk menilai dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran;
b. Sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja dan anggaran;

c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan;
d. Untuk menjamin bahwa setiap kegiatan dan program yang dijalankan sesuai dengan rencana strategis;
e. Memberikan informasi kinerja yang terukur;
f. Membantu instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai media untuk mewujudkan *clean government* menuju *good governance.*

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

A. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, berikut adalah struktur organisasi Inspektorat Kota Balikpapan :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Balikpapan
Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022

B. Tugas dan Fungsi

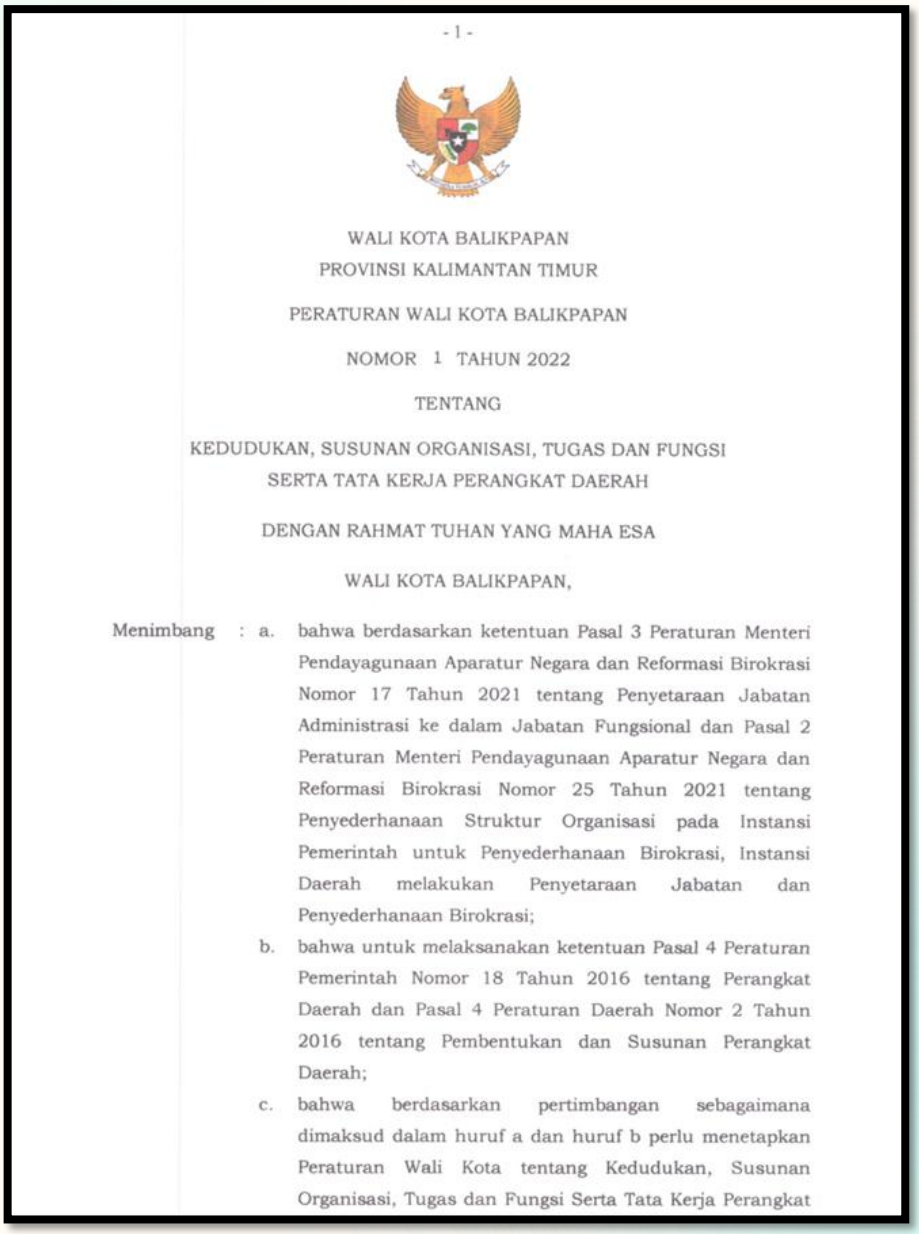
Membantu Wali Kota untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

Tugas Pokok Inspektorat Kota Balikpapan

Adapun fungsi Inspektorat sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota
- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
- Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Berikut adalah dasar hukum tugas dan fungsi Inspektorat :



- 1 -

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah melakukan Penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat

Gambar 1.2
Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Sumber : https://jdih.balikpapan.go.id/

C. Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2025, Inspektorat Kota Balikpapan didukung oleh 59 (lima puluh Sembilan) orang yang terdiri dari 53 (empat puluh enam) orang PNS/CPNS, 5 (lima) orang PPPK dan 1 (satu) orang PPPK Paruh Waktu.

Adapun jumlah PNS Inspektorat Kota Balikpapan berdasarkan jabatan dan jenis kelamin tergambar secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah ASN Inspektorat Kota Balikpapan
menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Inspektur	-	1
2	Sekretaris	1	-
3	Inspektur Pembantu	3	1
4	Auditor Madya	2	3
5	Auditor Muda	1	10
6	Auditor Penyelia	1	1
7	Auditor Pertama	1	5
8	Auditor Mahir	1	2
9	Auditor Terampil	4	3
10	P2UPD Pertama	2	2
11	Perencana Ahli Muda	-	2
12	Kepala Sub Bagian Umum	1	-

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
13	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2
14	Pengolah Data dan Informasi	-	-
15	Pengadministrasi Perkantoran	1	1
16	Operator Layanan Operasional	1	-
17	Penata Layanan Operasional	2	3
18	Pranata Komputer	-	1
Jumlah		**22**	**37**

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Kota Balikpapan didominasi oleh pegawai Perempuan dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang dan pegawai laki-laki dengan jumlah 22 (dua puluh dua) orang. Adapun jumlah 59 (lima puluh sembilan) orang pegawai tersebut terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional auditor, jabatan fungsional perencana dan jabatan pelaksana, baik PNS maupun PPPK.

Sedangkan data sumber daya manusia aparatur dilihat dari Tingkat Pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram berikut :

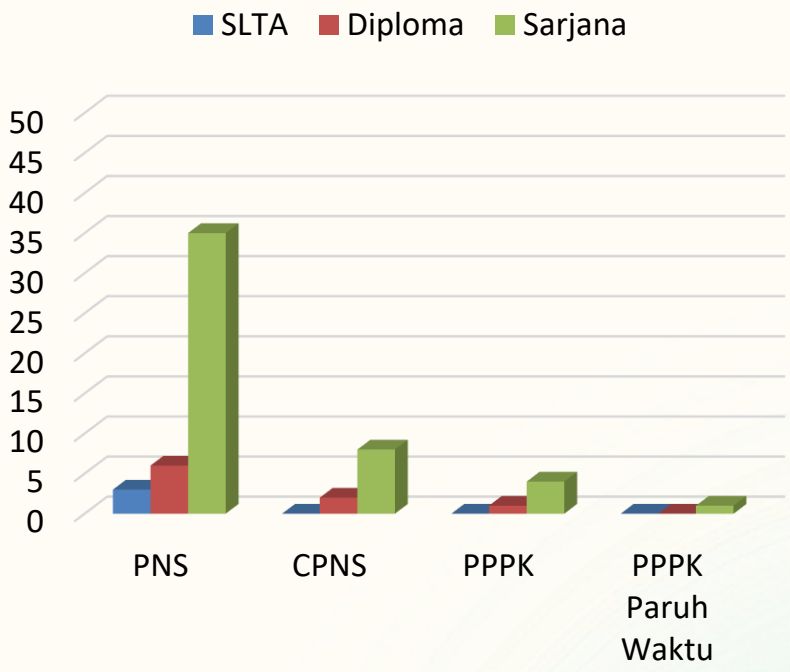


Diagram 1.1
Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Balikpapan
Menurut Tingkat pendidikan

Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa sumber daya aparatur Inspektorat Kota Balikpapan didominasi oleh PNS lulusan Sarjana dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) orang, lulusan Diploma sebanyak 6 (enam) orang dan lulusan SLTA sebanyak 3 (tiga) orang.

CPNS terdiri dari 8 (delapan) orang lulusan Sarjana dan 2 (dua) orang lulusan Diploma. PPPK terdiri dari 4 (empat) orang lulusan Sarjana dan 1 (satu) orang lulusan Diploma. Sedangkan PPPK paruh waktu hanya ada 1 (satu) orang lulusan Sarjana.

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

A. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi adalah pertimbangan dan perencanaan yang terkait dengan tujuan organisasi dalam mendukung visi dan misi serta permasalahan utama yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.

Adapun tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Aspek Strategis Inspektorat Kota Balikpapan

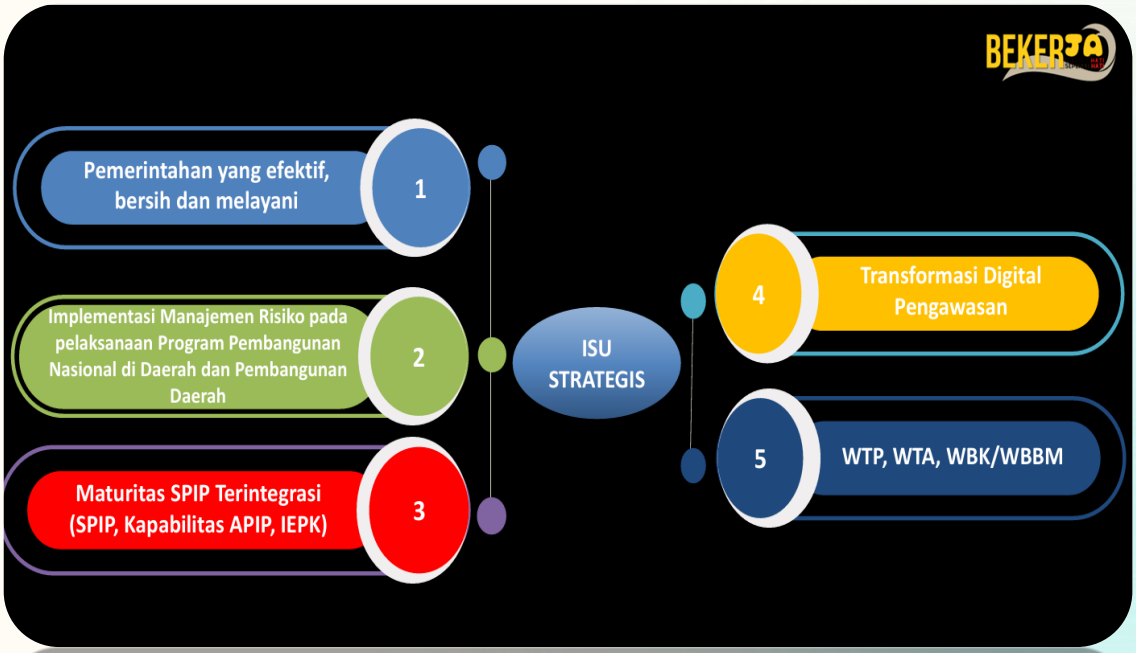
No	Tujuan	Sasaran	Strategi dan Kebijakan
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	a. Penguatan pengawasan internal b. Penguatan peran APIP sebagai *catalyst* dan *consulting partner* bagi Perangkat Daerah c. Penguatan SPIP
2.		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah	a. Peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat melalui tertib administrasi dan dokumentasi penugasan pengawasan b. Transformasi digital pengawasan

Sumber : Renstra Inspektorat Kota Balikpapan 2021-2026

B. Permasalahan Utama

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat pada tahun 2025 adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang tidak sesuai dengan jumlah rekomendasi Auditor dari BPKP dan jumlah rekomendasi PPUPD dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat ada 5 (lima) hal, yaitu:



Gambar 1.3
Isu Strategis Inspektorat Kota Balikpapan
Sumber : Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa guna peningkatan penyelenggaraan layanan sesuai tupoksi dan pemetaan permasalahan yang ada, maka Inspektorat Kota Balikpapan akan berupaya untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi sesuai pemetaan isu strategis pada tahun 2025, yaitu :

a. Pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani menuntut Inspektorat untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efisien, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pengawasan tidak lagi hanya berorientasi pada pemeriksaan kepatuhan, tetapi juga pada perbaikan sistem dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah.

b. Implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah menuntut Inspektorat agar mampu menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (risk based audit) agar pengawasan lebih terarah pada program prioritas dan kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi. Penerapan manajemen risiko menjadi penting untuk mencegah potensi kegagalan program, mengurangi kerugian daerah, serta memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara optimal.

c. Peningkatan maturitas SPIP yang terintegrasi, meliputi SPIP, kapabilitas APIP, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) bertujuan untuk memastikan sistem pengendalian intern pemerintah berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapabilitas APIP menjadi kunci agar Inspektorat mampu memberikan *assurance* dan *consulting* yang berkualitas serta berkontribusi nyata dalam pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

d. Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan belum dilakukan sepenuhnya secara efektif. Dengan adanya Rumah Integritas (Ruang Urai Masalah Akuntabilitas, Kompetensi dan Atitude Dengan

Tuntas) diharapkan dapat mempermudah pengawasan melalui sistem dan memerlukan komitmen dari seluruh pihak untuk menggunakannya dalam pengawasan.

e. Inspektorat berperan mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, memperkuat sistem pengendalian intern, serta mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada integritas dan pelayanan untuk dapat mencapai opini WTP, penguatan akuntabilitas keuangan menuju Wilayah Tertib Administrasi (WTA), serta pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Capaian tersebut menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Balikpapan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Balikpapan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sub bab ini disajikan latar belakang disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Balikpapan

1.2 Landasan Hukum

Pada sub bab ini disajikan penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi

kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Balikpapan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pada sub bab ini disajikan maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan gambaran singkat terkait perangkat daerah, kedudukan, tugas dan fungsi organisasi serta kewenangan perangkat daerah. Selain itu pada sub bab ini disajikan penjelasan singkat sumber daya aparatur dan grafik jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan, pendidikan serta jabatan. terkait tugas, fungsi dan kewajiban serta struktur organisasi.

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Pada sub bab ini disjaikan aspek strategis Perangkat Daerah dalam mendukung visi dan misi dan permsalahan utama yang dihadapi perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini disajikan pokok bahasan dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Balikpapan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menjelaskan tentang rencana strategis yang berisi visi,misi, tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan perjanjian kinerja yang menjadi target laporan kinerja serta rencana anggaran yang digunakan.

2.1 Perencanaan Strategis

Pada sub bab ini menguraikan secara singkat visi, misi, tujuan dan sasaran seperti termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis tahun 2025-2029. Pada sub bab ini juga menyajikan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah tahun 2025.

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Pada sub bab ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan IKU berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada sub bab ini disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis tahun 2025-2029 yang merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Pada subbab ini disajikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan serta matriks tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap LHE atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi).

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

II. PERENCANAAN KINERJA

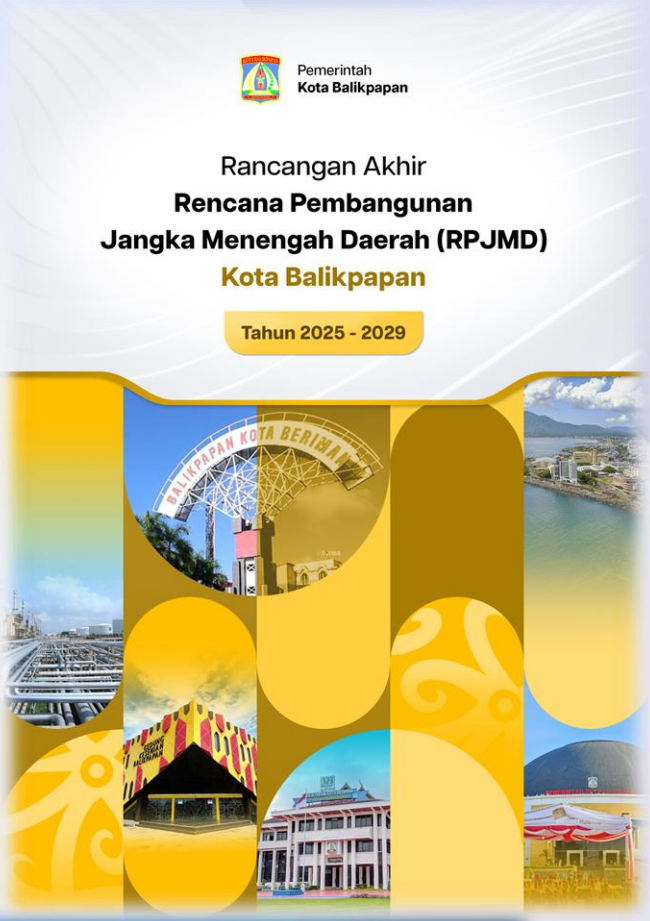
2.1 Perencanaan Strategis

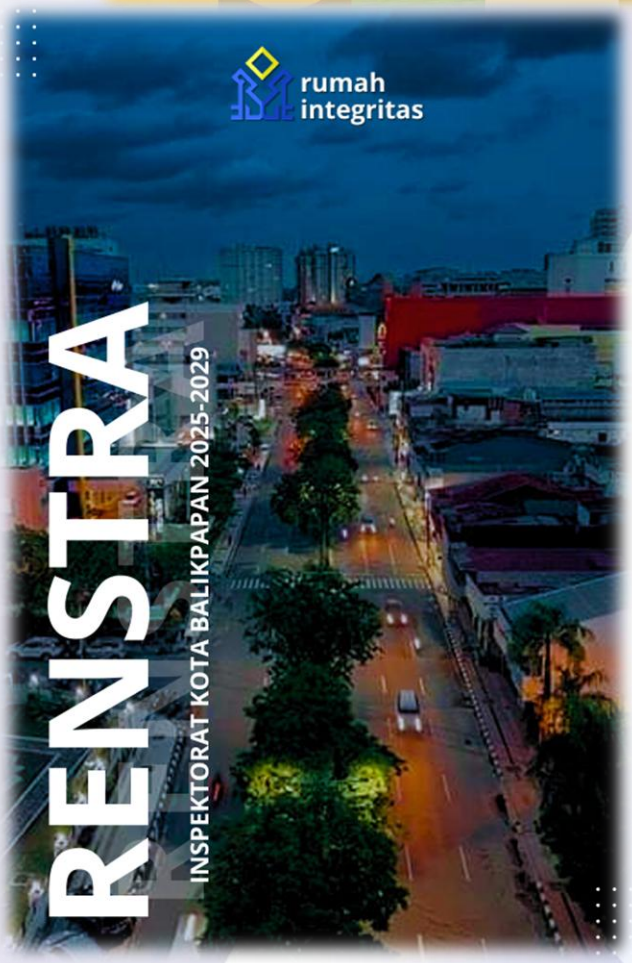
Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi dan misi Pemerintah Daerah yang selaras dengan tujuan, strategi, kebijakan, serta program/kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra merupakan salah satu unsur yang penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi pimpinan, staf dan *stakeholder* Inspektorat Kota Balikpapan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan di daerah.

Dokumen Renstra ini merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun







2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Visi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman.

Misi yang harus dicapai oleh Inspektorat Kota Balikpapan adalah mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Tahun 2025 merupakan masa transisi Perencanaan maka penyusunan LAKIP ini berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja Inspektorat Kota Balikpapan pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antar periode Renstra.

Sebagai landasan perencanaan strategis, visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat, sebagai berikut:



Gambar 2.1
Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026
Sumber : RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Sesuai dengan misi Wali Kota Balikpapan tahun 2021-2026 bahwa Inspektorat mendukung pencapaian misi kesatu yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik. Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 disajikan pada gambar di bawah ini:

TUJUAN	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel		
INDIKATOR TUJUAN	Maturitas SPIP	Nilai SAKIP	
SASARAN	Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Meningkatnya Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
INDIKATOR SASARAN	Kapabilitas APIP	Nilai SAKIP Pada Komponen Evaluasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
INDIKATOR PROGRAM	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal

Gambar 2.2
Tujuan, Sasaran dan Program Inspektorat Kota Balikpapan
Sumber : Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Berdasarkan gambar di atas, tujuan Inspektorat yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator maturitas SPIP dan nilai SAKIP. Sedangkan sasaran Inspektorat yaitu meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian dengan indikator kapabilitas SPIP, meningkatnya nilai SAKIP dengan indikator nilai SAKIP pada komponen evaluasi serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator indeks reformasi birokrasi perangkat daerah.

Adapun target indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tujuan dan sasaran kinerja beserta target sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi	6.77	7.42	7.42	7.43	7.43	7.43
	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31.54	31.84	32.14	32.44	32.74	33.04

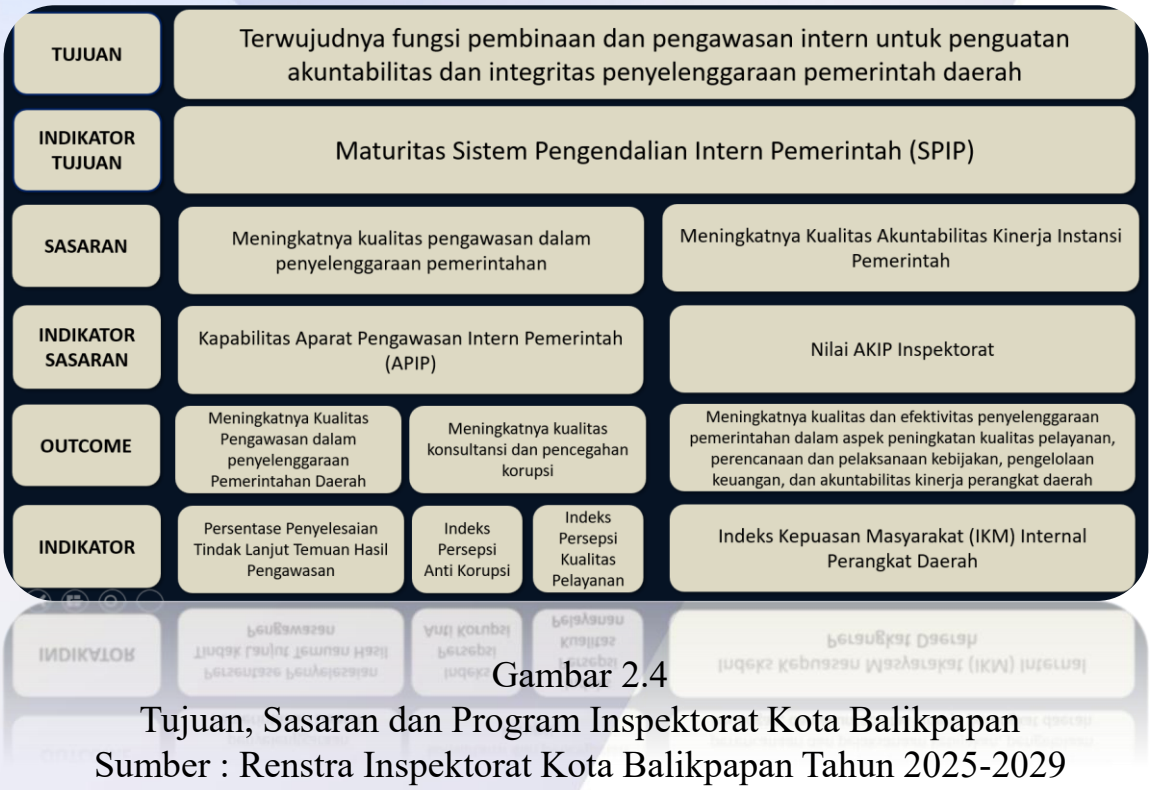
Sumber : Renstra Inspektorat Kota Balikpapan 2021-2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Wali Kota Ballikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat pada periode tersebut, sebagai berikut:



Gambar 2.3
Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2029
Sumber : RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Sesuai dengan misi Wali Kota Balikpapan tahun 2025-2029 bahwa Inspektorat mendukung pencapaian misi kesatu yaitu Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat. Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.4
Tujuan, Sasaran dan Program Inspektorat Kota Balikpapan
Sumber : Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar di atas, tujuan Inspektorat yaitu terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator maturitas SPIP. Sedangkan sasaran Inspektorat yaitu meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah dengan indikator sasaran nilai AKIP Inspektorat.

Adapun target indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tujuan dan sasaran kinerja berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,292	3,317	3,342	3,367	3,392	3,442
	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3,025	3,05	3,075	3,1	3,125
	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai AKIP Inspektorat	80,82	81,92	81,97	82,02	82,07	82,12

Sumber : Renstra Inspektorat Kota Balikpapan 2025-2029

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program Tahun 2025	Kegiatan Tahun 2025	Sub Kegiatan Tahun 2025
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Maturitas SPIP Nilai SAKIP	Level 4	Tujuan : Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,317			
Sasaran : Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	Kapabilitas APIP	Level 4	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,025	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
							Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
								Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program Tahun 2025	Kegiatan Tahun 2025	Sub Kegiatan Tahun 2025
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
Sasaran : Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi	7,43				Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
							Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
								Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
								Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
								Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Sasaran : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,74	Sasaran : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai AKIP Inspektorat	81,92	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
								Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program Tahun 2025	Kegiatan Tahun 2025	Sub Kegiatan Tahun 2025
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
Sasaran : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,74	Sasaran : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai AKIP Inspektorat	81,92	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
								Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
								Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program Tahun 2025	Kegiatan Tahun 2025	Sub Kegiatan Tahun 2025
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
Sasaran : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,74	Sasaran : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai AKIP Inspektorat	81,92	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber : Renja Inspektorat Kota Balikpapan 2025



2.2 Indikator Kinerja Utama

Adapun IKU Perubahan Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Nomor : 188.46/042/Itkot tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kota Balikpapan Tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Level Maturitas SPIP terpola dalam 6 level yaitu: a. Level 0 (Belum Ada) yaitu K/L/P sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern b. Level 1 (Rintisan) yaitu K/L/P sama sekali belum memiliki kebijakan dan Belum Ada prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern	Penghitungan berdasarkan pada Penilaian Mandiri Perangkat Daerah atas Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP dan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat dengan Komponen, Unsur dan Sub unsur penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut: 1. Penetapan Tujuan (40%) 2. Struktur dan Proses (30%) 3. Pencapaian Tujuan (30%)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektorat Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			c. Level 2 (Berkembang) yaitu K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai d. Level 3 (Terdefinisi) yaitu K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai e. Level 4 (Terkelola dan Terukur) yaitu K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif,masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/P. Evaluasi formal dan terdokumentasi f. Level 5 (Optimum) yaitu K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	Aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah	Penghitungan berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan proses penilaian meliputi : 1. Perencanaan kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Internal	Inspektorat Kota Balikpapan	Inspektorat Kota Balikpapan

Sumber : Keputusan Inspektur Nomor : 188.46/042/Itkot Tahun 2023

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, Inspektorat Kota Balikpapan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Inspektur Kota Balikpapan. IKU pada Renstra periode terbaru tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025–2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Inspektur Kota Balikpapan Nomor : 188.46/001/ITKOT tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas hasil Penilaian Mandiri Perangkat Daerah dan Penjaminan Kualitas APIP dengan komponen penilaian yaitu : 1. Penetapan Tujuan (40%) 2. Struktur dan Proses (30%) 3. Pencapaian Tujuan (30%)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektorat Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.	Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada lima elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP yaitu : 1. Kualitas Peran dan Layanan (40%) 2. Profesionalisme Penugasan (20%) 3. Manajemen Pengawasan (20%) 4. Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya (10%) 5. Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektorat Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Inspektorat	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya	Penghitungan berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan proses penilaian meliputi : 1. Perencanaan kinerja (30%) 2. Pengukuran kinerja (30%) 3. Pelaporan kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Internal (25%)	Inspektorat Kota Balikpapan	Inspektorat Kota Balikpapan

Sumber : Keputusan Inspektur Nomor : 188.46/001/Itkot Tahun 2026

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mencakup Perjanjian Kinerja murni yang ditetapkan pada awal tahun anggaran serta Perjanjian Kinerja Perubahan yang dilakukan dalam tahun berjalan. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen kinerja perangkat daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, yang memuat sasaran, indikator, dan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku, guna memberikan gambaran komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun perjanjian kinerja murni Inspektorat tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Level	Level 4
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	Nilai	81,15

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan yang memuat sasaran strategis dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2025 serta program dan kegiatan yang mendukung.

Perjanjian kinerja tahun 2025 mengalami perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Tindak lanjut perubahan IKU berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 atas LAKIP tahun 2023;
b. Perubahan kebijakan terkait reformasi birokrasi;
c. Penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Perubahan kebijakan penilaian Kapabilitas APIP;
e. Penyesuaian target dan indikator kinerja agar tetap relevel dengan kondisi dan kebutuhan actual.

Adapun perjanjian kinerja perubahan Inspektorat tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	Nilai	80,82	81,15

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka terdapat Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

Adapun perjanjian kinerja perubahan Inspektorat tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Atas Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,292	3,317
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3,025
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Inspektorat	Nilai	80,82	81,15

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Inspektorat Kota Balikpapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Kota Balikpapan melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp25.338.973.897,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp25.968.278.964,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.9
Rencana Anggaran Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

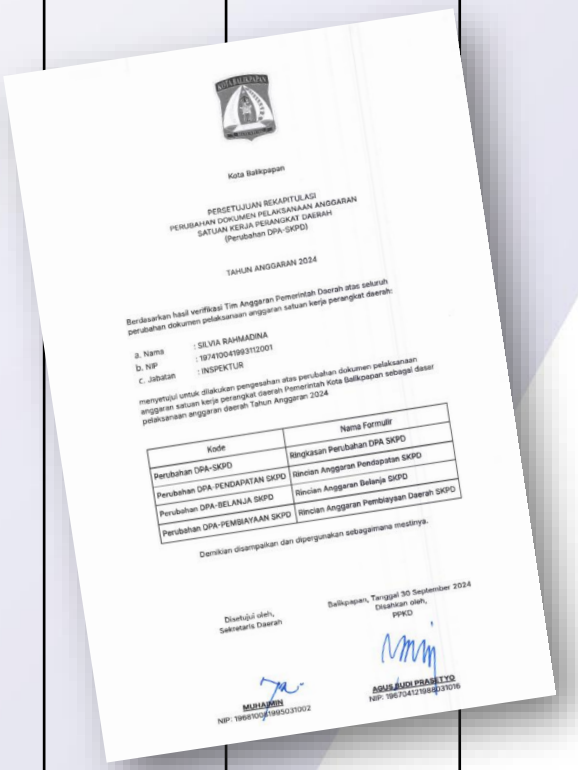
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	81,15	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**20.129.173.897**
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**12.808.990.922**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.808.990.922
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**1.789.079.3752**
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	89.079.375
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	700.000.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.464.757.100**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.371.400
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	450.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	415.335.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	138.050.700
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.237.500.000
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	437.500.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	432.869.500

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.404.523.100**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.950.500
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.204.572.600
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.424.323.400**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	716.531.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.792.400
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
2	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Level 3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.410.000.000**
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**1.035.000.000**
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	825.000.000
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	210.000.000
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	**375.000.000**
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	300.000.000
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	75.000.000
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**3.799.800.000**
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**150.000.000**
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	150.000.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
				Pendampingan dan Asistensi	**3.649.800.000**
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	575.000.000
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	87.000.000
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.900.000.000
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	87.800.000
				Jumlah	**25.338.973.897**



Kota Balikpapan

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : SILVIA RAHMADINA
b. NIP : 197410041993112001
c. Jabatan : INSPEKTUR

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, Tanggal 30 September 2024
Disahkan oleh,
PPKD

AGUS BUDI PRABETYO

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

MUHAIMIN

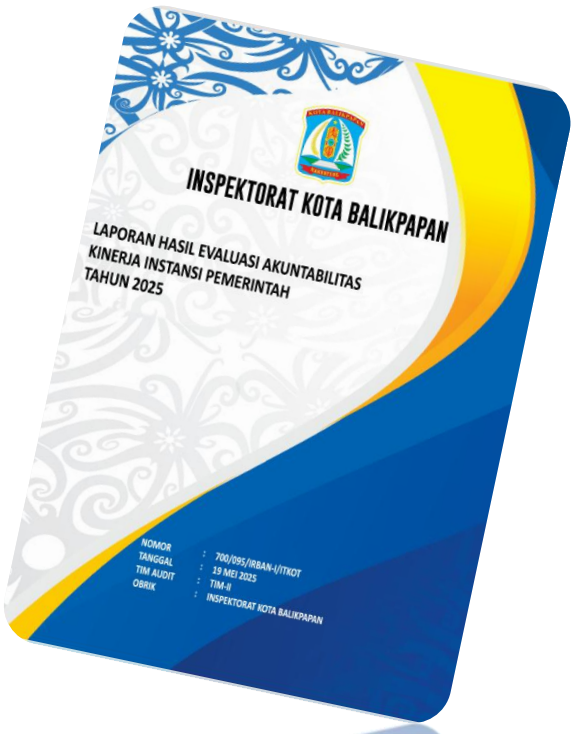
Sumber : DPPA Inspektorat Tahun Anggaran 2025

BAB III

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2025

Evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Balikpapan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Inspektorat Kota Balikpapan Nomor : 700/095/IRBAN-I/ITKOT tanggal 19 Mei 2025 terhadap dokumen LAKIP Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor : 090.1/053/Audit/M/ITKOT tanggal 27 Maret 2025 dan Nomor : 090.1/054/Audit/M/ITKOT tanggal 27 Mei 2025 diperoleh nilai 81,92 dengan predikat A (Memuaskan).

Hal ini menunjukkan Gambaran bahwa instansi pemerintah / unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai dengan level eselon IV / Pengawas / Sub koordinator.

Adapun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Tahun 2025 sebagaimana tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 3.1
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2025

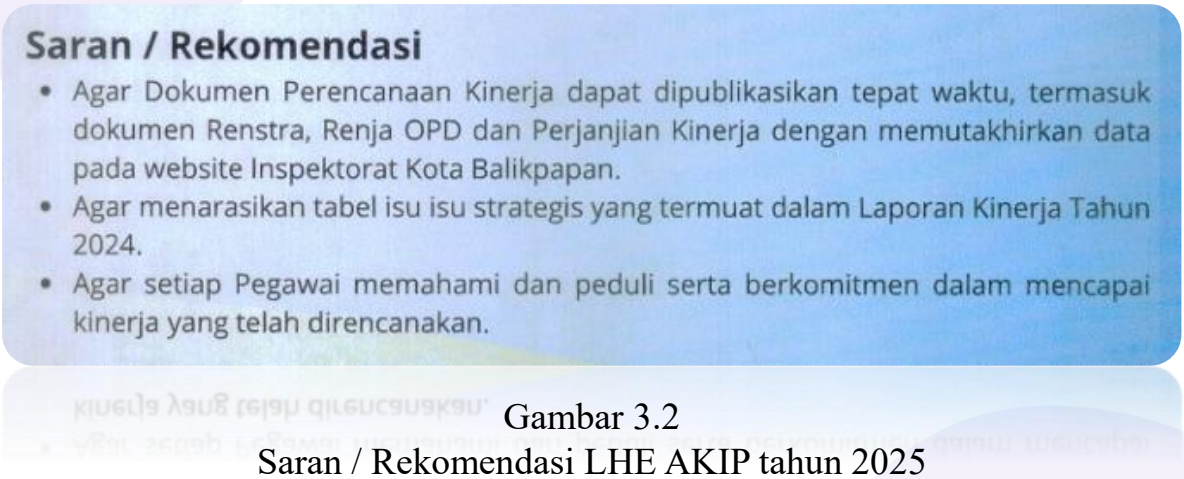
No	Komponen	Bobot	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,23
2	Pengukuran Kinerja	30%	26,43
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,90
4	Evaluasi Kinerja	25%	15,37
Nilai Hasil Evaluasi		**100%**	**81,92**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**A**

Sumber : LHE AKIP Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025



Gambar 3.1
Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Kota Balikpapan
Sumber : LHE AKIP Tahun 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Nomor : 700/095/IRBAN-I/ITKOT tanggal 19 Mei 2025 terdapat saran / rekomendasi yang disampaikan oleh tim evaluator guna perbaikan SAKIP Inspektorat pada tahun mendatang sebagaimana gambar di bawah ini:

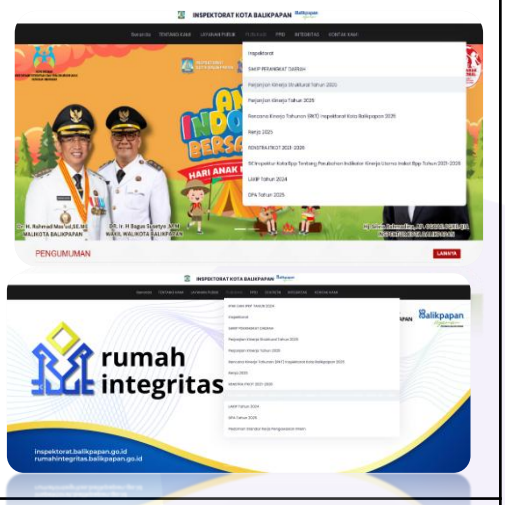


Gambar 3.2
Saran / Rekomendasi LHE AKIP tahun 2025
Sumber : LHE AKIP Tahun 2025

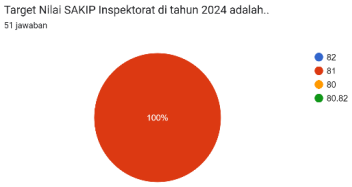
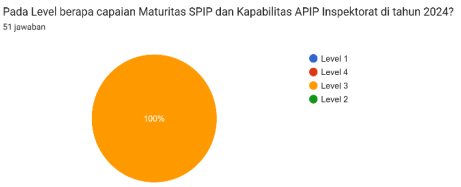
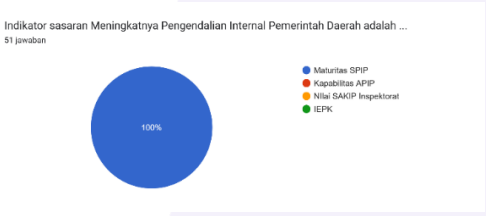
Saran dan Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti pada bulan Juli tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor : 090.1./209/Audit/M/Itkot tanggal 29 Juli 2025 untuk Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Kota Balikpapan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur.

Adapun rekomendasi dan tindak lanjut tersebut tercantum pada tabel di bawah ini:

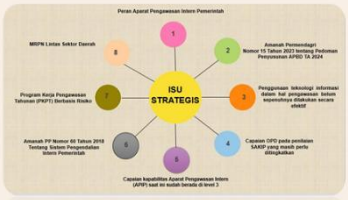
Tabel 3.2
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

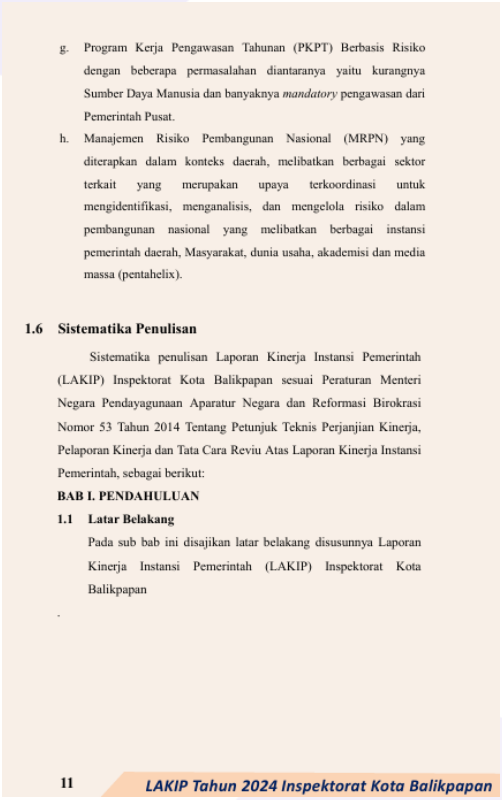
No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan	Agar Dokumen Perencanaan Kinerja dapat dipublikasikan tepat waktu, termasuk dokumen Renstra, Renja OPD, dan Perjanjian Kinerja dengan memutakhirkan data pada website Inspektorat Kota Balikpapan	Telah ditindaklanjuti dengan publikasi dokumen Renja, Perjanjian Kinerja, DPA, Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada website Inspektorat Kota Balikpapan https://inspektorat.balikpapan.go.id/ 
2	Pengukuran	Agar setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Telah dilakukan survei internal pada link https://s.id/SurveyPemahamanKinerja2024 untuk mengukur pemahaman kinerja dan komitmen seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan. Survei internal selanjutnya akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 atau triwulan I tahun 2026 dan hasil akan disampaikan kembali kepada tim evaluator.

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			Hasil pengukuran pada tanggal 11 Februari 2025 sebagai berikut : • 100% pegawai memahami Struktur, tugas pokok dan fungsi Inspektorat beserta peraturannya  • 100% pegawai memahami misi Wali Kota yang diampu oleh Inspektorat  • 100% pegawai memahami program beserta kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat  • 100% pegawai memahami Indikator Kinerja Utama Inspektorat 

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			• 100% pegawai memahami Target Nilai SAKIP  • 100% pegawai memahami capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Inspektorat  • 100% pegawai memahami sasaran beserta indikator sasaran Inspektorat  • 100% pegawai memahami Mandatory Spending Pengawasan 

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			• 100% pegawai memahami bahwa seluruh pegawai bertanggung jawab atas tercapainya kinerja organisasi  • 100% pegawai memahami peran Inspektorat  • 100% pegawai berkomitmen melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab guna mencapai target dan tujuan organisasi 
3	Pelaporan	Agar menarasikan tabel isu – isu strategis yang termuat dalam Laporan Kinerja Tahun 2024	Telah menarasikan gambar isu strategis yang termuat dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dan telah dilakukan pembaharuan pada website Inspektorat Kota Balikpapan

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			Sedangkan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat ada 8 (delapan) hal, yaitu:  Gambar 1.3 Isu Strategis Inspektorat Kota Balikpapan Sumber : Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2024 Guna peningkatan penyelenggaraan layanan sesuai tupoksi dan pemetaan permasalahan yang ada, maka Inspektorat Kota Balikpapan akan berupaya untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi sesuai pemetaan isu strategis pada tahun 2024, yaitu : a. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang saat ini sudah mengalami perubahan paradigma dari Watch Dog menjadi preventif (mencegah kesalahan). b. Terdapat Amanah Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyusunan APBD Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyusunan APBD Tahun 2025 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan klasifikasi sebagai berikut: 1. Jika belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); 2. Alokasi anggaran pengawasan tersebut tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat. c. Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan belum dilakukan sepenuhnya secara efektif. Dengan adanya Rumah Integritas (Ruang Urai Masalah Akuntabilitas, Kompetensi dan Atitude Dengan Tuntas) diharapkan dapat mempermudah pengawasan melalui sistem dan memerlukan komitmen dari seluruh pihak untuk menggunakannya dalam pengawasan. d. Capaian OPD pada penilaian SAKIP yang masih perlu ditingkatkan. Pada LHE 2024 diperoleh hasil nilai AKIP Perangkat Daerah yang belum dapat mendorong peningkatan nilai SAKIP Kota Balikpapan sebagai berikut: 1. Predikat A : 4 Perangkat Daerah 2. Predikat BB : 18 Perangkat Daerah 3. Predikat B : 13 Perangkat Daerah 4. Predikat CC : 1 Perangkat Daerah e. Capaian Kapabilitas APIP saat ini sudah berada pada level 3 dan akan menuju Level 4 pada tahun 2025. Pemenuhan level tersebut membutuhkan hasil evaluasi dari setiap elemen selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. f. Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, menjamin keandalan laporan keuangan, mengamankan aset negara, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. 10 LAKIP Tahun 2024 Inspektorat Kota Balikpapan

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			 Tercantum lengkap pada link : https://s.id/TLMS2024

g. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko dengan beberapa permasalahan diantaranya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia dan banyaknya *mandatory* pengawasan dari Pemerintah Pusat.

h. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang diterapkan dalam konteks daerah, melibatkan berbagai sektor terkait yang merupakan upaya terkoordinasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dalam pembangunan nasional yang melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah, Masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa (pentahelix).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Balikpapan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

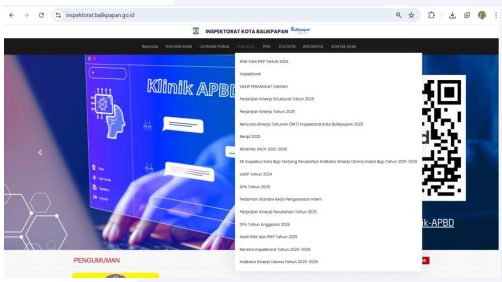
Pada sub bab ini disajikan latar belakang disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Balikpapan

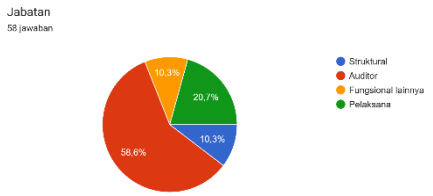
11 *LAKIP Tahun 2024 Inspektorat Kota Balikpapan*

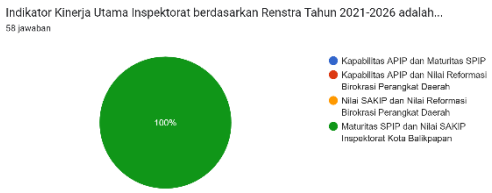
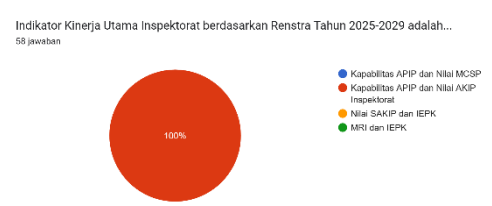
Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Nomor : 700/095/IRBAN-I/ITKOT tanggal 19 Mei 2025 terdapat saran / rekomendasi yang disampaikan oleh tim evaluator guna perbaikan SAKIP Inspektorat pada tahun mendatang sebagaimana gambar di bawah ini:

Tabel 3.3
Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan	Agar Dokumen Perencanaan Kinerja dapat dipublikasikan tepat waktu, termasuk dokumen Renstra, Renja OPD, dan Perjanjian Kinerja dengan memutakhirkan data pada website Inspektorat Kota Balikpapan	Telah ditindaklanjuti dengan publikasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan tahun 2025 dan 2026 pada website Inspektorat Kota Balikpapan https://inspektorat.balikpapan.go.id/ 
2	Pengukuran	Agar setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Telah dilakukan survei internal pada link https://s.id/SurveyPemahamanKinerja2025-2026 untuk mengukur pemahaman kinerja dan komitmen seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan secara berkala.

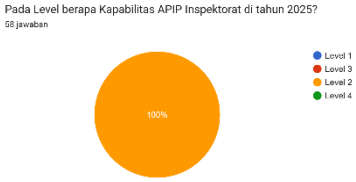
No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			Hasil pengukuran mulai tanggal 3 - 5 Februari 2026 yang diikuti oleh 58 (lima puluh delapan) pegawai Inspektorat seperti data di bawah ini:  diperoleh hasil sebagai berikut : • 100% pegawai memahami Struktur, tugas pokok dan fungsi Inspektorat beserta peraturannya  • 100% pegawai memahami misi Wali Kota yang diampu oleh Inspektorat berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			• 100% pegawai memahami program beserta kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat  • 100% pegawai memahami Indikator Kinerja Utama Inspektorat tahun 2021-2026  • 100% pegawai memahami Indikator Kinerja Utama Inspektorat tahun 2025-2029  • 100% pegawai memahami Target Nilai SAKIP Inspektorat tahun 2025 

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			• 100% pegawai memahami Realisasi Nilai SAKIP Inspektorat tahun 2025



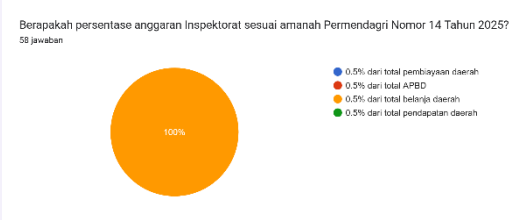
• 100% pegawai memahami capaian Kapabilitas APIP Inspektorat

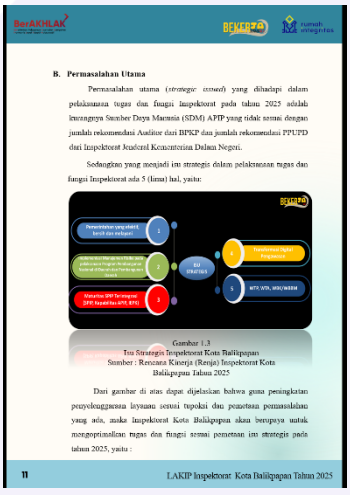


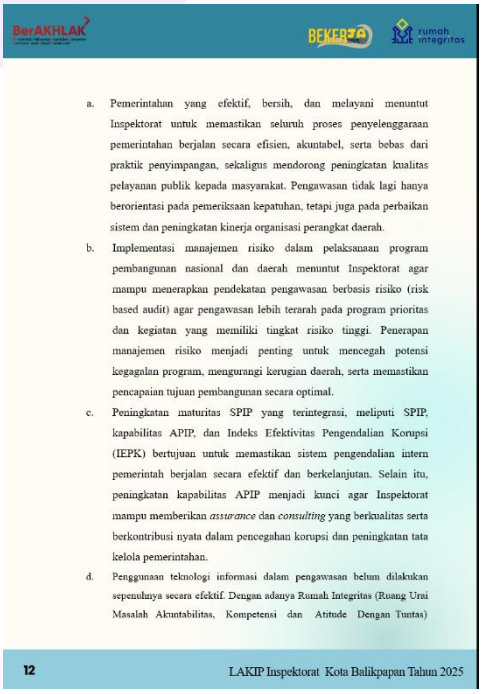
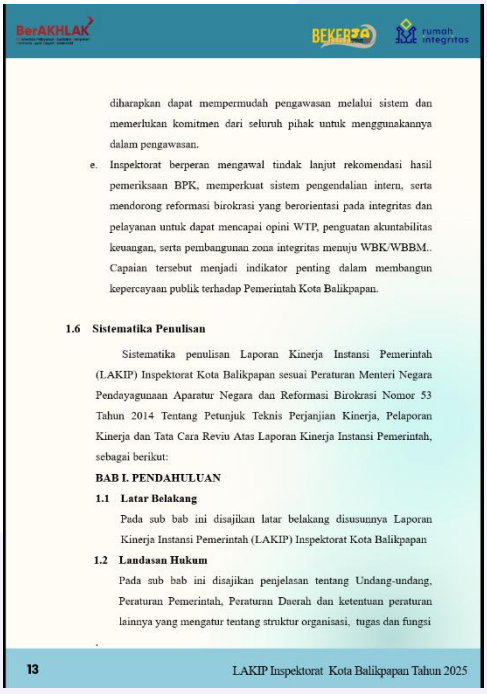
• 100% pegawai memahami capaian Maturitas SPIP Inspektorat



• 100% pegawai memahami Mandatory Spending Pengawasan



No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			• 100% pegawai memahami bahwa seluruh pegawai bertanggung jawab atas tercapainya kinerja organisasi  • 100% pegawai berkomitmen melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab guna mencapai target dan tujuan organisasi 
3	Pelaporan	Agar menarasikan tabel isu – isu strategis yang termuat dalam Laporan Kinerja	Telah menarasikan gambar isu strategis yang termuat dalam Laporan Kinerja Tahun 2025  B. Permasalahan Utama Permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat pada tahun 2025 adalah kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang tidak sesuai dengan jumlah rekomendasi Auditor dari BPKP dan jumlah rekomendasi PPUPD dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat ada 5 (lima) hal, yaitu: Gambar 1.3 Isu Strategis Inspektorat Kota Balikpapan Sumber : Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa guna peningkatan penyelenggaraan layanan sesuai tupoksi dan pemetaan permasalahan yang ada, maka Inspektorat Kota Balikpapan akan berupaya untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi sesuai pemetaan isu strategis pada tahun 2025, yaitu : 11 LAKIP Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			 

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan interval capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi. Adapun tabel skala nilai peringkat kinerja yang digunakan dalam penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai / Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber : Sistematika Penyusunan LAKIP Tahun 2025, Bagian Organisasi

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 mengacu pada dua dokumen Perencanaan yaitu Renstra Inspektorat tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat 2025-2029 sehingga capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat secara komprehensif dalam konteks kedua periode perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100%	Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	Nilai	81,15	81,92	100,95%	Tercapai

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 100% pada tahun 2025 dengan predikat tercapai. Hasil tersebut dapat menggambarkan bahwa Inspektorat Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026. Pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi REAKSI (Pengukuran Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi)

Selain itu juga disajikan capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

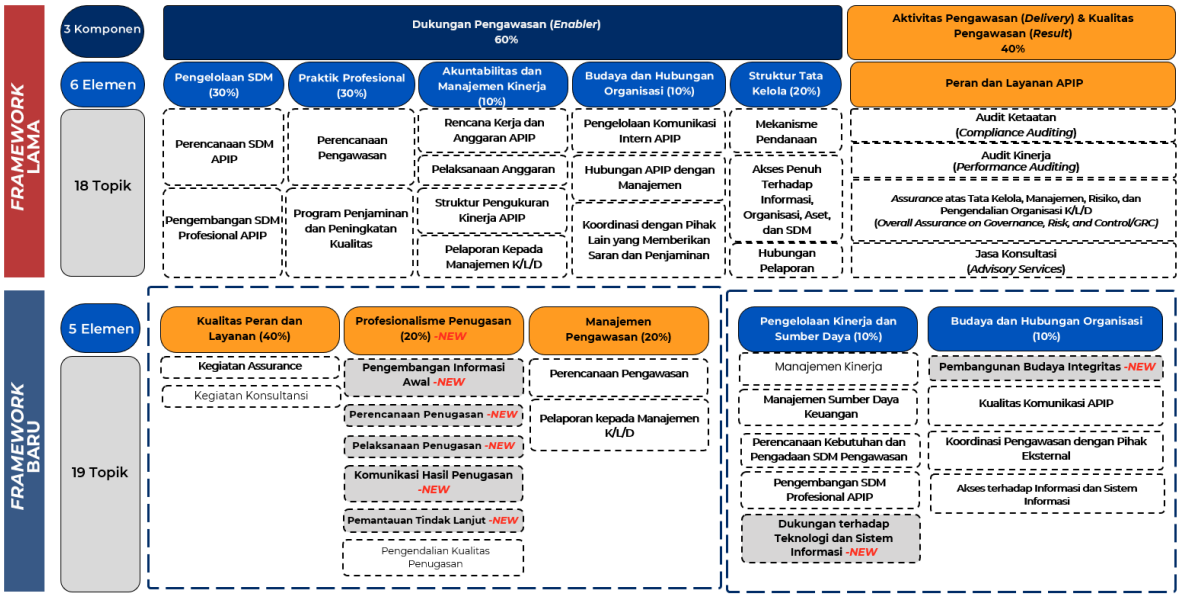
Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8
1	Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,317	3,018	90,98%	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,025	2,43	80,33%	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Inspektorat	Nilai	81,15	81,92	100,95%	Tercapai

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 90,75% pada tahun 2025 dengan predikat tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar indikator telah mendekati target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan secara keseluruhan. Adapun penyebab dari tidak tercapainya target kinerja yaitu :

1. Perubahan penilaian Kapabilitas APIP yang ditetapkan melalui Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mengacu pada standar global terbaru dan praktik terbaik, menekankan pada kualitas peran layanan APIP, pemenuhan standar profesional pengawasan dan ebrsifat lebih substantif. Dengan penerapan peraturan baru, capaian level akan lebih selaras dengan kemampuan APIP melaksanakan perbaikan tata Kelola, manajemen risiko, pengendalian intern serta pengendalian kecurangan sehingga APIP dapat memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. Namun sejalan dengan perubahan tersebut tentunya terdapat perubahan bobot penilaian dan bukti dukung yang harus dipenuhi oleh APIP untuk memberikan gambaran atau data kualitas pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kota Balikpapan. Adapun perubahan bobot penilaian Kapabilitas APIP yang mempengaruhi tingkat ketercapaian kinerja sebagai berikut:



Gambar 3.3
Perubahan Bobot Penilaian Kapabilitas APIP

Penerapan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tersebut dapat berdampak pada penurunan capaian level Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.

2. Tidak tercapainya indikator tujuan Maturitas SPIP disebabkan oleh banyak hal diantaranya :
   a. Belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja;
   b. Terdapat indikator sasaran yang belum SMART-C;
   c. Belum menyusun risiko strategis OPD dan risiko kemitraan;
   d. Masih terdapat sasaran strategis pemerintah daerah dan OPD yang tidak tercapai realisasinya;

Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Inspektorat untuk melakukan analisis terhadap faktor penghambat, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian, guna merumuskan langkah perbaikan yang lebih efektif pada periode berikutnya.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir memuat pengukuran realisasi dan capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025 yang dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja selama periode perencanaan sebelumnya yang masih memiliki data historis lengkap dari tahun 2021 hingga 2024.

Berdasarkan target yang ditetapkan, adapun realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan beberapa tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 3.7
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Daerah	Maturitas SPIP	Level 3	100%	Level 3	100%	Level 3	100%	Level 3	100%	Level 3	100%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	78,12	-	76,89	-	80,82	101,02%	80,82	100%	81,92	100,95

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan tidak dapat dilakukan pengukuran pada tahun 2021 dan 2022 karena tidak menjadi indikator sasaran strategis pada Renstra Inspektorat tahun 2021-2026, walaupun evaluasi AKIP rutin dilaksanakan setiap tahun berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko.

Terdapat juga analisis capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Inspektorat Tahun 2025–2029 yang baru mulai berlaku pada tahun 2025 sebagai tahun peralihan, maka tahun tersebut menjadi baseline bagi seluruh indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan terbaru. Oleh karena itu, tidak tersedia data pembanding untuk periode sebelum 2025. Dalam penyajiannya, tabel hanya menampilkan target, realisasi, dan capaian Tahun 2025, sementara kolom untuk tahun-tahun sebelumnya diberi tanda (—) sebagai penanda bahwa Renstra baru belum berlaku pada periode tersebut. Penyajian ini memberikan kejelasan posisi kinerja tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sekaligus membedakan dua periode perencanaan yang digunakan dalam analisis.

Perbedaan satuan indikator pada Renstra Inspektorat tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat tahun 2025-2029 juga merupakan salah satu penyebab tidak dapat dilakukannya perbandingan capaian. Hal tersebut tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Tujuan : Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	-	3,054	-	3,033	-	3,292	-	3,018	90,98
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	-	3	100%	3	100%	3	100%	2,43	80,33%
3	Sasaran : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Inspektorat	78,12	-	76,89	-	80,82	101,02%	80,82	100%	81,92	100,95%

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya perbedaan satuan indikator antara Renstra Inspektorat tahun 2021-2026 yang menggunakan satuan level dan Renstra Inspektorat tahun 2025-2029 yang menggunakan satuan nilai sehingga menyebabkan capaian yang sudah ada tidak dapat dibandingkan dan terjadi penurunan capaian yang terlihat sangat signifikan, terutama pada indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Namun pada indikator Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tetap dapat dilakukan pengukuran dikarenakan selama ini dalam Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur bahwa penilaian berdasarkan level dan nilai berada pada angka 3,00.

3.2.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada rencana strategis memuat analisis pencapaian kinerja pada tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis guna menilai sejauh mana sasaran strategis dan indikator kinerja telah tercapai selama periode perencanaan, serta memberikan gambaran tren kinerja terhadap target jangka menengah yang direncanakan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9=6/8*100
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Daerah	Maturitas SPIP	Level	3	3	100%	4	75%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	Nilai	-	-	-	-	-

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah Renstra Tahun 2021-2026 dikarenakan tidak menjadi indikator sasaran yang tertuang dalam Renstra tersebut.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode baru, sehingga menjadi *baseline* awal bagi seluruh tujuan / sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan terbaru. Penyajian ini memberikan gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan serta menilai progres terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra Inspektorat Tahun 2025–2029. Adapun perbandingan tersebut digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9=6/8*100
1	Tujuan : Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,317	3,018	90,98	3,442	87,68
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,025	2,43	80,33	3,125	77,76
3	Sasaran : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Inspektorat	Nilai	81,92	81,92	100	82,17	99,69

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM /Standar Nasional / Internasional (*Benchmark* Kinerja)

Adapun realisasi kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur serta Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Benchmark Kinerja tahun 2025	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Provinsi Kalimantan Timur	Level 3
					Kota Samarinda	Level 3
					Kota Bontang	Level 3
					Kab. Berau	Level 3
					Kab. Kutai Kartanegara	Level 2
					Kab. Kutai Timur	Level 2
					Kab. Penajam Paser Utara	Level 2
					Kab. Paser	Level 3
					Kab. Kutai Barat	Level 2
					Kab. Mahakam Ulu	Level 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Benchmark Kinerja tahun 2025	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	Nilai	81,92	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur	80,95
					Inspektorat Kota Bontang	91,50
					Inspektorat Kabupaten Berau	62,85
					Inspektorat Kabupaten Kutai Timur	60,10

Sumber : Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Instagram Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat perbandingan capaian kinerja antara Kota Balikpapan dengan Provinsi Kalimantan Timur beserta Kabupaten/Kota pada indikator Maturitas SPIP serta antara Inspektorat Kota Balikpapan dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada indikator Nilai SAKIP.

Terdapat 5 (lima) Kabupaten yang memperoleh hasil Maturitas SPIP pada level 2 dan 5 (lima) Kabupaten/Kota pada level 3 termasuk Kota Balikpapan, serta Provinsi Kalimantan Timur sendiri berada pada level 3.

Sedangkan untuk nilai SAKIP jika dibandingkan dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur maka dapat terlihat bahwa nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan lebih tinggi 0,97 poin

Adapun hasil Maturitas SPIP Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur dan Nilai AKIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana bukti dukung di bawah ini:

No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025						
		SPIP		MR		IEPK		Status
		Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Terdefinis
	Provinsi Kalimantan Timur							
1	Kota Bontang	3.177	3	3.100	3	2.832	2	Tidak
2	Kota Samarinda	3.214	3	3.102	3	2.658	2	Tidak
3	Kabupaten Penajam Paser Utara	2.391	2	2.409	2	1.000	1	Tidak
4	Kabupaten Berau	3.187	3	3.155	3	2.532	2	Tidak
5	Kabupaten Kutai Barat	2.618	2	2.316	2	2.682	2	Tidak
6	Kabupaten Kutai Timur	2.714	2	2.625	2	2.145	2	Tidak
7	Kabupaten Paser	3.191	3	3.177	3	2.514	2	Tidak
8	Kabupaten Kutai Kartanegara	2.920	2	2.928	2	2.478	2	Tidak
9	Kota Balikpapan	3.018	3	3.020	3	2.730	2	Tidak
10	Kabupaten Mahakam Ulu	2.882	2	2.691	2	2.328	2	Tidak

Gambar 3.4
Level Maturitas SPIP Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur
Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pergub Kaltim Nomor 12 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Pergub Nomor 26 Tahun 2022, menetapkan pedoman teknis dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang digunakan Inspektorat untuk menilai empat komponen utama SAKIP: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%).

Selain Setda, enam PD lain yang sukses meraih predikat 'A' adalah:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) (80,95)
- Inspektorat (80,95)
- Dinas Peternakan (80,65)
- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Kaltim (80,60)
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim (80,35)
- Dinas Perkebunan (80,20)

Sebagian besar Perangkat Daerah lainnya berada di kategori 'BB' (Sangat Baik) dan 'B' (Baik).

Gambar 3.5
Nilai AKIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Sumber : Website Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 3.6
Penyerahan Piagam AKIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Sumber : Instagram Provinsi Kalimantan Timur

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan *benchmark* kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap standar kinerja yang relevan sebagai baseline pengukuran kinerja pada periode perencanaan baru, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Tahun 2025-2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja)

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Benchmark Kinerja tahun 2025	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP	Nilai	3,018	Provinsi Kalimantan Timur	3,288
					Kota Samarinda	3,214
					Kota Bontang	3,177
					Kab. Berau	3,187
					Kab. Kutai Kartanegara	2,920
					Kab. Kutai Timur	2,714
					Kab. Penajam Paser Utara	2,391
					Kab. Paser	3,191
					Kab. Kutai Barat	2,618
					Kab. Mahakam Ulu	2,882
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	2,43	Kota Samarinda	2,25
					Kota Bontang	2,51

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Benchmark Kinerja tahun 2025	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
3	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Inspektorat	Nilai	81,92	Inspektorat Proviinsi Kalimantan Timur	80,95
					Inspektorat Kota Bontang	91,50
					Inspektorat Kabupaten Berau	62,85
					Inspektorat Kabupaten Kutai Timur	60,10

Sumber : Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Instagram Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Terdapat variasi nilai Maturitas SPIP Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil tertinggi diperoleh oleh Kota Samarinda yaitu 3,214 dan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh nilai, 3,288.
2. Hasil evaluasi Kapabilitas APIP pada Pemerintah Kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan karena adanya perubahan metode penilaian dimana sebelumnya berada pada level 3, namun pada tahun 2025 menjadi level 2 dengan nilai 2,55 untuk Kota Samarinda dan 2,55 untuk Kota Bontang.
3. Nilai SAKIP jika dibandingkan dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur maka dapat terlihat bahwa nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan lebih tinggi 0,97 poin namun masih dengan predikat yang sama yaitu A (Memuaskan).

Adapun bukti dukung hasil evaluasi Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025						
		SPIP		MR		IEPK		Status
		Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Terdefinis
	Provinsi Kalimantan Timur							
1	Kota Bontang	3.177	3	3.100	3	2.832	2	Tidak
2	Kota Samarinda	3.214	3	3.102	3	2.658	2	Tidak
3	Kabupaten Penajam Paser Utara	2.391	2	2.409	2	1.000	1	Tidak
4	Kabupaten Berau	3.187	3	3.155	3	2.532	2	Tidak
5	Kabupaten Kutai Barat	2.618	2	2.316	2	2.682	2	Tidak
6	Kabupaten Kutai Timur	2.714	2	2.625	2	2.145	2	Tidak
7	Kabupaten Paser	3.191	3	3.177	3	2.514	2	Tidak
8	Kabupaten Kutai Kartanegara	2.920	2	2.928	2	2.478	2	Tidak
9	Kota Balikpapan	3.018	3	3.020	3	2.730	2	Tidak
10	Kabupaten Mahakam Ulu	2.882	2	2.691	2	2.328	2	Tidak

Gambar 3.7
Nilai Maturitas SPIP Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur
Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

APIP	EVALUASI							PENJAMINAN KUALITAS						
	SKOR TERTIMBANG					SKOR KAPABILITA	LEVEL KAPABILITA	SKOR TERTIMBANG					SKOR KAPABILITA	LEVEL KAPABILITA
	E1	E2	E3	E4	E5			E1	E2	E3	E4	E5		
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat	0,84	0,41	0,39	0,26	0,30	**2,19**	**2**	0,84	0,41	0,39	0,26	0,30	**2,19**	**2**
Inspektorat Kabupaten Banjar	0,86	0,41	0,45	0,30	0,30	**2,33**	**2**	0,86	0,41	0,45	0,27	0,29	**2,29**	**2**
Inspektorat Kota Banjarbaru	0,93	0,47	0,52	0,30	0,30	**2,51**	**2**	0,91	0,39	0,40	0,30	0,30	**2,30**	**2**
Inspektorat Hulu Sungai Selatan	0,86	0,46	0,53	0,28	0,28	**2,41**	**2**	0,86	0,46	0,48	0,28	0,28	**2,36**	**2**
Inspektorat Kota Bontang	1,12	0,59	0,58	0,29	0,29	**2,87**	**2**	0,88	0,54	0,52	0,29	0,29	**2,51**	**2**
Inspektorat Kota Balikpapan	0,94	0,53	0,54	0,30	0,27	**2,59**	**2**	0,90	0,51	0,45	0,30	0,27	**2,43**	**2**
Inspektorat Kota Samarinda	1,06	0,55	0,35	0,30	0,29	**2,55**	**2**	0,80	0,51	0,35	0,30	0,29	**2,25**	**2**

Gambar 3.8
Nilai Kapabilitas APIP Kota se Provinsi Kalimantan Timur
Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis terhadap capaian kinerja perangkat daerah tahun 2025 dilakukan dengan mengidentifikasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta perkembangan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai dasar pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan. Selain mengidentifikasi penyebab keberhasilan maupun kendala yang mengakibatkan belum tercapainya target kinerja, hasil analisis menjadi dasar perumusan alternatif solusi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan dan/atau direncanakan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja guna mendorong peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100%	Pemerintah Kota Balikpapan telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas namun organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.	• Membangun sistem pengendalian intern dan mengimplementasikan pada seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan serta menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko *fraud*) • Menyusun rumusan indikator, target dan strategi pencapaian kinerja yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja. • Melakukan pendampingan SPIP	• Menyusun instruksi Wali Kota terkait SPIP • Pembinaan dan pendampingan SDM Perencana Perangkat Daerah • Menetapkan Perencanaan yang SMART-C • Menyusun pengendalian untuk mencegah temuan berulang • Melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi LHE BPKP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	Nilai	81,15	81,92	100,95%	• Melakukan penyusunan LAKIP tepat waktu • Memiliki dokumen Perencanaan dengan indikator yang sebagian besar SMART-C • Target indikator telah tercapai dengan baik • Pengukuran kinerja level organisasi dilakukan per triwulan dan level individu dilakukan per bulan •	• Menyusun pohon kinerja yang memberikan informasi keterkaitan dengan bidang lain (crosscutting) • Melakukan survei pemahaman kinerja secara berkala • Melakukan updating data dokumen Perencanaan pada Website Inspektorat Kota Balikpapan • Melakukan pengukuran secara berkala • Menyajikan data *benchmark* kinerja	• Melakukan publikasi dokumen Perencanaan kinerja secara tepat waktu melalui Website Inspektorat Kota Balikpapan • Menarasikan tabel isu strategis pada LAKIP • Seluruh pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja.

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Sehubungan dengan Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14
Analisis Penyebab Kebrhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja atas Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan : Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,317	3,018	90,98%	Pemerintah Kota Balikpapan telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas namun organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.	• Membangun sistem pengendalian intern dan mengimplementasikan pada seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan serta menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko *fraud*) • Menyusun rumusan indikator, target dan strategi pencapaian kinerja yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja. • Melakukan pendampingan SPIP	• Menyusun instruksi Wali Kota terkait SPIP • Pembinaan dan pendampingan SDM Perencana Perangkat Daerah • Menetapkan Perencanaan yang SMART-C • Menyusun pengendalian untuk mencegah temuan berulang • Melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi LHE BPKP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,025	2,43	80,33%	Kinerja pengawasan, kualitas proses kerja, penerapan manajemen risiko, serta pelaksanaan fungsi *assurance* dan *consulting*, Inspektorat Kota Balikpapan menunjukkan kemampuan yang cukup matang dalam mengelola pengawasan internal secara terstruktur dan terdokumentasi, namun masih berorientasi pada kepatuhan administratif. Analisis dan reviu terbatas, serta hasil belum memberikan nilai tambah signifikan terhadap Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (TKMRPI)	• Inspektorat telah menyusun pedoman kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur • Telah melaksanakan Manajemen sumber daya keuangan serta pengembangan kompetensi dengan baik • Telah melakukan digitalisasi pengawasan melalui Rumah Integritas • Seluruh pegawai menandatangani Pakta Integritas	• Pemenuhan SDM APIP • Menyusun atensi hasil pengawasan kepada Wali Kota • Memastikan penugasan berpedoman pada aturan • Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan manajemen daerah • Meningkatkan kualitas komunikasi hasil pengawasan • Menguatkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi • Mengembangkan sistem/aplikasi pengawasan terintegrasi

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Inspektorat	Nilai	81,15	81,92	100,95%	• Melakukan penyusunan LAKIP tepat waktu • Memiliki dokumen Perencanaan dengan indikator yang sebagian besar SMART-C • Target indikator telah tercapai dengan baik • Pengukuran kinerja level organisasi dilakukan per triwulan dan level individu dilakukan per bulan •	• Menyusun pohon kinerja yang memberikan informasi keterkaitan dengan bidang lain (crosscutting) • Melakukan survei pemahaman kinerja secara berkala • Melakukan updating data dokumen Perencanaan pada Website Inspektorat Kota Balikpapan • Melakukan pengukuran secara berkala • Menyajikan data *benchmark* kinerja	• Melakukan publikasi dokumen Perencanaan kinerja secara tepat waktu melalui Website Inspektorat Kota Balikpapan • Menarasikan tabel isu strategis pada LAKIP • Seluruh pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja.

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Dari tabel kedua tabel di atas dapat dijelaskan bahwa atas sasaran strategis beserta indikator yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 memiliki faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja serta alternatif solusi dan rencana perbaikan yang akan dilakukan sebagai berikut:

Indikator : Maturitas SPIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Balikpapan belum memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan. Pemerintah Kota Balikpapan telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas namun organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Adapun rincian hasil penilaian per komponen sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

   Pemerintah Kota Balikpapan telah mampu merumuskan kinerjanya, yang diwujudkan dengan rumusan indikator, target dan menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja. Namun demikian, masih terdapat indikator sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis OPD, program, kegiatan dan subkegiatan yang tidak cukup untuk menggambarkan sasaran, tidak berorientasi hasil, tidak

Spesifik dan relevan, tidak dapat diukur secara obyektif, *overlapping* antara sasaran/program/kegiatan sehingga menyebabkan target dari indikator tersebut tidak tepat. Target atas sasaran strategis pemerintah daerah dan sasaran strategis OPD tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya, sasaran strategis OPD tidak selaras dengan sasaran di atasanya, serta program, kegiatan dan sub kegiatan belum memiliki sasaran.

2. Hasil Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dan telah menyusun serta mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko *fraud*) pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Namun atas sistem *whistleblowing* belum dapat memberikan jaminan kerahasiaan dan perlindungan pelapor secara memadai, risiko strategis OPD dan risiko kemitraan belum disusun, anggaran untuk kegiatan antikorupsi hanya ada pada Inspektorat Daerah, pemanfaatan saluran pengaduan belum optimal dan perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif terutama di lingkungan intern pemerintah kota untuk dapat meningkatkan persepsi pegawai atas kepercayaan sistem yang melindungi pelapor, belum adanya pedoman reviu manajemen risiko sesuai standar, serta SPIP dan manajemen risiko belum optimal dan masih mengandalkan peran Inspektorat, serta penerapan manajemen risiko belum ditetapkan sebagai indikator kinerja.

3. Hasil Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Hasil penilaian atas komponen pencapaian tujuan menunjukkan masih terdapat sasaran strategis pemerintah daerah dan OPD yang tidak tercapai realisasinya, indikator kinerja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan sasaran, tidak spesifik dan relevan, tidak cukup untuk menggambarkan sasaran, tidak dapat diukur secara obyektif, tidak berorientasi pada hasil dan *overlapping* antara sasaran/program/kegiatan.

Selain penilaian pada ketiga komponen di atas, faktor penyebab keberhasilan / kegagalan juga berdasarkan hasil pengawasan eksternal yang menunjukkan masih terdapat permasalahan berulang yang tidak material dalam pelaporan keuangan, pengelolaan asset, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Serta hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Balikpapan memperoleh skor sebesar 75,08 pada tahun 2024 dan 77,43 pada tahun 2025.

Beberapa upaya yang telah dilakukan guna tercapainya target kinerja sebagai berikut:

- Membangun sistem pengendalian intern dan mengimplementasikan pada seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan serta menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko *fraud* dan kemitraan)
- Menyusun rumusan indikator, target dan strategi pencapaian kinerja yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja.
- Melakukan pendampingan SPIP dan Manajemen Risiko

Adapun rekomendasi perbaikan atau rencana tindak lanjut guna perbaikan capaian kinerja pada tahun berikutnya yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemaparan Rencana Penilaian Mandiri SPIP (RPM) tahun 2026 oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan mendokumentasikannya dengan baik;
2. Melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas tepat waktu yaitu maksimal terbit laporan pada tanggal 30 Juni tahun berjalan;
3. Mengidentifiksi *Area of Improvement* (AoI) dan memberikan rekomendasi perbaikan pada seluruh komponen penilaian satu level di atasnya serta menyerahkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Pernyataan Penjaminan Kualitas secara tepat waktu;
4. Melakukan penyimpanan arsip digital agar terpusat, terstruktur dan mudah diakses;
5. Menyusun kebijakan risiko kemitraan serta mensosialisasikan kepada seluruh OPD;
6. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SDM perencana pada seluruh OPD dalam proses penyusunan dokumen Perencanaan guna memastikan keselarasan Perencanaan dan kesesuaiannya dengan kaidah Perencanaan;
7. Menetapkan sasaran, indikator, dan target sesuai dengan levelnya yang berorientasi hasil dan memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, Consistent* (SMART-C);

8. Menetapkan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen Perencanaan;
9. Menetapkan target secara proyektif dan memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
10. Melakukan pemantauan berkala atas risk register dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah ditetapkan dalam rangka monitoring keterjadian risiko dan efektivitas RTP;
11. Menyusun risiko strategis OPD;
12. Melakukan identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal;
13. Menyiapkan anggaran untuk kegiatan antikorupsi (koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi);
14. Melakukan identifikasi atas akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang;
15. Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendiasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP;
16. Menyusun pedoman reviu manajemen risiko;
17. Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan untuk memastikan perlindungan dan kerahasiaan pelapor.

Indikator : Kapabilitas APIP

Berdasarkan Berita acara Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 serta Hasil Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025 Tahap I dapat dijelaskan analisis penyebab kegagalan pencapaian kinerja.

Hasil Evaluasi Kapabilitas Inspektorat Kota Balikpapan menyimpulkan bahwa Inspektorat Kota Balikpapan berada pada "Level 2" dengan Skor "2,43". Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pengawasan, kualitas proses kerja, penerapan manajemen risiko, serta pelaksanaan fungsi *assurance* dan *consulting*, Inspektorat Kota Balikpapan menunjukkan kemampuan yang cukup matang dalam mengelola pengawasan internal secara terstruktur dan terdokumentasi, namun masih berorientasi pada kepatuhan administratif. Analisis dan reviu terbatas, serta hasil belum memberikan nilai tambah signifikan terhadap Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (TKMRPI). Penerapan SPIP, peningkatan kompetensi auditor, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah, mencerminkan bahwa fungsi APIP telah berjalan efektif namun pemberian rekomendasi yang strategis kepada manajemen masih terbatas.

Dengan capaian tersebut, Inspektorat Kota Balikpapan dinilai memenuhi karakteristik dan persyaratan utama Level 2 Kapabilitas APIP, yaitu keberadaan struktur dasar dan prosedur pengawasan yang terstandar, namun kualitas dan konsistensi masih rendah.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan guna perbaikan dan pencapaian target kinerja Kapabilitas APIP, diantaranya yaitu :

1. Inspektorat Kota Balikpapan telah menetapkan Keputusan Nomor 188.46-032/2025 Tanggal 30 September 2025 tentang Pedoman Standar Kerja Pengawasan Intern di Lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan yang bertujuan untuk menjadi acuan kerja yang konsisten dan terstruktur bagi para APIP di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan, guna menjamin bahwa setiap kegiatan pengawasan dilakukan sesuai standar profesional, menghasilkan nilai tambah, serta berkontribusi nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
2. Inspektorat Kota Balikpapan telah menyusun mekanisme konsultasi yang diatur dalam SK Inspektur Balikpapan Nomor 188.46- 032/1tkot tanggal 5 Januari 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konsultansi di Lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan.
3. Inspektorat Kota Balikpapan telah melakukan Telaah Sejawat Ekstern ke Inspektorat Kabupaten Kutai Barat sesuai Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor 090.1/300/Audit/M/ITKOT Tanggal 20 Oktober 2025
4. Pengelolaan kinerja telah sistematis dan berorientasi hasil
5. Manajemen Sumber Daya Keuangan Inspektorat Kota Balikpapan telah memadai, terencana dengan baik, dan diprioritaskan secara strategis
6. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi Inspektorat Kota Balikpapan telah menunjukkan kualitas perencanaan yang baik dan fokus yang tepat.

7. Inspektorat Kota Balikpapan telah menunjukkan kemandirian dan integrasi yang baik dalam pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan Rumah Integritas sebagai sistem informasi pengawasan terpadu yang mendukung fungsi manajerial dan administrasi dan keberadaan fitur monitoring dan sistem penyimpanan data rahasia/audit menunjukkan bahwa dukungan teknologi analitika data sederhana telah tersedia dan diterapkan secara selektif pada tugas-tugas tertentu
8. Inspektorat Kota Balikpapan telah melakukan penandatanganan pakta integritas yang menunjukkan komitmen APIP dalam internalisasi nilai integritas dan mencantumkan pernyataan penolakan gratifikasi dalam setiap surat tugas yang menunjukan penerapan etika organisasi..
9. Inspektorat Kota Balikpapan telah membangun kerangka kerja yang solid untuk koordinasi dan sinergi, dibuktikan dengan keberadaan Nota Kesepahaman formal dan pelaksanaan rutin Joint Audit serta konsultasi PKPT.

Adapun rekomendasi perbaikan atau rencana tindak lanjut guna perbaikan capaian kinerja Kapabilitas APIP pada tahun berikutnya yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan terkait pemenuhan sumber daya manusia sesuai kebutuhan analisis jabatan/analisis beban kerja melalui perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Menyusun atensi hasil pengawasan kepada Wali Kota serta mendorong agar hasil pengawasan dimanfaatkan dalam pengambilan Keputusan
3. Menambahkan klausul Pengembangan Informasi Awal dan Penjaminan Kualitas dalam Surat Keputusan Inspektorat Kota Balikpapan Nomor 188.46-032/2025 Tanggal 30 September 2025 tentang Pedoman Standar Kerja Pengawasan Intern di Lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan
4. Membentuk Tim/Satuan Tugas yang bertugas memantau penerapan SK tersebut
5. Memastikan seluruh personel APIP mempedomani SK tersebut dalam setiap pelaksanaan pengawasan
6. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan manajemen daerah untuk memperoleh concern pimpinan serta isu terkini sehingga dapat dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pengawasan
7. Meningkatkan kualitas komunikasi hasil pengawasan melalui penyempurnaan penyusunan laporan hasil pengawasan agar menganalisis akar penyebab dan bernilai tambah, memastikan ketepatan waktu penyampaian laporan, serta memastikan setiap rekomendasi dilengkapi rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur
8. Menguatkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi dengan menetapkan mekanisme, penanggung jawab, dan jadwal pemantauan tindak lanjut secara sistematis dan terdokumentasi, serta mengintegrasikan hasil pemantauan sebagai bagian dari penilaian efektivitas pengawasan

9. Memastikan setiap hasil pengawasan dapat dieskalasi menjadi saran/rekomendasi/atensi strategis bagi Pimpinan Daerah dalam pengambilan Keputusan
10. Mendorong dukungan pimpinan dan penguatan sistem pengawasan dengan menginisiasi koordinasi intensif dengan Kepala Daerah untuk memperkuat dukungan terhadap peningkatan kapabilitas APIP, serta mengembangkan sistem/aplikasi pengawasan terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas seluruh siklus pengawasan
11. Menyusun rencana aksi atas AoI pada Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP.

Indikator : Nilai AKIP Inspektorat

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Nomor : 700/095/IRBAN-I/ITKOT tanggal 19 Mei 2025 dijelaskan bahwa Inspektorat memperoleh nilai AKIP 81,92 dengan predikat A (Memuaskan) yang menunjukkan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV/Pengawas/Subkoordinator.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan guna perbaikan dan mempertahankan pencapaian target Nilai AKIP Inspektorat, diantaranya yaitu :

1. Telah melakukan publikasi dokumen Perencanaan pada website Inspektorat, termasuk dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja.

2. Telah melakukan sosialisasi atas proses bisnis, tujuan, sasaran beserta indikator dan target kinerja Inspektorat kepada seluruh pegawai secara berkala.
3. Melakukan survei pemahaman kinerja kepada seluruh pegawai untuk mengukur bahwa setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan
4. Telah menjadikan pengukuran kinerja tim pemeriksa sebagai dasar pemberian *reward* .
5. Telah menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan instansi pada level Provinsi.

Adapun rekomendasi perbaikan atau rencana tindak lanjut guna perbaikan capaian kinerja Nilai AKIP Inspektorat pada tahun berikutnya yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan publikasi dokumen Perencanaan kinerja secara tepat waktu melalui Website Inspektorat Kota Balikpapan
2. Menarasikan tabel isu strategis pada LAKIP
3. Seluruh pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja.

.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis dilakukan terhadap keterkaitan antara capaian kinerja perangkat daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja, baik yang berhasil mendukung pencapaian target maupun yang belum optimal. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menuju Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 2029, maka analisis disusun dengan memperhatikan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut, tanpa menyamakan indikator yang berbeda, serta difokuskan untuk menunjukkan kontribusi dan kesinambungan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Adapun tabel analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja pada masa transisi renstra disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Tujuan : Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP	90,98%					
2	Sasaran : Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	100%	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	80,33%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	89,33%	89,33%	100%
							Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	87,50%	100%	114,29%
							Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	82,50%	100%	121,21%
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	86,67%	86,67%	100%
							Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan	93,33%	100%	107,15%
							Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	80%	100%	125%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	100,95%	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Inspektorat	100,95%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	88	88,14	100,16%
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88	88,13	100,15%
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88	88,02	100,02%
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88	88,01	100,01%
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88	88,56	100,64%
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88	88,08	100,09%
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88	88,05	100,06%

Keterangan:
Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021 2026 menuju Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut dapat berbeda sebagai konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan. Program dan kegiatan yang disajikan pada tabel ini bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lintas periode perencanaan.

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Tabel 3.15. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra, menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Balikpapan pada Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Sasaran Strategis Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Maturitas SPIP pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 tercapai sebesar 100%, sementara indikator kinerja yang sama namun terdapat perbedaan satuan yaitu Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan satuan nilai pada tujuan Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tercapai sebesar 90,98%, melalui pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah melalui berbagai kegiatan pendampingan dan penugasan pengawasan sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Manajemen Risiko dan Fraud
   Tanggal 11 Februari 2025
   Sasaran : 36 Perangkat Daerah



2. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Sektoral pada Kota Balikpapan Tahun 2025
   Tanggal 25-27 Februari 2025
   Sasaran : 24 Perangkat Daerah



3 Evaluasi atas Tata Kelola Sistem Jaminan Sosial Nasional Tahun 2025 pada Kota Balikpapan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Tanggal 14 Mei 2025

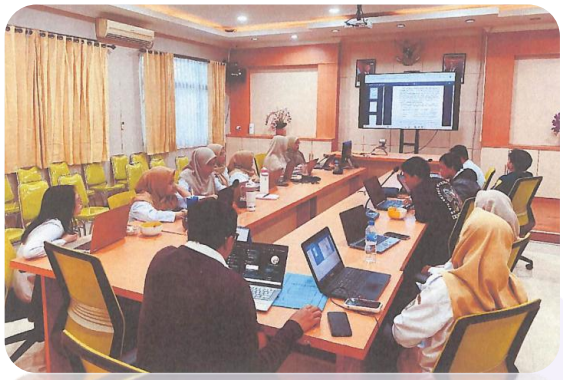
Sasaran : 6 Perangkat Daerah



4 Pengarahan Tim Fasilitator Penilaian Mandiri SPIP

Tanggal 11 Juni 2025

Sasaran : Auditor Inspektorat



5 Pembahasan Kertas Kerja SPIP

Tanggal 13 Juni 2025

Sasaran : Auditor Inspektorat



6 Koordinasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Mutu SPIP Terintegrasi 2025

Tanggal 23 Juni 2025

Sasaran : 3 Perangkat Daerah
Auditor Inspektorat



7

Desk/Verifikasi Kertas Kerja SPIP Terintegrasi

Tanggal 24-26 Juni 2025

Sasaran : 36 Perangkat Daerah





8

Pembahasan Tindak lanjut Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi

Tanggal 1 Juli 2025

Sasaran : Auditor Inspektorat



9

Persiapan Evaluasi SPIP Terintegrasi

Tanggal 8 Juli 2025

Sasaran : Auditor Inspektorat

Tim Evaslap



10

Persiapan Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

Tanggal 10 Juli 2025

Sasaran : Bappeda Litbang

Setdakot

Inspektorat



11 Penjaminan Kualitas Reviu Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Tanggal 4 – 5 Agustus 2025

Sasaran : Auditor Inspektorat



12 Pendampingan Reviu Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 oleh KemenPANRB

Tanggal 6 Agustus 2025

Sasaran : Auditor Inspektorat, Bappeda Litbang



13 Reviu RPJMD Kota Balikpapan Periode 2025-2029 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Tanggal 19 Agustus 2025

Sasaran : Auditor Inspektorat

Bappeda Litbang

14 *Exit Meeting* Evaluasi Pencegahan Dan Penurunan Stunting pada Kota Balikpapan Tahun 2025

Tanggal 19 Agustus 2025

Sasaran : 4 Perangkat Daerah



15 *Exit Meeting* Reviu Rancangan Akhir RPJMD Kota Balikpapan

Tanggal 22 Agustus 2025

Sasaran : Auditor Inspektorat, Bappeda Litbang





16 Pra *Entry Meeting* evaluasi SPIP Terintegrasi

Tanggal 22 September 2025

Sasaran : 19 Perangkat Daerah



17 Evaluasi SPIP Terintegrasi Kota Balikpapan

Tanggal 23-26 September 2025

Sasaran : 10 Perangkat Daerah



18 Penyusunan Tanggapan Atas draft evaluasi SPIP 2025

Tanggal 29 Oktober 2025

Sasaran : Auditor Inspektorat dan Tim Evaslap

2 Perangkat Daerah





19 Bimbingan Teknis Penguatan Lini Dua dan Lini Tiga untuk Membangun SPIP Terintegrasi yang Adaptif, Integratif, dan Bernilai Tambah

Tanggal 27-30 November 2025

Sasaran : Inspektorat

Bappeda Litbang

Setdakot







20

Bimbingan Teknis Penyusunan Register Risiko Strategis dan Risiko Kemitraan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan

Tanggal 3 Desember 2025

Sasaran : 36 Perangkat Daerah





Dalam hal sasaran strategis belum memenuhi target, sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator kinerja Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2025-2029 mencapai 80,33% dan belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Kondisi tersebut didukung melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko namun terdapat beberapa hal yang belum maksimal sehingga berdampak pada belum optimalnya pencapaian indikator kinerja tahun 2025.

Hal yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Kegiatan asurans yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Balikpapan telah terstruktur dengan fokus pada kepatuhan namun prosedur dasar, kualitas praktik, dan hasil pengawasan masih terbatas, serta belum berkontribusi pada perbaikan akar masalah dan perbaikan TKMRPI;
2. Penugasan mulai mengikuti prosedur dan format dasar namun berorientasi pada kepatuhan administratif. Selain itu, analisis dan reviu masih terbatas serta hasil belum memberikan nilai tambah signifikan;
3. Laporan telah disusun namun belum memenuhi seluruh atribut temuan serta belum ada kejelasan batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat dinilai ketepatan waktu penyampaian laporan;
4. Pemantauan tindak lanjut telah dilakukan secara sistematis namun hasilnya tidak terdokumentasi secara memadai;
5. Penerapan pengawasan sesuai SK Inspektur Balikpapan masih belum optimal disebabkan *load* pekerjaan yang cukup tinggi dan keterbatasan SDM;
6. Perencanaan pengawasan sudah memiliki fokus dan sasaran, dan telah sesuai dengan prioritas daerah namun belum mengakomodasi isu terkini dan *concern* pimpinan;
7. Pengawasan ketaatan, pengawasan kinerja, pengawasan atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal (TKMRPI) dilaksanakan tanpa didahului dengan penyusunan Desain Penugasan Pengawasan.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Kegiatan konsultansi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Balikpapan telah terstruktur, menggunakan prosedur dasar, namun lingkup yang disepakati masih fokus pada isu administratif dan prosedural. Kualitas masukan terbatas pada regulasi yang ada dan belum mendukung penguatan TKMRPI organisasi;
2. Penerapan layanan konsultansi sesuai SK Inspektur Balikpapan tersebut masih belum optimal disebabkan *load* pekerjaan yang cukup tinggi, sehingga dalam pelaksanaan konsultansi terkendala penetapan ruang lingkup serta kesepakatan ekspektasi atas hasil konsultansi;
3. *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) baik secara intern maupun ekstern belum berjalan dengan optimal, ditunjukkan dengan supervisi dan reviu berjenjang yang telah dilakukan, namun secara sporadik dan tanpa didukung pedoman;
4. APIP telah memahami nilai-nilai integritas dan etika organisasi serta terdapat saluran pengaduan, hubungan organisasi bersifat formal dan fungsional terbatas, dan akses informasi pengawasan terbuka secara terbatas.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan kebutuhan SDM sudah tersusun melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja yang lengkap dan berbasis risiko operasional namun pemenuhan kebutuhan SDM belum sesuai dengan rekomendasi atau kebutuhan;
2. Belum memiliki Rencana Pengembangan Kompetensi lima tahunan yang disusun sesuai ketentuan dan melibatkan proses perencanaan yang memadai;
3. APIP melaksanakan pengembangan kompetensi berdasarkan rencana pelatihan tahunan dengan target 120 jam per APIP namun berdasarkan hasil realisasi masih terdapat APIP yang belum memenuhi jam minimal pelatihan tersebut;
4. APIP telah memiliki sistem informasi yaitu Rumah Integritas yang telah dimanfaatkan oleh APIP namun masih memerlukan saran dan masukkan untuk pengembangan dan pemeliharaan Rumah Integritas;
5. Perlunya Komitmen Pimpinan Daerah perlu terus diperkuat melalui dukungan kebijakan, kewenangan, dan pemenuhan sumber daya manusia APIP, dan penganggaran yang memadai agar APIP mampu melaksanakan pengawasan secara independen, profesional, dan berbasis risiko, serta memastikan hasil pengawasan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan Keputusan.

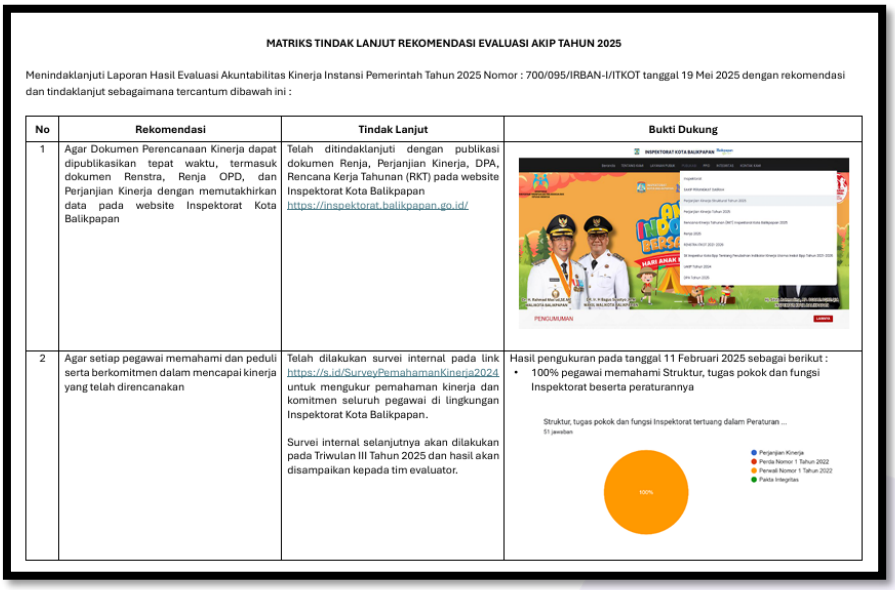
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan dengan indikator kinerja yang sama yaitu Nilai AKIP Inspektorat pada sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tercapai sebesar 100,95%, melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP Inspektorat tahun 2025 yaitu :

1. Melaksanakan rapat internal dengan pembahasan terkait hasil Evaluasi AKIP dan tindak lanjut yang akan dilakukan



2 Melaksanakan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor : 090.1/209/Audit/M/Itkot untuk Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Perangkat Daerah

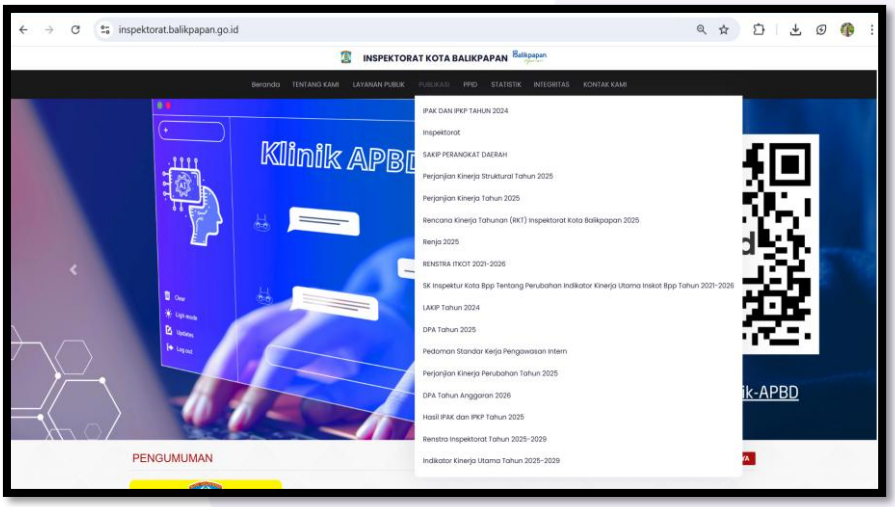


MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI AKIP TAHUN 2025

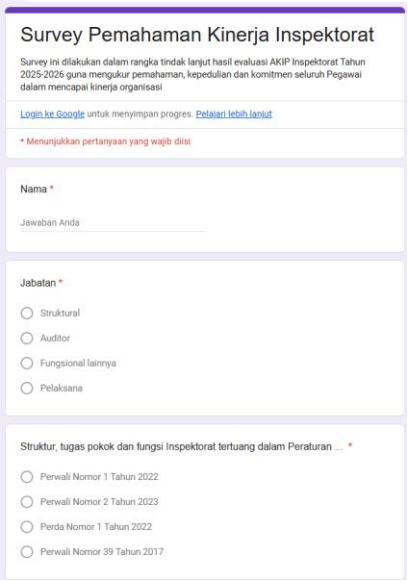
Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Nomor : 700/095/IRBAN-I/ITKOT tanggal 19 Mei 2025 dengan rekomendasi dan tindaklanjut sebagaimana tercantum dibawah ini :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1	Agar Dokumen Perencanaan Kinerja dapat dipublikasikan tepat waktu, termasuk dokumen Renstra, Renja OPD, dan Perjanjian Kinerja dengan memutakhirkan data pada website Inspektorat Kota Balikpapan	Telah ditindaklanjuti dengan publikasi dokumen Renja, Perjanjian Kinerja, DPA, Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada website Inspektorat Kota Balikpapan https://inspektorat.balikpapan.go.id/	
2	Agar setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Telah dilakukan survei internal pada link https://s.id/SurveyPemahamanKinerja2024 untuk mengukur pemahaman kinerja dan komitmen seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan. Survei internal selanjutnya akan dilakukan pada Triwulan III Tahun 2025 dan hasil akan disampaikan kepada tim evaluator.	Hasil pengukuran pada tanggal 11 Februari 2025 sebagai berikut : • 100% pegawai memahami Struktur, tugas pokok dan fungsi Inspektorat beserta peraturannya

3 Melakukan publikasi dokumen Perencanaan dan Pelaporan melalui website dan Instagram Inspektorat Kota Balikpapan



4 Melaksanakan survei pemahaman kinerja secara berkala bagi seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan.


Survey Pemahaman Kinerja Inspektorat

Survey ini dilakukan dalam rangka tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2025-2026 guna mengukur pemahaman, kepedulian dan komitmen seluruh Pegawai dalam mencapai kinerja organisasi

Login ke Google untuk menyimpan progres. Pelajari lebih lanjut

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama *

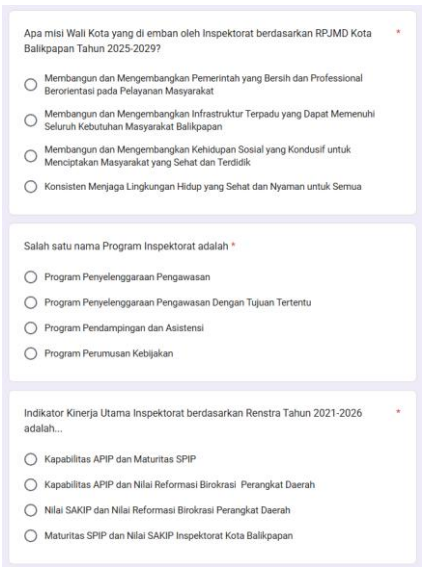
Jawaban Anda

Jabatan *

- Struktural
- Auditor
- Fungsional lainnya
- Pelaksana

Struktur, tugas pokok dan fungsi Inspektorat tertuang dalam Peraturan ... *

- Perwali Nomor 1 Tahun 2022
- Perwali Nomor 2 Tahun 2023
- Perda Nomor 1 Tahun 2022
- Perwali Nomor 39 Tahun 2017


Apa misi Wali Kota yang di emban oleh Inspektorat berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029? *

- Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Professional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat
- Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan
- Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik
- Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua

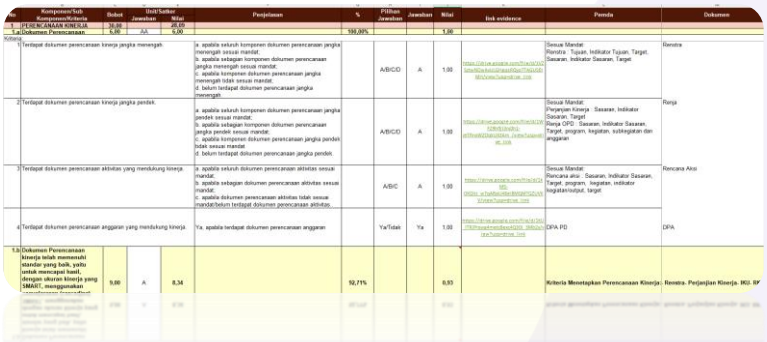
Salah satu nama Program Inspektorat adalah *

- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- Program Pendampingan dan Asistensi
- Program Perumusan Kebijakan

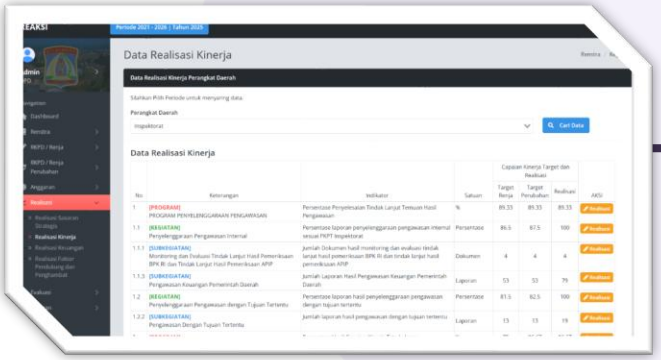
Indikator Kinerja Utama Inspektorat berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 adalah... *

- Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP
- Kapabilitas APIP dan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
- Nilai SAKIP dan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
- Maturitas SPIP dan Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan

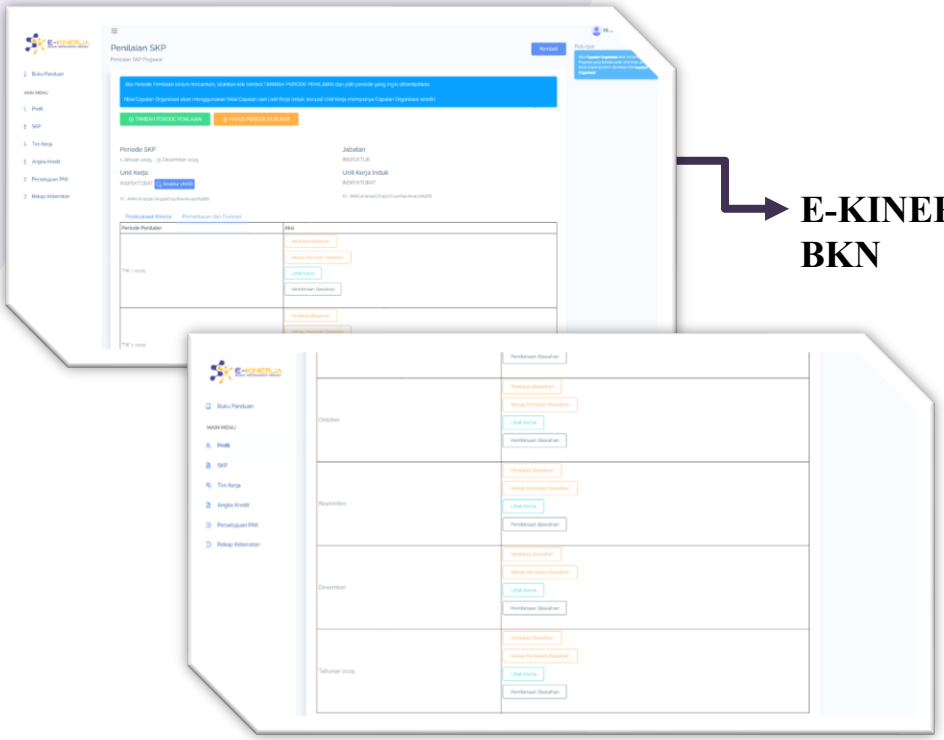
5 Melakukan penilaian Mandiri AKIP melalui PEMANTIK



6 Melakukan pengukuran kinerja secara berkala berbasis teknologi informasi melalui aplikasi REAKSI (Pengukuran Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi) dan E-kinerja BKN

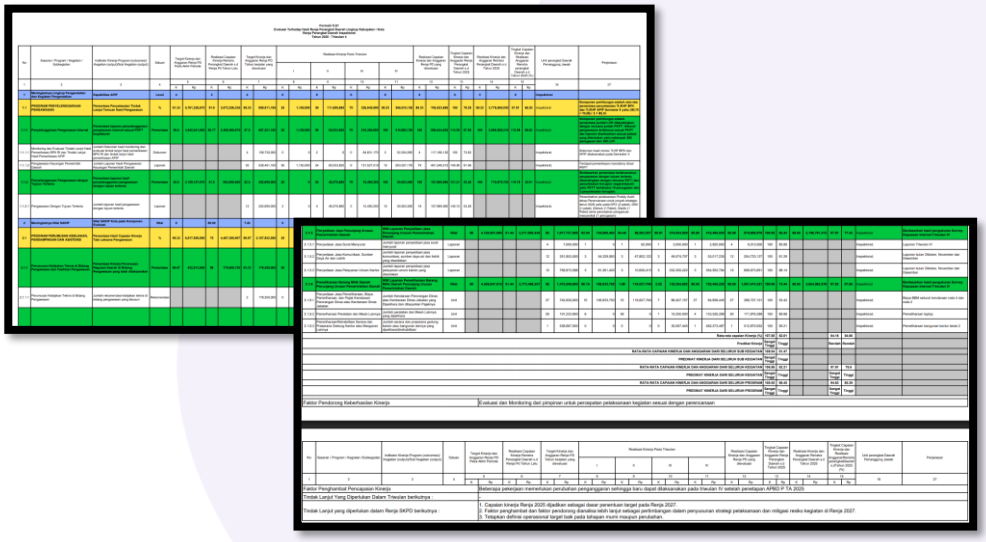


REAKSI

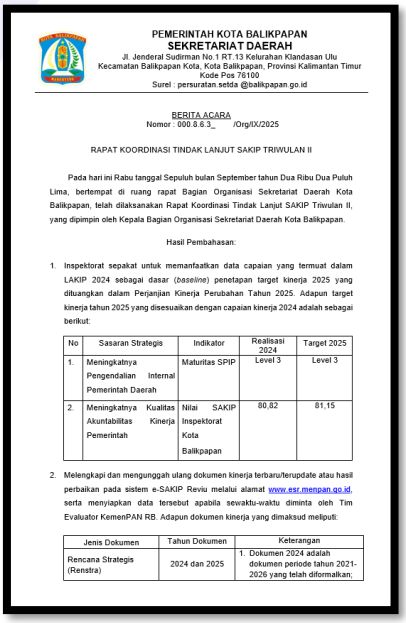


7 Menyusun pelaporan kinerja dengan menyajikan informasi yang lengkap meliputi pencapaian sasaran, kinerja yang diperjanjikan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya

8 Melakukan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja melalui aplikasi REAKSI.



9 Melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut SAKIP Triwulan II bersama Bagian Organisasi dan Auditor Inspektorat



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman No.1 RT.13 Kelurahan Klandasan Ulu
Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos 76100
Surel : persuratan.setda @balikpapan.go.id

BERITA ACARA
Nomor : 000.8.6.3_ /Org/IX/2025

RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT SAKIP TRIWULAN II

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di ruang rapat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut SAKIP Triwulan II, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Hasil Pembahasan:

1. Inspektorat sepakat untuk memanfaatkan data capaian yang termuat dalam LAKIP 2024 sebagai dasar (*baseline*) penetapan target kinerja 2025 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Adapun target kinerja tahun 2025 yang disesuaikan dengan capaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025
1.	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	80,82	81,15

2. Melengkapi dan mengunggah ulang dokumen kinerja terbaru/terupdate atau hasil perbaikan pada sistem e-SAKIP Reviu melalui alamat www.esr.menpan.go.id, serta menyiapkan data tersebut apabila sewaktu-waktu diminta oleh Tim Evaluator KemenPAN RB. Adapun dokumen kinerja yang dimaksud meliputi:

Jenis Dokumen	Tahun Dokumen	Keterangan
Rencana Strategis (Renstra)	2024 dan 2025	1. Dokumen 2024 adalah dokumen periode tahun 2021-2026 yang telah diformalkan;



3.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penilaian efisiensi pemanfaatan sumber daya perangkat daerah dalam pencapaian kinerja pada tahun pelaporan dilakukan dengan membandingkan penggunaan sumber daya, khususnya anggaran dan sumber daya pendukung lainnya, terhadap output dan outcome yang dihasilkan. Uraian difokuskan untuk menunjukkan tingkat efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja.

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

   Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga

efisensi pemanfaatan SDM menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Pada subbab ini disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 dengan mengkaji kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan aparatur, pola penugasan, serta kontribusinya terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), diketahui bahwa kebutuhan aparatur sipil negara pada Inspektorat Kota Balikpapan berjumlah 116 (seratus enam belas) orang. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2025, perangkat daerah hanya didukung oleh 59 (lima puuh Sembilan) orang pegawai dengan komposisi 53 (lima puluh delapan) orang PNS, 5 (lima) orang PPPK dan 1 (satu) orang PPPK Paruh Waktu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, yang menjadi dasar dalam analisis efisiensi pemanfaatan SDM.

Untuk memberikan Gambaran komposisi SDM yang tersedia, berikut disajikan data jumlah pegawai (PNS/PPPK/PPPK Paruh Waktu) pada Inspektorat Kota Balikpapan menurut jabatan dan jenis kelamin.

Tabel 3.16
Jumlah ASN Inspektorat Kota Balikpapan
menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Inspektur	-	1
2	Sekretaris	1	-
3	Inspektur Pembantu	3	1
4	Auditor Madya	2	3
5	Auditor Muda	1	10
6	Auditor Penyelia	1	1
7	Auditor Pertama	1	5
8	Auditor Mahir	1	2
9	Auditor Terampil	4	3
10	P2UPD Pertama	2	2
11	Perencana Ahli Muda	-	2
12	Kepala Sub Bagian Umum	1	-
13	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2
14	Pengolah Data dan Informasi	-	-
15	Pengadministrasi Perkantoran	1	1
16	Operator Layanan Operasional	1	-
17	Penata Layanan Operasional	2	3
18	Pranata Komputer	-	1
Jumlah		22	37

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Selain ditinjau dari jabatan, kondisi sumber daya manusia juga dianalisis berdasarkan Tingkat kualifikasi Pendidikan untuk melihat kesesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi.

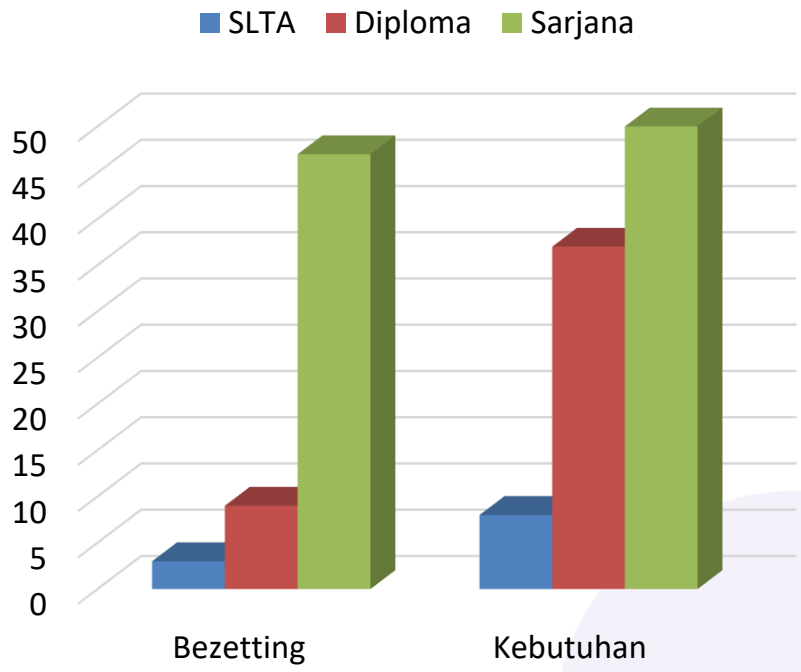


Diagram 3.1
Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Kota Balikpapan menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Inspektorat Kota Balikpapan didominasi oleh aparatur dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang atau 79,66%, diikuti oleh aparatur dengan kualifikasi Pendidikan Diploma dan SLTA. Komposisi SDM tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia dengan pola penugasan rangkap sehingga menambah beban tugas terhadap seluruh pegawai yang ada serta pemanfaatan sistem digital dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa penambahan jumlah SDM. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

Namun dengan jumlah SDM yang belum sesuai kebutuhan, Inspektorat Kota Balikpapan tetap berupaya menyampaikan usulan kebutuhan SDM berdasarkan laporan berikut:

1. Laporan Hasil Reviu Kecukupan Anggaran dan SDM pada Sekretariat Inspektorat dan Inspektorat Pembantu Khusus Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 Nomor : 700.1.2.1/3648/Itprov-III/2025 yang diterbitkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
2. Laporan Hasil Evaluasi atas Efektivitas Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2025 pada Inspektorat Kota Balikpapan Nomor : PE.09.03/LHP-322/PW17.6/2025 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, disajikan data inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Balikpapan. Data tersebut menggambarkan jenis, jumlah, kondisi, serta tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada tahun pelaporan. Penyajian data ini dimaksudkan sebagai dasar dalam menilai kesesuaian antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan kebutuhan organisasi.

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana
Inspektorat Kota Balikpapan

No	Jenis Saran/Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	Gedung / Bangunan	1	Baik	✓	-	Digunakan untuk kegiatan operasional
2	Kendaraan Dinas	26	Baik	✓	-	Digunakan untuk kegiatan operasional dan pengawasan lapangan
3	Komputer / Laptop	84	Baik	✓	-	Digunakan untuk mendukung administrasi
4	Peralatan Pengawasan Lapangan	16	Baik	✓	-	Digunakan untuk kegiatan pengawasan lapangan
5	Peralatan Kantor	184	Baik	✓	-	Digunakan untuk mendukung administrasi
6	Sarana Pendukung Lainnya	521	Baik	✓	-	Digunakan untuk pendukung kegiatan administrasi dan operasional

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa sebagian besar aset yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Balikpapan berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tabel mengenai jumlah aset yang digunakan dan tidak digunakan memberikan gambaran nilai aset yang telah dimanfaatkan secara aktif serta aset yang belum digunakan secara optimal. Aset yang belum digunakan umumnya disebabkan oleh faktor kondisi fisik, keterbatasan kebutuhan operasional, atau penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas organisasi. Informasi ini menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, khususnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada periode selanjutnya.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Untuk menilai tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah pada tahun pelaporan dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara alokasi dan realisasi anggaran dengan output dan outcome yang dihasilkan sebagaimana tercermin dalam capaian indikator kinerja.

Uraian difokuskan pada perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, guna menunjukkan sejauh mana anggaran telah dimanfaatkan secara efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil analisis ini disajikan sebagai dasar evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E	:	Efisiensi
CKi	:	Capaian keluaran i (kolom 6)
PAKi	:	Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
RAKi	:	Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Gambar 3.9
Rumus Efisiensi Anggaran
Sumber : Peraturan Menteri Keuangan

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Maturitas Sistem Pengendalian lntem Pemenntah (SPIP)	Nilai	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029	3,3170	3,0180	90,986%	Rp 25.968.278.964	Rp 22.551.353.236	86,84%	4,55%	-
2	Meningkatnya Pengendalian lnternal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Level	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)	3,00	3,00	100,00%	Rp 3.047.833.605	Rp 2.722.997.509	89,34%	10,66%	Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP lnspektorat Kota Balikpapan	Nilai	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)	81,15	81,92	100,95%	Rp 22.920.445.359	Rp 19.828.355.727	86,51%	14,30%	Efisien
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP lnspektorat		Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029								

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029	3,03	2,43	80,33%	Rp 3.047.833.605	Rp 2.722.997.509	89,34%	-11,22%	-
Keterangan:												
1.	Indikator kinerja pada tabel ini bersumber dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang memuat indikator dari Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan;											
2.	Efisiensi penggunaan anggaran hanya diakui untuk indikator kinerja dengan capaian ≥100%, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh;											
3.	Perbedaan sasaran dan indikator kinerja merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode baru dan tidak dilakukan penyamaan indikator yang berbeda.											

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.18 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran, diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bawah terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 diketahui terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaian kinerjanya juga mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui.

Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

1. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah yang sebagian besar dilaksanakan melalui forum daring dan rapat internal, sehingga mengurangi kebutuhan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat;
2. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan daerah yang memanfaatkan sumber daya internal Inspektorat Kota Balikpapan tanpa memerlukan dukungan pihak ketiga secara signifikan;
3. Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencukupi dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Kota Balikpapan.

Di sisi lain, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang juga tidak diakui efisiensi penggunaan anggarannya karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%. Hal ini wajar mengingat indikator tersebut merupakan indikator periode perencanaan baru yang baru mulai diimplementasikan pada tahun pertama Renstra. Kondisi ini dipengaruhi oleh:

1. Komitmen bersama seluruh lini pengendalian dalam memengaruhi capaian indikator yang bersifat lintas perangkat daerah yaitu Maturitas SPIP;
2. Proses penyesuaian kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap arah pembangunan periode baru;
3. Adanya perubahan pedoman penilaian / evaluasi Kapabilitas APIP.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator-indikator kinerja tertentu yang telah mencapai target, sementara pada indikator lainnya efisiensi belum dapat diakui karena capaian kinerja yang belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025, realisasi anggaran belanja Inspektorat Kota Balikpapan mencapai sebesar 86,84% dari total anggaran yang dialokasikan. Informasi mengenai anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Uraian	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**22.920.445.359**	**19.828.355.727**	**86,51**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**14.598.843.000**	**13.056.242.850**	**89,43**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.598.843.000	13.056.242.850	89,43
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**3.357.167.570**	**2.708.817.139**	**80,69**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.100.000.000	803.738.748	73,07
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	2.168.088.195	1.830.553.391	84,43
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	89.079.375	74.525.000	83,66
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.229.526.315**	**1.063.912.894**	**86,53**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.371.400	17.553.850	82,14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	436.218.300	401.992.500	92,15
Penyediaan bahan Logistik Kantor	405.643.775	349.783.388	86,23
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	166.292.840	128.150.328	77,06
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	166.432.828	83,22

Uraian	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.244.631.486**	**1.038.299.545**	**83,42**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.700.000	50.347.920	99,31
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.800.000	46.200.000	98,72
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	347.131.486	300.602.850	86,60
Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000.000	641.148.775	80,14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.017.727.088**	**879.608.978**	**86,43**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	6.012.000	85,89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.853.500	204.723.127	81,29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	758.873.588	668.873.85	88,14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.472.549.900**	**1.081.474.321**	**73,44**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	742.629.000	396.727.101	53,42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.233.900	171.876.288	89,88
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	538.687.000	512.870.932	95,21
Penyelenggaraan Pengawasan	**889.911.105**	**706.423.695**	**79,38**
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**687.221.105**	**598.434.635**	**87,08**
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	528.491.105	481.248.515	91,06

Uraian	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lLanjut Hasil Pemeriksaan APIP	158.730.000	117.186.120	73,83
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**202.690.000**	**107.989.060**	**53,28**
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	202.690.000	107.989.060	53,28
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**2.157.922.500**	**2.016.573.814**	**93,45**
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	**178.350.000**	**156.656.600**	**87,84**
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	178.350.000	156.656.600	87,84
Pendampingan dan Asistensi	**1.979.572.500**	**1.859.917.214**	**93,96**
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	386.280.000	324.136.100	83,91
Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	105.225.000	92.110.800	87,54
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.484.762.500	1.440.475.314	97,02
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3.305.000	3.195.000	96,67
TOTAL	**25.968.278.964**	**22.551.353.236**	**86.84**

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan merupakan bentuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Balikpapan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 serta Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran strategis berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2025-2029 secara umum telah dapat dicapai dengan baik.



Adapun berdasarkan Renstra Inspektorat tahun 2021-2026, capaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan indikator Maturitas SPIP sesuai target yang ditetapkan tercapai 100%, yaitu berada pada level 3.
2. Sasaran strategis meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan memiliki target yang ditetapkan yaitu 81,15 dan tercapai sebesar 100,95% dengan nilai 81,92.

Sedangkan berdasarkan Renstra Inspektorat tahun 2025-2029, capaian kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Tujuan terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Maturitas SPIP dan target 3,317 pada tahun 2025 tercapai 90,98% yaitu memperoleh nilai 3,018.
2. Sasaran strategis Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan indikator Kapabilitas APIP memiliki target pada tahun 2025 yaitu 3,025 dan tercapai sebesar 80,33% yaitu dengan nilai 2,43.
3. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan indikator Nilai AKIP Inspektorat memiliki target target yang ditetapkan yaitu 81,15 dan tercapai sebesar 100,95% dengan nilai 81,92.

Adapun langkah yang harus dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja organisasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran seluruh lini dalam Sistem Pengendalian Intern pemerintah daerah;
2. Meningkatkan koordinasi diantara Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah), Inspektur Pembantu, Sekretariat dan Fungsional Auditor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
3. Meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas pada Inspektorat Kota Balikpapan serta mendokumentasikannya dengan baik;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Inspektorat Kota Balikpapan;
5. Mempertahankan komitmen dan pemahaman kinerja seluruh pegawai Inspektorat Kota Balikpapan.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Balikpapan, 27 Februari 2026

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN INSPEKTORAT

SILVIA RAHMADINA, AP. CGCAE., CGRE., QIA.

"Menciptakan budaya integritas dan akuntabilitas tidak hanya meningkatkan efektivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang penuh rasa hormat, menyenangkan, dan memberi kehidupan"

TOM HANSON

"Budaya kinerja bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas, terukur dan bertanggung jawab"

SILVIA RAHMADINA.AP, CGCAE. CGRE. QIA

LAKIP INSPEKTORAT 2025

rumah integritas

Sekretariat Inspektorat Balikpapan

LAMPIRAN 1

MATRIKS RENSTRA INSPEKTORAT

TAHUN 2021-2026

Tabel 6.4

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pedanaan Indikatif (2021-2026)

Inspektorat Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (Outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target		Target		target		target		target		target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		9		11		13		15		17	18	19	20
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel				Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 4	-	Level 4	-	Level 4	-	Inspektorat	
	Meningkatnya Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian			Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 4	-	Level 4	-	Level 4	-	Inspektorat	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan**	**81,33 %**	**83,33 %**	**687,377,000**	**85,33 %**	**717,589,035**	**87,33 %**	**824,703,539**	**89,33 %**	**911,510,487**	**91,33 %**	**1,015,470,647**	**91,33 %**	**4,156,650,708**	**Inspektorat**	
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat**	**83,50 %**	**84,50 %**	**88,205,000**	**85,50 %**	**92,066,235**	**86,50 %**	**105,820,209**	**87,50 %**	**116,981,127**	**88,50 %**	**130,240,775**	**88,50 %**	**533,313,346**	**Inspektorat**	

			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu**	**78.50**	**79.50**	**599,172,000**	**80.50**	**625,522,800**	**81.50**	**718,883,330**	**82.50**	**794,529,360**	**83.50**	**885,229,872**	**83.50**	**3,623,337,362**	**Inspektorat**	
				Nilai SAKIP	68.99	75.50	-	75.52	-	75.54	-	75.56	-	75.58	-	75.58	**-**	Inspektorat	
	Meningkatnya Nilai SAKIP			**Nilai SAKIP Kota pada Komponen Evaluasi**	6.77	7.42	-	7.42	-	7.42	-	7.43	-	7.43	-	7.43	**-**	Inspektorat	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan**	**50**	**51.67**	**779,103,000**	**63.33**	**813,346,635**	**75.00**	**934,754,874**	**86.67**	**1,033,145,646**	**98.33**	**1,150,978,615**	**98.33**	**4,711,328,770**	Inspektorat	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas	**Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan**	**80.00**	**83.33**	**56,293,000**	**86.67**	**58,748,065**	**90.00**	**67,541,580**	**93.33**	**74,612,296**	**96.67**	**83,139,215**	**96.67**	**340,334,156**	Inspektorat	

			i Pengawasan															
			Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan**	**18.50**	**20.00**	**722,810,000**	**40.00**	**754,598,570**	**60.00**	**867,213,294**	**80.00**	**958,533,350**	**100.00**	**1,067,839,400**	**100.00**	**4,370,994,614**	Inspektorat	
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah			**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	31.54	31.84	-	32.14	-	32.44	-	32.74	-	33.04	-	33.04	-	Inspektorat	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal**	**80**	**82**	**13,533,520,000**	**84**	**13,871,010,656**	**86**	**15,941,536,194**	**88**	**17,619,516,261**	**90**	**19,629,068,277**	**90**	**80,594,651,388**	Inspektorat	
			Perencanaan, Penganggaran dan	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**78.01**	**78.21**	-	**78.41**	-	**78.61**	-	**78.81**	-	**79.01**	-	**79.01**	-	**Inspektorat**	

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**80**	**82**	**9,860,344,000**	**84**	**9,121,489,055**	**86**	**10,643,292,000**	**88**	**12,268,417,761**	**90**	**14,000,000,000**	**90**	**55,893,542,816**	Inspektorat	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**80**	**82**	**1,400,000,000**	**84**	**1,299,760,000**	**86**	**1,517,654,600**	**88**	**1,844,766,000**	**90**	**1,078,142,200**	**90**	**7,140,322,800**	**Inspektorat**	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**80**	**82**	**607,512,140**	**84**	**941,646,801**	**86**	**1,078,483,522**	**88**	**1,310,859,000**	**90**	**1,028,816,610**	**90**	**4,967,318,073**	**Inspektorat**	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**80**	**0**	**-**	**67.5**	**961,231,600**	**5**	**895,900,000**	**10**	**-**	**7.5**	**2,179,142,867**	**90**	**4,036,274,467**	**Inspektorat**	
			Jasa Penunjang Urusan	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang**	**80**	**82**	**815,613,260**	**84**	**800,365,200**	**86**	**934,540,167**	**88**	**1,135,876,500**	**90**	**723,812,000**	**90**	**4,410,207,127**	**Inspektorat**	

			Pemerintahan Daerah	**Urusan Pemerintahan Daerah**														
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80**	**82**	**850,050,600**	**84**	**746,518,000**	**86**	**871,665,905**	**88**	**1,059,597,000**	**90**	**619,154,600**	**90**	**4,146,986,105**	Inspektorat	

BAB VII

KINERJA URUSAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Inspektorat Kota Balikpapan berkomitmen penuh untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah terpilih sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dukungan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah yang berimplikasi pada keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun (2021-2026)

No	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TH.1	TH.2	TH.3	TH.4	TH.5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
2.	Nilai SAKIP	68.99	75.50	75.52	75.54	75.56	75.58	75.58
3.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
4.	Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi	6.77	7.42	7.42	7.42	7.43	7.43	7.43
5.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31.54	31.84	32.14	32.44	32.74	33.04	33.04

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2021.

LAMPIRAN 2

MATRIKS RENSTRA INSPEKTORAT

TAHUN 2025-2029

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT											
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,292	3,317	3,342	3,367	3,392	3,417	3,442	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3	3,025	3,05	3,075	3,1	3,125	3,15	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,82	81,92	81,97	82,02	82,07	82,12	82,17	

Inspektur Kota Balikpapan,

PEMERINTAH KOTA INSPEKTORAT BALIKPAPAN

Silvia Rahmadina, AP.

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					26.131.989.000		31.358.387.000		32.926.306.000		33.584.832.000		34.592.377.000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.527.201.845		26.263.387.000		27.171.306.000		27.254.832.000		28.237.377.000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	81,44	88	88,25	22.527.201.845	88,5	26.263.387.000	88,75	27.171.306.000	89	27.254.832.000	89,25	28.237.377.000	Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.521.682.155		2.495.000.000		2.885.000.000		3.190.000.000		3.195.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (%)	91,9	92,5	92,8	1.521.682.155	93,1	2.495.000.000	93,4	2.885.000.000	93,7	3.190.000.000	94	3.195.000.000	Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2.083.105.000		2.600.000.000		2.870.000.000		3.140.000.000		3.160.000.000	
Meningkatnya kualitas konsultansi dan pencegahan korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (Nilai)	3,7	3,71	3,73	2.083.105.000	3,75	2.600.000.000	3,77	2.870.000.000	3,8	3.140.000.000	3,82	3.160.000.000	Inspektorat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (Nilai)	3,67	3,68	3,69		3,72		3,74		3,77		3,79		Inspektorat
TOTAL KESELURUHAN					**26.131.989.000**		**31.358.387.000**		**32.926.306.000**		**33.584.832.000**		**34.592.377.000**	

Inspektur Kota Balikpapan,

Silvia Rahmadina, AP.

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				26.131.989.000		31.358.387.000		32.926.306.000		33.584.832.000		34.592.377.000		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.527.201.845		26.263.387.000		27.171.306.000		27.254.832.000		28.237.377.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	81,44	88,25	22.527.201.845	88,5	26.263.387.000	88,75	27.171.306.000	89	27.254.832.000	89,25	28.237.377.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.200.000		60.000.000		69.000.000		70.000.000		83.490.000		
Tersedianya indikator kinerja yang relevan, terukur dan selaras dari tingkat individu hingga organisasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	22.200.000	2	60.000.000	2	69.000.000	2	70.000.000	2	83.490.000		
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22.200.000		60.000.000		69.000.000		70.000.000		83.490.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	22.200.000	2	60.000.000	2	69.000.000	2	70.000.000	2	83.490.000		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.969.041.000		17.000.000.000		18.000.000.000		19.000.000.000		20.000.000.000		
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	56	15.969.041.000	58	17.000.000.000	60	18.000.000.000	62	19.000.000.000	64	20.000.000.000		
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.969.041.000		17.000.000.000		18.000.000.000		19.000.000.000		20.000.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	56	15.969.041.000	58	17.000.000.000	60	18.000.000.000	62	19.000.000.000	64	20.000.000.000		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.005.034.400		2.736.387.000		3.120.000.000		2.064.832.000		2.014.887.000		
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	41	56	2.005.034.400	58	2.736.387.000	60	3.120.000.000	62	2.064.832.000	64	2.014.887.000		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	40	50		52		53		54		55			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	2		2		2		2		2			
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				160.334.400		200.000.000		220.000.000		240.000.000		260.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	2	160.334.400	2	200.000.000	2	220.000.000	2	240.000.000	2	260.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				700.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		700.000.000		750.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	40	50	700.000.000	52	1.000.000.000	53	1.200.000.000	54	700.000.000	55	750.000.000		
6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.144.700.000		1.536.387.000		1.700.000.000		1.124.832.000		1.004.887.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	41	56	1.144.700.000	58	1.536.387.000	60	1.700.000.000	62	1.124.832.000	64	1.004.887.000		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.803.883.520		2.015.000.000		2.089.306.000		2.311.000.000		2.309.000.000		
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	3	1.803.883.520	4	2.015.000.000	4	2.089.306.000	8	2.311.000.000	10	2.309.000.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65	60		60		60		60		60			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		0		0		1		0			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	11	240		240		240		240		240			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				22.000.000		30.000.000		33.000.000		36.000.000		39.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	22.000.000	2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.000.000	2	39.000.000		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.284.155		525.000.000		471.306.000		575.000.000		600.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	3	500.284.155	4	525.000.000	4	471.306.000	8	575.000.000	10	600.000.000		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				404.998.915		450.000.000		500.000.000		500.000.000		550.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	404.998.915	7	450.000.000	7	500.000.000	7	500.000.000	7	550.000.000		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				136.600.450		200.000.000		220.000.000		240.000.000		250.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	136.600.450	1	200.000.000	1	220.000.000	1	240.000.000	1	250.000.000		
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				50.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	11	240	50.000.000	240	60.000.000	240	65.000.000	240	70.000.000	240	70.000.000		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		750.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65	60	600.000.000	60	750.000.000	60	800.000.000	60	800.000.000	60	800.000.000		
6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				90.000.000		0		0		90.000.000		0		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	90.000.000	0	0	0	0	1	90.000.000	0	0		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				620.698.425		2.100.000.000		1.445.000.000		1.265.000.000		1.285.000.000		
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2	620.698.425	4	2.100.000.000	4	1.445.000.000	4	1.265.000.000	4	1.285.000.000		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	32	16		20		20		20		20			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		0		0			
6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				343.200.000		400.000.000		420.000.000		440.000.000		460.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	3	343.200.000	3	400.000.000	3	420.000.000	3	440.000.000	3	460.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				187.200.000		400.000.000		425.000.000		450.000.000		450.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2	187.200.000	4	400.000.000	4	425.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				90.298.425		300.000.000		350.000.000		375.000.000		375.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	32	16	90.298.425	20	300.000.000	20	350.000.000	20	375.000.000	20	375.000.000		
6.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		800.000.000		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	800.000.000	0	0	0	0	0	0		
6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		200.000.000		250.000.000		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	200.000.000	1	250.000.000	0	0	0	0		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				956.000.000		1.107.000.000		1.158.000.000		1.209.000.000		1.210.000.000		
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	956.000.000	12	1.107.000.000	12	1.158.000.000	12	1.209.000.000	12	1.210.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	6.000.000	4	7.000.000	4	8.000.000	4	9.000.000	4	10.000.000		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		350.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	250.000.000	12	300.000.000	12	325.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				700.000.000		800.000.000		825.000.000		850.000.000		850.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	700.000.000	12	800.000.000	12	825.000.000	12	850.000.000	12	850.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.150.344.500		1.245.000.000		1.290.000.000		1.335.000.000		1.335.000.000		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33	26	1.150.344.500	26	1.245.000.000	26	1.290.000.000	26	1.335.000.000	26	1.335.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	50		50		50		50		50			
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				750.000.000		825.000.000		850.000.000		875.000.000		875.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33	26	750.000.000	26	825.000.000	26	850.000.000	26	875.000.000	26	875.000.000		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		220.000.000		240.000.000		260.000.000		260.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	50	200.000.000	50	220.000.000	50	240.000.000	50	260.000.000	50	260.000.000		
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.344.500		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	200.344.500	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.521.682.155		2.495.000.000		2.885.000.000		3.190.000.000		3.195.000.000		
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (%)	91,9	92,8	1.521.682.155	93,1	2.495.000.000	93,4	2.885.000.000	93,7	3.190.000.000	94	3.195.000.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1.044.082.155		1.820.000.000		2.100.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		
Terlaksananya pengawasan internal sesuai PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4	4	1.044.082.155	4	1.820.000.000	4	2.100.000.000	4	2.300.000.000	4	2.300.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	62	55		55		55		55		55			
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				750.582.155		1.020.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	62	55	750.582.155	55	1.020.000.000	55	1.200.000.000	55	1.300.000.000	55	1.300.000.000		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				293.500.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4	4	293.500.000	4	800.000.000	4	900.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				477.600.000		675.000.000		785.000.000		890.000.000		895.000.000		
Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	3	4	477.600.000	4	675.000.000	4	785.000.000	4	890.000.000	4	895.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	13	15		15		15		15		15			
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				26.100.000		75.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	3	4	26.100.000	4	75.000.000	4	85.000.000	4	90.000.000	4	95.000.000		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				451.500.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	13	15	451.500.000	15	600.000.000	15	700.000.000	15	800.000.000	15	800.000.000		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				2.083.105.000		2.600.000.000		2.870.000.000		3.140.000.000		3.160.000.000		
Meningkatnya kualitas konsultansi dan pencegahan korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (Nilai)	3,7	3,73	2.083.105.000	3,75	2.600.000.000	3,77	2.870.000.000	3,8	3.140.000.000	3,82	3.160.000.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT	
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (Nilai)	3,67	3,69		3,72		3,74		3,77		3,79			
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				228.880.000		300.000.000		320.000.000		340.000.000		360.000.000		
Tersedianya dokumen kebijakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	2	228.880.000	2	300.000.000	2	320.000.000	2	340.000.000	2	360.000.000		
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				228.880.000		300.000.000		320.000.000		340.000.000		360.000.000		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	2	228.880.000	2	300.000.000	2	320.000.000	2	340.000.000	2	360.000.000		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.854.225.000		2.300.000.000		2.550.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pendampingan dan asistensi terkait SPIP, pencegahan korupsi dan peningkatan integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	36	36	1.854.225.000	36	2.300.000.000	36	2.550.000.000	36	2.800.000.000	36	2.800.000.000		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	3	4		4		4		4		4			
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				672.625.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	36	36	672.625.000	36	1.000.000.000	36	1.100.000.000	36	1.200.000.000	36	1.200.000.000		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				819.200.000		900.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	3	4	819.200.000	4	900.000.000	4	1.000.000.000	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				362.400.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	36	36	362.400.000	36	400.000.000	36	450.000.000	36	500.000.000	36	500.000.000		

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
INSPEKTORAT

Inspektur Kota Balikpapan,

Silvia Rahmadina, AP.

LAMPIRAN 3

RENCANA KINERJA (RENJA)

TAHUN 2025

2025

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA (RENJA)



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja Inspektorat tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, namun demikian hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Balikpapan, Juli 2024

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

PEMERINTAH KOTA INSPEKTORAT BALIKPAPAN

SILVIA RAHMADINA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 .. 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 25
2.5. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33
3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 33
3.3. Program dan Kegiatan 35

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38

BAB V. PENUTUP 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Balikpapan 13
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
Tabel 2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 27
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Balikpapan 32
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 34
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2025 38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Inspektorat Kota Balikpapan melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Inspektorat Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 Inspektorat Kota Balikpapan.

Penyusunan Rankhir Renja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Peambangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi rencana program dan

kegiatan Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 sehingga terwujud sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah

D. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini memuat Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Periode 2021-2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampiran Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Lampiran tabel Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

   b. Pencapaian SDGs,

   c. Pengentasan kemiskinan,

   d. Pencapaian NSPK dan SPM,

   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

   f. Pengembangan daerah terisolir,

   g. Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

   a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

   b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

   c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rencana kerja dan pagu pendanaan indikatif serta perkiraan pada tahun selanjutnya.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

   Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Periode 2021-2026

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2024, serta progress pencapaian kinerja dalam Renstra Periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi capaian Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 capaian realisasi program/kegiatan untuk fisik sebesar 98.74% dan keuangan sebesar 88.52% . Sedangkan untuk capaian realisasi fisik dan keuangan pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2024 diperkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Bappeda Litbang untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2023, dapat dilihat capaian dari alokasi dana yang telah dianggarkan untuk 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan antara lain adalah :

1) Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator progam: Peningkatan Kualitas Layanan Internal

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85 dari target yang ditetapkan sebesar 84, terealisasi sebesar 101,19%

Pada Program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Indikator program: IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85 dari target yang ditetapkan sebesar 84, terealisasi sebesar 101,19%

Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator program: IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85 dari target yang ditetapkan sebesar 84, terealisasi sebesar 101,19%

Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator program: IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85 dari target yang ditetapkan sebesar 84, terealisasi sebesar 101,19%

Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator program: IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85 dari target yang ditetapkan sebesar 84, terealisasi sebesar 101,19%

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator program: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 80,82 dari target yang ditetapkan sebesar 80, terealisasi sebesar 101,02%

Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

b. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator program: IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85 dari target yang ditetapkan sebesar 84, terealisasi sebesar 101,19%

Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator program: Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 86,50% dari target yang ditetapkan sebesar 85,33%, terealisasi sebesar 101,37%.

Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengawasan Internal

Indikator program: Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85 dari target yang ditetapkan sebesar 85,5, terealisasi sebesar 99,41%

Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

a. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
b. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2. Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

Indikator program: Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 80 dari target yang ditetapkan sebesar 80,5, terealisasi sebesar 99,37%

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
b. Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah

3) Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator program: Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 63,33 dari target yang ditetapkan sebesar 63,33, terealisasi sebesar 100%

Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Indikator program: Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan

Evaluasi hasil: : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 86.67 dari target yang ditetapkan sebesar 86.67, terealisasi sebesar 100%

Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Indikator program: Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan

Evaluasi hasil: : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 40 dari target yang ditetapkan sebesar 40, terealisasi sebesar 100%

Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

b. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
d. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
e. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penegakan Integritas

Dari target sasaran kinerja untuk program kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2023 yaitu

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Inspektorat Kota Balikpapan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal	Nilai	84	16,729,311,610	0	2,835,776,123	0	4,310,030,611	0	3,173,778,752	85	5,133,192,751.00	85	15,452,778,237	101.19	92.37	170	27,884,131,228	188.33	34.60	Inspektorat
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84	-	0	-	0	-	76.89	-	0	-	76.89	-	91.54	0.00	91	0	115	0.00	Inspektorat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	100.00	0.00	1	0	0.00	0.00	Inspektorat

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	-	2	-	0	-	0	-	0	-	2	-	100.00	0.00	2	0	0.00	0.00	Inspektorat
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	-	2	-	0	-	0	-	0	-	2	-	100.00	0.00	2	0	0.00	0.00	Inspektorat
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	84	9,389,246,700	0	2,018,148,951	0	3,001,797,627	0	2,084,146,007	85	2,131,601,516.00	85	9,235,694,101	101.19	98.36	99	18,004,004,893	110.09	32.21	Inspektorat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	48	9,389,246,700	45	2,018,148,951	0	3,001,797,627	0	2,084,146,007	3	2,131,601,516.00	48	9,235,694,101.00	100.00	98.36	48	9,235,694,101	0.00	0.00	Inspektorat
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	84	2,989,769,200	0	457,532,859	0	461,135,360	0	47,870,741	85	1,346,311,517.00	85	2,312,850,477	101.19	77.36	99	3,689,876,635	110.09	51.68	Inspektorat

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	29	607,855,200	21	279,824,855	4	-	4	7,800,000	0	181,718,682.00	29	469,343,537.00	100.00	77.21	29	469,343,537	0.00	0.00	Inspektorat
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah orang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Orang	48	2,381,914,000	17	177,708,004	24	461,135,360	7	40,070,741	0	1,164,592,835.00	48	1,843,506,940.00	100.00	77.40	48	1,843,506,940	0.00	0.00	Inspektorat
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	84	2,124,157,700	0	92,058,669	0	349,986,964	0	582,547,287	85	854,537,904.00	85	1,879,130,824	101.19	88.46	99	2,629,070,943	110.09	52.93	Inspektorat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	18,106,400	0	-	1	-	0	8,105,000	1	8,470,000.00	2	16,575,000.00	100.00	91.54	2	16,575,000	0.00	0.00	Inspektorat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	960,891,000	0	-	3	214,992,500	3	82,565,000	0	620,773,550.00	6	918,331,050.00	100.00	95.57	6	918,331,050	0.00	0.00	Inspektorat

	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jenis paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	8	278,874,600	3	9,832,000	5	56,619,500	0	101,726,000	0	61,940,000.00	8	230,117,500.00	100.00	82.52	8	230,117,500	0.00	0.00	Inspektorat
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	146,285,700	0	-	2	47,696,400	0	57,235,600	0	15,436,000.00	2	120,368,000.00	100.00	82.28	2	120,368,000	0.00	0.00	Inspektorat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1688	20,000,000	0	-	0	-	0	-	48	20,000,000.00	48	20,000,000.00	2.84	100.00	48	20,000,000	0.00	0.00	Inspektorat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	36	700,000,000	10	82,226,669	14	30,678,564	14	332,915,687	48	127,918,354.00	86	573,739,274.00	238.89	81.96	86	573,739,274	0.00	0.00	Inspektorat
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	84	159,046,600	0	-	0	-	0	97,700,000	85	55,550,000.00	85	153,250,000	101.19	96.36	85	153,250,000	94.44	3.80	Inspektorat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	23	159,046,600	0	-	0	-	11	97,700,000	12	55,550,000.00	23	153,250,000.00	100.00	96.36	23	153,250,000	0.00	0.00	Inspektorat

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84	805,647,400	0	137,522,287	0	186,001,439	0	183,710,699	85	256,569,394.00	85	763,803,819	101.19	94.81	99	1,474,168,983	110.09	33.43	Inspektorat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	6,980,000	1	1,610,500	1	62,000	1	3,547,000	1	1,315,000.00	4	6,534,500.00	100.00	93.62	4	6,534,500	0.00	0.00	Inspektorat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	203,806,500	3	45,077,767	3	41,245,909	3	43,912,669	3	48,844,654.00	12	179,080,999.00	100.00	87.87	12	179,080,999	0.00	0.00	Inspektorat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	594,860,900	3	90,834,020	3	144,693,530	3	136,251,030	3	206,409,740.00	12	578,188,320.00	100.00	97.20	12	578,188,320	0.00	0.00	Inspektorat
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84	1,261,444,010	0	130,513,357	0	311,109,221	0	177,804,018	85	488,622,420.00	85	1,108,049,016	101.19	87.84	99	1,933,759,774	110.09	46.63	Inspektorat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	31	716,531,010	10	130,513,357	16	112,109,221	5	157,564,018	0	188,623,870.00	31	588,810,466.00	100.00	82.18	31	588,810,466	0.00	0.00	Inspektorat

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	50	145,129,000	0	-	2	-	33	20,240,000	15	101,053,550.00	50	121,293,550.00	100.00	83.58	50	121,293,550	0.00	0.00	Inspektorat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	399,784,000	0	-	1	199,000,000	0	-	0	198,945,000.00	1	397,945,000.00	100.00	99.54	1	397,945,000	0.00	0.00	Inspektorat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persentase	85.33	1,730,023,400	11.54	85,250,859	73.46	232,854,544	0	404,229,700	1.50	393,972,316.00	86.50	1,116,307,419.00	101.37	64.53	172	1,595,621,673	188.04	38.39	Inspektorat
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	Persentase	85.5	1,209,823,400	7.08	78,321,439	10.92	167,738,170	49.46	388,682,200	17.54	288,336,568.00	85	923,078,377	99.42	76.30	123	1,367,942,027	138.54	256.50	Inspektorat
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	7	-	0	-	1	-	0	-	6	-	7	-	100.00	0.00	7	0	0.00	0.00	Inspektorat
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	62	575,000,000	6	78,321,439	0	160,997,670	14	18,694,800	40	208,560,610.00	60	466,574,519.00	96.77	81.14	60	466,574,519	0.00	0.00	Inspektorat
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	37	-	1	-	0	-	36	-	0	-	37	-	100.00	0.00	37	0	0.00	0.00	Inspektorat

	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	3	-	1	-	0	-	1	-	0	-	2	-	66.67	0.00	2	0	0.00	0.00	Inspektorat
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lLanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	4	634,823,400	0	-	2	6,740,500	0	369,987,400	2	79,775,958.00	4	456,503,858.00	100.00	71.91	4	456,503,858	0.00	0.00	Inspektorat
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase	80.5	520,200,000	16	6,929,420	34	65,116,374	27.77	15,547,500	2.23	105,635,748.00	80.00	193,229,042	99.38	37.15	128	227,679,646	152.84	6.28	Inspektorat
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Laporan	3	9,100,000	1	-	1	1,080,000	0	967,500	1	225,000.00	3	2,272,500.00	100.00	24.97	3	2,272,500	0.00	0.00	Inspektorat
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	22	511,100,000	3	6,929,420	0	64,036,374	14	14,580,000	3	105,410,748.00	20	190,956,542.00	90.91	37.36	20	190,956,542	0.00	0.00	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEGIATAN, PEMDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	Persentase	63.33	2,841,751,200	0.45	41,793,659	17.55	818,162,651	35	424,145,134	10.33	1,002,389,366.00	63.33	Rp2,286,490,810	100.00	80.46	148	2,752,306,168	150.85	58.42	Inspektorat

	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan	Persentase	86.67	83,820,000	0.00	1,290,000	0	-	50	9,573,500	36.67	-	86.67	10,863,500	100.00	12.96	129	65,948,820	133.62	19.38	Inspektorat
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	4	83,820,000	0	1,290,000	0	-	1	9,573,500	3	-	4	10,863,500	100.00	12.96	4	10,863,500	0.00	0.00	Inspektorat
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	Persentase	40	2,757,931,200	0.90	40,503,659	35.10	818,162,651	2.00	414,571,634	2.00	1,002,389,366.00	40	2,275,627,310	100.00	82.51	83	2,686,357,348	82.50	61.46	Inspektorat
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	36	1,582,603,000	0	30,370,000	36	743,322,710	0	360,029,980	0	173,886,000.00	36	1,307,608,690	100.00	82.62	36	1,307,608,690	0.00	0.00	Inspektorat
	Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	36	158,850,000	0	-	0	-	36	-	0	133,580,520.00	36	133,580,520	100.00	84.09	36	133,580,520	0.00	0.00	Inspektorat

	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	3	799,408,000	0	5,550,000	3	74,839,941	0	51,316,654	0	523,548,120.00	3	655,254,715	100.00	81.97	3	655,254,715	0.00	0.00	Inspektorat
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	36	217,070,200	1	4,583,659	0	-	15	3,225,000	20	171,374,726.00	36	179,183,385	100.00	82.55	36	179,183,385	0.00	0.00	Inspektorat
Rata-rata capaian kinerja (%)																99.91	78.32			119.65	46.38	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Balikpapan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Inspektorat merupakan unsur pembantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Balikpapan berfungsi sebagai :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023 telah dilakukan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan untuk mengetahui persepsi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

Hingga berakhirnya survey, responden yang mengisi kuesioner SPKP sebanyak 50 orang responden yang didominasi oleh perempuan sebanyak 34 orang, dan laki-laki sebanyak 16 orang.

Publikasi hasil SPKP Inspektorat Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan-RB No. 90 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menpan-RB No. 04 Tahun 2023 sebagai berikut:



Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Inspektorat Kota Balikpapan menghasilkan capaian sebesar 3,48 atau setelah dikonversi mencapai nilai 86,94 serta masuk pada kategori Sangat Baik. Survey yang dilaksanakan pada periode 23 Oktober hingga 6 November 2023 tersebut berhasil mengumpullkan persepsi 50 orang responden. Adapun berdasarkan latar belakang pendidikan responden, diketahui mayoritas responden memiliki latar belakang S1 sebanyak 33 orang atau sebesar 66%, D1-D3 sebanyak 7 orang atau sebesar 14%, lulusan SD, SMP, SMA sebanyak 6 orang atau sebesar 12%, dan berlatar belakang pendidikan S2- S3 sebanyak 4 orang atau sebesar 8%.

Berdasarkan pekerjaan responden, diketahui bahwa seluruh responden yang berjumlah 50 orang bekerja sebagai PNS. Hal ini karena memang lingkup pengguna layanan atau stakeholder Inspektorat adalah PNS. Salah satu layanan yang disediakan oleh Inspektorat Kota Balikpapan adalah Layanan Klinik APBD yang merupakan wadah konsultasi, fasilitasi dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota Balikpapan. Layanan ini telah disahkan sejak tahun 2015 berdasarkan Perwali Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Klinik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada laman Instagram milik Inspektorat, terdapat link yang terhubung pada formulir Klinik APBD dan panduan prosedur Layanan Klinik APBD.

Nilai keseluruhan SPKP pada Inspektorat Kota Balikpapan ialah 3,48 dan masuk pada mutu Sangat Baik. Berdasarkan perhitungan pada setiap unsur, ketahui terdapat 3 unsur dengan nilai terendah yaitu waktu penyelesaian pelayanan (U4), sarana dan prasarana pendukung pelayanan (U6), serta respons petugas/sistem pelayanan (U7). Untuk meningkatkan performa dan kualitas pelayanan pada Inspektorat Kota Balikpapan, maka diperlukan sejumlah rencana tindak lanjut khususnya pada 3 unsur terendah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan mengampu 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Inspektorat Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	
2			Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	
3			Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Dengan berkembangnya peran Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, maka terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain :

a. SDM yang dimiliki masih belum memadai, terutama dari segi kuantitas;
b. Banyaknya mandatori pengawasan yang harus dilakukan oleh APIP yang tidak sebanding dengan jumlah APIP sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.

Dalam upaya mencapai sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik guna mewujudkan Pemerintahan yang bersih bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga perlu ditentukan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Kota Balikpapan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Balikpapan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menentukan isu-isu strategis antara lain :

a. Dukungan *stakeholder* terkait peran Inspektorat Kota Balikpapan dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mengingat Tahun 2013 s.d 2023 Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan opini WTP dari BPK-RI, maka ini menjadi tantangan bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kota Balikpapan agar Pemerintah Kota Balikpapan tetap dapat mempertahankan opini WTP tersebut;
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selalu ditingkatkan, namun masih terdapat beebrapa temuan yang berulang dari hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK RI. Kondisi ini merupakan amanat atau tambahan bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang lebih efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance dan clean government*, tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah yang belum mampu diterapkan dengan baik.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Ranwal Renja Bappeda Litbang Tahun 2025 merupakan tahun kedua untuk RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Dalam perencanaan pembangunan kota Balikpapan terdapat beberapa permasalahan utama yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manuasia;
2. Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur;
4. Peningktaan kualitas lingkungan hidup;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel.

Adapun prioritas pembangunan kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Penguatan kinerj pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Ketahanan bencana dan kondusifitas daerah;
5. Pembangunan ekonomi inklusif;
6. Peningkatan kualitas infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan bertemakan mempertahankan kondusifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan lingkungan yang berkelanjutan, fokus pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi inklusif;
2. Pembangunan sumber daya manusia;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;
4. Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;
5. Kondusifitas daerah.

Program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2025 masuk pada prioritas RKPD Kota Balikpapan dengan penjelasan sebagaimana berikut :

Tabel 2.3

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Balikpapan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	89,33 %	1.510.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Balikpapan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	89,33 %	1.510.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Balikpapan	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	87,50 %	1.135.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Balikpapan	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	87,50 %	1.135.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan	Balikpapan	Persentase laporan hasil penyelenggar	82,50 %	375.000	Penyelenggaraan Pengawasan	Balikpapan	Persentase laporan hasil penyelenggar	82,50 %	375.000	

	dengan Tujuan Tertentu		aan pengawasan dengan tujuan tertentu			dengan Tujuan Tertentu		aan pengawasan dengan tujuan tertentu			
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	86,67 %	1.999.800	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	86,67 %	1.999.800	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Balikpapan	Persentase kinerja perumusan regulasi daerah di bidang pengawasan yang telah dilaksanakan	93,33 %	150.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Balikpapan	Persentase kinerja perumusan regulasi daerah di bidang pengawasan yang telah dilaksanakan	93,33 %	150.000	

	Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	80%	1.849.800	Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	80%	1.849.800	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	88%	17.655.150	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	88%	17.655.150	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88%	10.334.967,025	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88%	10.334.967,025	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	88%	1.789.079,375	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	88%	1.789.079,375	

			Daerah					Daerah			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88%	1.464.757,100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88%	1.464.757,100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88%	1.237.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88%	1.237.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88%	1.404.523,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88%	1.404.523,1	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik	88%	1.424.323,4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik	88%	1.424.323,4	

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Inspektorat Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Inspektorat Kota Balikpapan tidak melaksanakan kegiatan musrenbang.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Balikpapan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

N I H I L

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung dengan Misi ke 1 (satu), yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik” adalah sebagai berikut:

a. Reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien.
b. Membangun sistem pengawasan yang handal serta meningkatkan pengawasan fungsional internal pemerintah, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.
c. Optimalisasi penyusunan APBD yang efektif dan efisien serta optimalisasi penerimaan daerah.
d. Optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah.
e. Optimalisasi perencanaan pembangunan untuk acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3.2Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Tujuan adalah pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Perumusan tujuan harus spesifik, realistis, dapat menggambarkan fungsi layanan (sesuai tupoksi), serta mampu menjawab/memberikan solusi permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah.

Sebagai penjabaran misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, maka perumusan tujuan Perangkat Daerah disusun berdasarkan kriteria berikut :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi pembangunan
2. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah
3. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
4. Dirumuskan dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Tujuan Inspektorat Kota Balikpapan yang hendak dicapai pada lima tahun ke depan (2021 – 2026) merupakan penjabaran dari misi pembangunan ke satu, yaitu: “mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik”.

Adapun rumusan tujuan Inspektorat adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dapat dilaksanakan dalam jangka menengah (lima tahun).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan sasaran Perangkat Daerah antara lain : keterkaitan dengan tujuan, tugas fungsi Perangkat Daerah, kelompok sasaran dan profil penyelenggaraan layanan. Ditinjau dari cascading kinerja, maka penetapan sasaran kinerja berada pada level pimpinan Perangkat Daerah (eselon II) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikatornya disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Balikpapan

Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN DAN SASARAN
(1)	(2)	(3)	(5)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel		Indikator Tujuan : Maturitas SPIP	Level 4
		Indikator Tujuan : Nilai SAKIP	
	Meningkatnya pengendalian internal pemerintah	Indikator Sasaran : Maturitas SPIP	Level 4
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas instansi pemerintah	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	81

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2024.

3.3 Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Administrasi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun kegiatan/sub kegiatan pada program tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
   - 1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
     - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
     - 1.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
     - 1.1.3 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
     - 1.1.4 Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
     - 1.1.5 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
   - 1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
     - 1.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
     - 1.2.2 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Administrasi
   - 2.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
     - 2.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
   - 2.2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
     - 2.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
     - 2.2.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
     - 2.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
     - 2.2.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - 3.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - 3.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - 3.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - 3.2.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.2.2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

3.2.3. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

3.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan

3.3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3.3.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.4. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

3.6.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

3.6.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.6.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.7.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.7.2. Bangunan Lainnya

Kelompok Sasaran dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 yaitu :

- OPD di Lingkungan Pemkot Balikpapan Kota Balikpapan

Kelompok Sasaran dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 yaitu :

- PNS Inspektorat Kota Balikpapan
- Inspektorat Kota Balikpapan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Balikpapan pada perencanaan tahun 2025 merupakan tahun ketiga dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Inspektorat Kota Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
		INSPEKTORAT				**21,164,950,000.00**					**30,278,102,984.00**
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**21,164,950,000.00**					**30,278,102,984.00**
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**21,164,950,000.00**					**30,278,102,984.00**
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**86**	**86**	**17,655,150,000.00**				**86**	**25,221,102,984.00**
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-	86	10,334,967,025.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai	-	11,643,292,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		46 Orang/bulan	10,334,967,025.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		11,643,292,000.00
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-	86	1,789,079,375.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai	-	3,647,650,000.00
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	89,079,375.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		225,000,000.00
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		30 Orang	1,000,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		1,500,000,000.00
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		52 Orang	700,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		1,922,650,000.00
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	86	1,464,757,100.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai	-	1,229,774,084.00
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	21,371,400.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		21,371,400.00
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	450,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		236,016,984.00
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8 Paket	415,335,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		294,335,000.00
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	138,050,700.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		138,050,700.00
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		20 Dokumen	40,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		40,000,000.00
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	400,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		500,000,000.00
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	86	1,237,500,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai	-	6,037,500,000.00

	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	0.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		300,000,000.00
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	0.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		300,000,000.00
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	437,500,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		437,500,000.00
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	800,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		5,000,000,000.00
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	86	1,404,523,100.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai	-	1,104,523,100.00
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	7,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		7,000,000.00
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	192,950,500.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		192,950,500.00

	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1,204,572,600.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		904,572,600.00
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	86	1,424,323,400.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai	-	1,558,363,800.00
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		32 Unit	716,531,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		716,531,000.00
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	207,792,400.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		199,650,000.00
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	500,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		642,182,800.00
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan***	**89.33 %**	**89.33 %**	**1,510,000,000.00**				**89.33 %**	**2,305,000,000.00**
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat*	-	86.50 %	1,135,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah	-	1,675,000,000.00
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									

			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		53 Laporan	825,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		825,000,000.00
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		4 Dokumen	310,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		850,000,000.00
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu*	-	81.50 %	375,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah	-	630,000,000.00
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		3 Laporan	75,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		75,000,000.00
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		13 Laporan	300,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		555,000,000.00
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan***	**75 %**	**75 %**	**1,999,800,000.00**				**75 %**	**2,752,000,000.00**
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan*	-	90 %	150,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah	-	250,000,000.00
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									

			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		2 Rekomend asi	150,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		250,000,000.00
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan*	-	60 %	1,849,800,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah	-	2,502,000,000.00
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		36 perangkat daerah	675,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		1,000,000,000.00
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		36 perangkat daerah	87,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		87,000,000.00
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		3 Kegiatan	1,000,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		1,140,000,000.00
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		36 perangkat daerah	87,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		275,000,000.00
	J U M L A H					**21,164,950,000.00**					**30,278,102,984.00**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2021-2026. Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini dijelaskan langkah untuk mencapai target-target yang ingin dicapai, penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan bagi seluruh APIP di Inspektorat Kota Balikpapan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2025. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Keberhasilan kegiatan pengawasan dapat mendukung tercapainya Visi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu , “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan misi ke 1 (satu), yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik”.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah Kota Balikpapan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yangtelah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya.

Balikpapan, Juli 2024

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

PEMERINTAH KOTA INSPEKTORAT BALIKPAPAN

SILVIA RAHMADINA

LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA (RENJA)

PERUBAHAN TAHUN 2025

2025

PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)



INSPEKTORAT
KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, namun demikian hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Balikpapan, Agustus 2025

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

PEMERINTAH KOTA INSPEKTORAT BALIKPAPAN

SILVIA RAHMADINA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 .. 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 25
2.5. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33
3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 33
3.3. Program dan Kegiatan 35

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38

BAB V. PENUTUP 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Balikpapan 13
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
Tabel 2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 27
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Balikpapan 32
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 34
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2025 38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Inspektorat Kota Balikpapan melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Inspektorat Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 Inspektorat Kota Balikpapan.

Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Peambangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi rencana program dan

kegiatan Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 sehingga terwujud sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah

D. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini memuat Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan. Sistematika penyajian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Periode 2021-2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Perubahan RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat pada RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampiran Review terhadap RKPD Tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Lampiran tabel Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

   b. Pencapaian SDGs,

   c. Pengentasan kemiskinan,

   d. Pencapaian NSPK dan SPM,

   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

   f. Pengembangan daerah terisolir,

   g. Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

   a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

   b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

   c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

4. Tabel rencana program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rencana kerja dan pagu pendanaan indikatif serta perkiraan pada tahun selanjutnya.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

   Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Periode 2021-2026

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2025, serta progress pencapaian kinerja dalam Renstra Periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi capaian Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 capaian realisasi program/kegiatan untuk fisik sebesar 89,18% dan keuangan sebesar 85,43% . Sedangkan untuk capaian realisasi fisik dan keuangan pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2025 diperkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Inspektorat untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2024, dapat dilihat capaian dari alokasi dana yang telah dianggarkan untuk 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan antara lain adalah :

Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2024 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2024), adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

   Indikator progam: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah

   Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 81,44 dari target yang ditetapkan sebesar 86, terealisasi sebesar 94,70%

   1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Indikator progam: IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 81,44 dari target yang ditetapkan sebesar 86, terealisasi sebesar 94,70%

1.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator progam: IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 81,44 dari target yang ditetapkan sebesar 86, terealisasi sebesar 94,70%

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator progam: IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 81,44 dari target yang ditetapkan sebesar 86, terealisasi sebesar 94,70%

1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator progam: IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 81,44 dari target yang ditetapkan sebesar 86, terealisasi sebesar 94,70%

1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator progam: IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 81,44 dari target yang ditetapkan sebesar 86, terealisasi sebesar 94,70%

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator progam: IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 81,44 dari target yang ditetapkan sebesar 86, terealisasi sebesar 94,70%

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator progam: Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 91,90% dari target yang ditetapkan sebesar 87,33%, terealisasi sebesar 105,23%

2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Indikator progam: Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85,77% dari target yang ditetapkan sebesar 86,50%, terealisasi sebesar 99,16%

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Indikator progam: Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 81,50% dari target yang ditetapkan sebesar 81,50%, terealisasi sebesar 100%

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator progam: Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 75% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, terealisasi sebesar 100%

3.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidangan Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Indikator progam: Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 90% terealisasi sebesar 100%

3.2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Indikator progam: Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 60% dari target yang ditetapkan sebesar 60% terealisasi sebesar 100%

Dari target sasaran kinerja untuk program kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2024 yaitu

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Inspektorat Kota Balikpapan

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
1	**Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah**	**Maturitas SPIP**	**Level**	**4**		**3**		**3**		**0**		**0**		**0**		**3**		**3**		**100**		**3**		**0**		**Inspektorat**	**Berdasarkan berita acara pembahasan hasil evaluasi atas penilaian mandiri SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kota Balikpapan**
1.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan**	**%**	**91.33**	**4,191,228,670**	**86.50**	**1,595,621,673**	**87.33**	**2,007,900,000**	**20**	**58,819,824**	**65**	**418,102,000**	**70**	**380,802,018**	**91.9**	**618,910,820**	**91.9**	**1,476,634,662**	**105.23**	**73.54**	**91.9**	**3,072,256,335**	**100.62**	**73.3**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI dan APIP**
1.1.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat**	**Persentase**	**88.5**	**2,407,041,000**	**85**	**1,367,942,027**	**86.5**	**1,435,000,000**	**22**	**57,169,824**	**56**	**418,102,000**	**62**	**250,560,236**	**85.77**	**375,791,588**	**85.77**	**1,101,623,648**	**99.16**	**76.77**	**85.77**	**2,469,565,675**	**96.92**	**102.6**	Inspektorat	**Masih terdapat beberapa LHP yang belum diselesaikan sesuai dengan PKPT Inspektorat**
1.1.1.1	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen					4	610,000,000	0	13,322,400	2	15,868,300	0	177,165,634	2	196,806,590	4	403,162,924	100	66.09					Inspektorat;	Tindak Lanjut BPK RI dan APIP
1.1.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan					53	825,000,000	47	43,847,424	2	402,233,700	7	73,394,602	6	178,984,998	62	698,460,724	116.98	84.66					Inspektorat;	Terdapat pemeriksaan yang diluar perencanaan / PKPT (mandatory dari Pemerintah Pusat)
1.1.2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu**	**Persentase**	**83.5**	**1,784,187,670**	**80**	**227,679,646**	**81.5**	**572,900,000**	**21**	**1,650,000**	**48**	**0**	**62**	**130,241,782**	**81.5**	**243,119,232**	**81.5**	**375,011,014**	**100**	**65.46**	**81.5**	**602,690,660**	**97.6**	**33.78**	Inspektorat	
1.1.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Laporan					3	17,900,000	0	1,650,000	3	0	0	0	0	5,295,000	3	6,945,000	100	38.8					Inspektorat;	
1.1.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan					13	555,000,000	4	0	2	0	2	130,241,782	5	237,824,232	13	368,066,014	100	66.32					Inspektorat;	
2	**Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**	**Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan**	**Nilai**	**0**		**0**		**81**		**0**		**80.82**		**80.82**		**80.82**		**80.82**		**99.77**		**80.82**		**0**		**Inspektorat**	**Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Kota Balikpapan**
2.1	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan**	**%**	**98.33**	**4,818,129,000**	**63.33**	**2,752,306,168**	**75**	**2,057,100,000**	**15**	**21,756,000**	**45**	**441,909,046**	**70**	**109,444,900**	**75**	**1,161,949,793**	**75**	**1,735,059,739**	**100**	**84.34**	**75**	**4,487,365,907**	**76.27**	**93.14**	Inspektorat	
2.1.1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan**	**Persentase**	**96.67**	**282,913,000**	**86.67**	**65,948,820**	**90**	**168,000,000**	**21**	**0**	**55**	**0**	**75**	**36,492,900**	**90**	**76,619,000**	**90**	**113,111,900**	**100**	**67.33**	**90**	**179,060,720**	**93.1**	**63.29**	Inspektorat	
2.1.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi					2	168,000,000	0	0	1	0	0	36,492,900	1	76,619,000	2	113,111,900	100	67.33					Inspektorat;	
2.1.2	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan**	**Persentase**	**320**	**4,535,216,000**	**45**	**2,686,357,348**	**60**	**1,889,100,000**	**25**	**21,756,000**	**9**	**441,909,046**	**24**	**72,952,000**	**2**	**1,085,330,793**	**60**	**1,621,947,839**	**100**	**85.86**	**105**	**4,308,305,187**	**32.81**	**95**	Inspektorat	
2.1.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	OPD					36	940,000,000	36	0	0	348,745,400	36	2,031,000	36	442,253,250	36	793,029,650	100	84.36					Inspektorat;	
2.1.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD					36	6,700,000	0	0	36	0	0	0	36	6,600,000	36	6,600,000	100	98.51					Inspektorat;	
2.1.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan					3	737,400,000	2	21,756,000	1	50,013,646	3	16,421,000	3	605,016,403	3	693,207,049	100	94.01					Inspektorat;	
2.1.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	OPD					36	205,000,000	0	0	16	43,150,000	0	54,500,000	36	31,461,140	36	129,111,140	100	62.98					Inspektorat;	

		Penegakan Integritas																										
3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**432**	**46,991,814,540**	**85**	**27,884,131,228**	**86**	**16,607,936,009**	**0**	**2,958,519,162**	**0**	**4,429,328,869**	**0**	**2,741,597,214**	**81.44**	**4,297,434,034**	**81.44**	**14,426,879,275**	**94.7**	**86.87**	**166.44**	**42,311,010,507**	**38.53**	**90.04**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil survey kepuasan internal atas layanan Sekretariat Inspektorat Kota Balikpapan**
3.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**432**	**32,809,687,430**	**85**	**18,004,004,893**	**86**	**10,916,142,009**	**0**	**2,112,078,155**	**0**	**3,656,555,215**	**0**	**2,095,237,506**	**81.44**	**2,216,401,312**	**81.44**	**10,080,272,188**	**94.7**	**92.34**	**166.44**	**28,084,277,081**	**38.53**	**85.6**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil survey kepuasan internal atas layanan Sekretariat Inspektorat Kota Balikpapan**
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang					45	10,916,142,009	47	2,112,078,155	0	3,656,555,215	46	2,095,237,506	46	2,216,401,312	46	10,080,272,188	102.22	92.34					Inspektorat;	Ada penambahan 1 orang P2UPD di bulan Oktober
3.1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**432**	**4,445,300,000**	**85**	**3,689,876,635**	**86**	**2,055,482,000**	**0**	**536,392,135**	**0**	**115,211,362**	**0**	**3,300,000**	**81.44**	**813,593,784**	**81.44**	**1,468,497,281**	**94.7**	**71.44**	**166.44**	**5,158,373,916**	**38.53**	**116.04**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil survey kepuasan internal atas layanan Sekretariat Inspektorat Kota Balikpapan**
3.1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang					40	700,000,000	40	46,113,966	0	4,320,000	0	0	40	353,223,046	40	403,657,012	100	57.67					Inspektorat;	Pegawai mengikuti Diklat melalui metode MOOC BPKP
3.1.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Orang					50	1,232,050,000	41	490,278,169	0	24,191,362	0	3,300,000	41	460,370,738	41	978,140,269	82	79.39					Inspektorat;	Beberapa pegawai tidak dapat mengikuti kegiatan Bimtek
3.1.2.3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket					3	123,432,000	0	0	2	86,700,000	0	0	1	0	3	86,700,000	100	70.24					Inspektorat;	
3.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**432**	**2,960,284,440**	**85**	**2,629,070,943**	**86**	**1,120,740,300**	**0**	**93,598,697**	**0**	**271,223,003**	**0**	**319,159,022**	**81.44**	**214,643,154**	**81.44**	**898,623,876**	**94.7**	**80.18**	**166.44**	**3,527,694,819**	**38.53**	**119.17**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil survey kepuasan internal atas layanan Sekretariat Inspektorat Kota Balikpapan**
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket					2	20,371,400	0	0	0	0	0	0	2	16,200,000	2	16,200,000	100	79.52					Inspektorat;	
3.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket					7	280,710,300	3	0	2	27,154,000	2	65,707,000	0	117,501,500	7	210,362,500	100	74.94					Inspektorat;	
3.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket					2	138,050,700	2	23,049,750	0	19,602,250	2	42,443,625	2	19,744,875	2	104,840,500	100	75.94					Inspektorat;	
3.1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Eksemplar					10	35,000,000	0	0	0	0	0	0	11	21,561,750	11	21,561,750	110	61.61					Inspektorat;	Pemberitaan dan bahan bacaan yang terealisasi
3.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					50	559,607,900	20	70,548,947	25	149,966,753	15	211,008,397	5	30,585,029	65	462,109,126	130	82.58					Inspektorat;	Perjalanan dinas sesuai dengan undangan
3.1.3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket					4	87,000,000	0	0	4	74,500,000	0	0	0	9,050,000	4	83,550,000	100	96.03					Inspektorat;	
3.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**432**	**1,048,390,300**	**85**	**153,250,000**	**86**	**436,150,800**	**0**	**0**	**0**	**54,000,000**	**0**	**0**	**81.44**	**242,833,998**	**81.44**	**296,833,998**	**94.7**	**68.06**	**166.44**	**450,083,995**	**38.53**	**42.93**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil survey kepuasan internal atas layanan Sekretariat Inspektorat Kota Balikpapan**
3.1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit					38	311,350,800	0	0	4	54,000,000	0	0	28	242,833,998	32	296,833,998	84.21	95.34					Inspektorat;	Beberapa peralatan tidak direalisasikan dan ada perubahan belanja pada tahapan APBD Perubahan
3.1.4.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit					2	124,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Inspektorat;	Tidak direalisasikan
3.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**432**	**2,724,427,960**	**85**	**1,474,168,983**	**86**	**927,114,300**	**0**	**103,478,202**	**0**	**189,645,151**	**0**	**219,406,167**	**81.44**	**330,393,932**	**81.44**	**842,923,452**	**94.7**	**90.92**	**166.44**	**2,317,092,435**	**38.53**	**85.05**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil survey kepuasan internal atas layanan Sekretariat Inspektorat Kota Balikpapan**
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan					4	6,000,000	1	0	1	2,034,500	1	0	1	3,000,000	4	5,034,500	100	83.91					Inspektorat;	
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan					12	210,616,500	3	47,824,602	3	40,735,891	3	43,783,227	3	49,965,032	12	182,308,752	100	86.56					Inspektorat;	
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan					12	710,497,800	3	55,653,600	3	146,874,760	3	175,622,940	3	277,428,900	12	655,580,200	100	92.27					Inspektorat;	
3.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**432**	**3,003,724,410**	**85**	**1,933,759,774**	**86**	**1,152,306,600**	**0**	**112,971,973**	**0**	**142,694,138**	**0**	**104,494,519**	**81.44**	**479,567,854**	**81.44**	**839,728,484**	**94.7**	**72.87**	**166.44**	**2,773,488,255**	**38.53**	**92.33**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil survey kepuasan internal atas layanan Sekretariat Inspektorat Kota Balikpapan**
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit					33	716,531,000	11	112,971,973	3	135,556,828	15	92,334,691	4	116,135,198	33	456,998,690	100	63.78					Inspektorat;	
3.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					40	199,650,000	2	0	3	7,137,310	10	12,159,828	35	134,288,366	50	153,585,504	100	76.93					Inspektorat;	

3.1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					1	236,125,600	0	0	0	0	1	0	0	229,144,290	1	229,144,290	100	97.04					Inspektorat;	
Rata-rata capaian Kinerja (%																				**97.32**	**76.13**			**46.02**	**54.89**		
Predikat Kinerja																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Rendah**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**97.24**	**75.15**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				**96.74**	**77.12**			**66.25**	**79.17**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sedang**	**Tinggi**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				**99.98**	**81.58**			**71.81**	**85.49**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sedang**	**Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	**Dukungan dan monitoring dari pimpinan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan**
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	**Pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa terlambat sehingga menyebabkan penumpukan di triwulan IV**
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Balikpapan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Inspektorat merupakan unsur pembantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

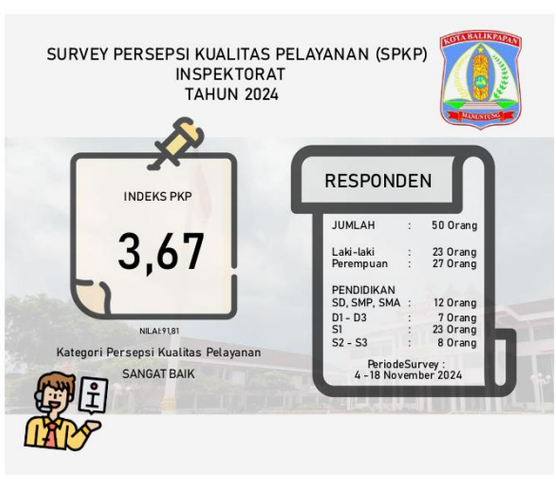
Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Balikpapan berfungsi sebagai :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2024 telah dilakukan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan untuk mengetahui persepsi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

Hingga berakhirnya survey, responden yang mengisi kuesioner SPKP sebanyak 50 orang responden yang didominasi oleh perempuan sebanyak 27 orang, dan laki-laki sebanyak 23 orang.

Publikasi hasil SPKP Inspektorat Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan-RB No. 90 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menpan-RB No. 04 Tahun 2023 sebagai berikut:



Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Inspektorat Kota Balikpapan menghasilkan capaian sebesar 3,67 atau setelah dikonversi mencapai nilai 91,81 serta masuk pada kategori Sangat Baik. Survey yang dilaksanakan pada periode tanggal 4 hingga 18 November 2024 tersebut berhasil mengumpullkan persepsi 50 orang responden. Adapun berdasarkan latar belakang pendidikan responden, diketahui mayoritas responden memiliki latar belakang S1 sebanyak 23 orang atau sebesar 46%, D1-D3 sebanyak 7 orang atau sebesar 14%, lulusan SD, SMP, SMA sebanyak 12 orang atau sebesar 24%, dan berlatar belakang pendidikan S2-S3 sebanyak 8 orang atau sebesar 16%.

Berdasarkan pekerjaan responden, diketahui bahwa seluruh responden yang berjumlah 50 orang bekerja sebagai PNS. Hal ini karena memang lingkup pengguna layanan atau stakeholder Inspektorat adalah PNS. Salah satu layanan yang disediakan oleh Inspektorat Kota Balikpapan adalah Layanan Klinik APBD yang merupakan wadah konsultasi, fasilitasi dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota Balikpapan. Layanan ini telah disahkan sejak tahun 2015 berdasarkan Perwali Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Klinik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada laman Instagram milik Inspektorat, terdapat link yang terhubung pada formulir Klinik APBD dan panduan prosedur Layanan Klinik APBD.

Nilai keseluruhan SPKP pada Inspektorat Kota Balikpapan ialah 3,67 dan masuk pada mutu Sangat Baik. Berdasarkan perhitungan pada setiap unsur, ketahui terdapat 2 unsur dengan nilai terendah yaitu waktu penyelesaian pelayanan (U4), sarana dan prasarana pendukung pelayanan (U6). Untuk meningkatkan performa dan kualitas pelayanan pada Inspektorat Kota Balikpapan, maka diperlukan sejumlah rencana tindak lanjut khususnya pada 2 unsur terendah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan mengampu 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Inspektorat Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2			Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Dengan berkembangnya peran Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, maka terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain :

a. SDM yang dimiliki masih belum memadai, terutama dari segi kuantitas;
b. Banyaknya mandatori pengawasan yang harus dilakukan oleh APIP yang tidak sebanding dengan jumlah APIP sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.

Dalam upaya mencapai sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik guna mewujudkan Pemerintahan yang bersih bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga perlu ditentukan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Kota Balikpapan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Balikpapan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menentukan isu-isu strategis antara lain :

a. Dukungan *stakeholder* terkait peran Inspektorat Kota Balikpapan dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mengingat Tahun 2013 s.d 2024 Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan opini WTP dari BPK-RI, maka ini menjadi tantangan bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kota Balikpapan agar Pemerintah Kota Balikpapan tetap dapat mempertahankan opini WTP tersebut;
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selalu ditingkatkan, namun masih terdapat beebrapa temuan yang berulang dari hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK RI. Kondisi ini merupakan amanat atau tambahan bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang lebih efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance dan clean government*, tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah yang belum mampu diterapkan dengan baik.

2.4 Reviu Terhadap RKPD

Telaahan terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Inspektorat Kota Balikpapan. Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2025 merupakan tahun keempat untuk RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Dalam perencanaan pembangunan kota Balikpapan terdapat beberapa permasalahan utama yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manuasia;
2. Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur;
4. Peningktaan kualitas lingkungan hidup;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel.

Adapun prioritas pembangunan kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Penguatan kinerj pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Ketahanan bencana dan kondusifitas daerah;
5. Pembangunan ekonomi inklusif;
6. Peningkatan kualitas infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan bertemakan mempertahankan kondusifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan lingkungan yang berkelanjutan, fokus pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi inklusif;
2. Pembangunan sumber daya manusia;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;
4. Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;
5. Kondusifitas daerah.

Program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2025 masuk pada prioritas RKPD Kota Balikpapan dengan penjelasan sebagaimana berikut :

Tabel 2.3

Reviu terhadap RKPD Tahun 2025

Kota Balikpapan

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Balikpapan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	89,33%	1.510.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Balikpapan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	89,33%	889.911,105	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Balikpapan	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	87,50%	1.135.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Balikpapan	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	87,50%	687.221,105	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Balikpapan	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	82,50%	375.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Balikpapan	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	82,50%	202.690	
	Program Perumusan Kebijakan,	Balikpapan	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana	86,67%	1.999.800	Program Perumusan Kebijakan,	Balikpapan	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana	86,67%	2.157.922,5	

	Pendampingan dan Asistensi		pengawasan			Pendampingan dan Asistensi		pengawasan			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Balikpapan	Persentase kinerja perumusan regulasi daerah di bidang pengawasan yang telah dilaksanakan	93,33%	150.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Balikpapan	Persentase kinerja perumusan regulasi daerah di bidang pengawasan yang telah dilaksanakan	93,33%	178.350	
	Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	80%	1.849.800	Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	80%	1.979.572,5	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	88%	17.655.150	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	88%	22.920.445,359	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88%	10.334.967,025	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88%	14.598.843	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88%	1.789.079,375	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88%	3.357.167,57	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88%	1.464.757,100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88%	1.229.526,315	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88%	1.237.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88%	1.244.631,486	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88%	1.404.523,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88%	1.017.727,088	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	88%	1.424.323,4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	88%	1.472.549,9	

	Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah			Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Inspektorat Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Inspektorat Kota Balikpapan tidak melaksanakan kegiatan musrenbang.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Balikpapan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

N I H I L

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung dengan Misi ke 1 (satu), yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik” adalah sebagai berikut:

a. Reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien.
b. Membangun sistem pengawasan yang handal serta meningkatkan pengawasan fungsional internal pemerintah, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.
c. Optimalisasi penyusunan APBD yang efektif dan efisien serta optimalisasi penerimaan daerah.
d. Optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah.
e. Optimalisasi perencanaan pembangunan untuk acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3.2Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Tujuan adalah pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Perumusan tujuan harus spesifik, realistis, dapat menggambarkan fungsi layanan (sesuai tupoksi), serta mampu menjawab/memberikan solusi permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah.

Sebagai penjabaran misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, maka perumusan tujuan Perangkat Daerah disusun berdasarkan kriteria berikut :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi pembangunan
2. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah
3. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
4. Dirumuskan dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Tujuan Inspektorat Kota Balikpapan yang hendak dicapai pada lima tahun ke depan (2021 – 2026) merupakan penjabaran dari misi pembangunan ke satu, yaitu: “mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik”.

Adapun rumusan tujuan Inspektorat adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dapat dilaksanakan dalam jangka menengah (lima tahun).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan sasaran Perangkat Daerah antara lain : keterkaitan dengan tujuan, tugas fungsi Perangkat Daerah, kelompok sasaran dan profil penyelenggaraan layanan. Ditinjau dari cascading kinerja, maka penetapan sasaran kinerja berada pada level pimpinan Perangkat Daerah (eselon II) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikatornya disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Balikpapan

Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN DAN SASARAN
(1)	(2)	(3)	(5)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel		Indikator Tujuan : Maturitas SPIP	Level 3
		Indikator Tujuan : Nilai SAKIP	
	Meningkatnya pengendalian internal pemerintah	Indikator Sasaran : Maturitas SPIP	Level 3
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas instansi pemerintah	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	81,15

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2024.

3.3 Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Administrasi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun kegiatan/sub kegiatan pada program tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
   - 1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
     - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
     - 1.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
     - 1.1.3 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
     - 1.1.4 Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
     - 1.1.5 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
   - 1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
     - 1.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
     - 1.2.2 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Administrasi
   - 2.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
     - 2.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
   - 2.2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
     - 2.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
     - 2.2.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
     - 2.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
     - 2.2.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - 3.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - 3.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - 3.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - 3.2.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.2.2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

3.2.3. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

3.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan

3.3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3.3.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.4. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3.6.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.6.4. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kelompok Sasaran dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 yaitu :

- OPD di Lingkungan Pemkot Balikpapan Kota Balikpapan

Kelompok Sasaran dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 yaitu :

- PNS Inspektorat Kota Balikpapan
- Inspektorat Kota Balikpapan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Balikpapan pada perencanaan tahun 2025 merupakan tahun ketiga dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Inspektorat Kota Balikpapan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					INSPEKTORAT				21.164.950.000,00	25.338.973.897,00	24.268.278.964,00		30.278.102.984,00
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				21.164.950.000,00	25.338.973.897,00	24.268.278.964,00		30.278.102.984,00
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				21.164.950.000,00	25.338.973.897,00	24.268.278.964,00		30.278.102.984,00
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86	88	17.655.150.000,00	20.129.173.897,00	21.220.445.359,00		25.221.102.984,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86	88	10.334.967.025,00	12.808.990.922,00	12.808.990.922,00		11.643.292.000,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	56 Orang/bulan	10.334.967.025,00	12.808.990.922,00	12.898.843.000,00		11.643.292.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86	88	1.789.079.375,00	1.789.079.375,00	1.789.079.375,00		3.647.650.000,00
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	2 Paket	89.079.375,00	89.079.375,00	89.079.375,00		225.000.000,00
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	40 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00		1.500.000.000,00
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 Orang	50 Orang	700.000.000,00	700.000.000,00	2.168.088.195,00		1.922.650.000,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86	88	1.464.757.100,00	1.464.757.100,00	1.464.757.100,00		1.229.774.084,00
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	21.371.400,00	21.371.400,00	21.371.400,00		21.371.400,00
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	450.000.000,00	450.000.000,00	436.218.300,00		236.016.984,00
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	7 Paket	415.335.000,00	415.335.000,00	405.643.775,00		294.335.000,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	138.050.700,00	138.050.700,00	166.292.840,00		138.050.700,00
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00		40.000.000,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	20 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00		500.000.000,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86	88	1.237.500.000,00	1.237.500.000,00	1.237.500.000,00		6.037.500.000,00
6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	50.700.000,00		300.000.000,00
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	46.800.000,00		300.000.000,00
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	35 Unit	437.500.000,00	437.500.000,00	347.131.486,00		437.500.000,00
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00		5.000.000.000,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86	88	1.404.523.100,00	1.404.523.100,00	1.404.523.100,00		1.104.523.100,00
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	192.950.500,00	192.950.500,00	251.853.500,00		192.950.500,00
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.204.572.600,00	1.204.572.600,00	758.873.588,00		904.572.600,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86	88	1.424.323.400,00	1.424.323.400,00	1.424.323.400,00		1.558.363.800,00
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	27 Unit	716.531.000,00	716.531.000,00	742.629.000,00		716.531.000,00
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	207.792.400,00	207.792.400,00	191.233.900,00		199.650.000,00
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	538.687.000,00		642.182.800,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	89,33 %	89,33 %	1.510.000.000,00	1.410.000.000,00	889.911.105,00		2.305.000.000,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	86.50 %	87,50 %	1.135.000.000,00	1.035.000.000,00	1.035.000.000,00		1.675.000.000,00
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	53 Laporan	53 Laporan	825.000.000,00	825.000.000,00	528.491.105,00		825.000.000,00
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	310.000.000,00	210.000.000,00	158.730.000,00		850.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	81.50 %	82,50 %	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00		630.000.000,00
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah								
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00		75.000.000,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13 Laporan	13 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	202.690.000,00		555.000.000,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	75 %	86,67 %	1.999.800.000,00	3.799.800.000,00	2.157.922.500,00		2.752.000.000,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan	90 %	93,33 %	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		250.000.000,00
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	150.000.000,00	150.000.000,00	178.350.000,00		250.000.000,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	60 %	80 %	1.849.800.000,00	3.649.800.000,00	3.649.800.000,00		2.502.000.000,00
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 perangkat daerah	36 perangkat daerah	675.000.000,00	575.000.000,00	386.280.000,00		1.000.000.000,00
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 perangkat daerah	36 perangkat daerah	87.000.000,00	87.000.000,00	105.225.000,00		87.000.000,00
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	4 Kegiatan	1.000.000.000,00	2.900.000.000,00	1.484.762.500,00		1.140.000.000,00
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 perangkat daerah	36 perangkat daerah	87.800.000,00	87.800.000,00	3.305.000,00		275.000.000,00
								J U M L A H	**21.164.950.000,00**	**25.338.973.897,00**	**24.268.278.964,00**		**30.278.102.984,00**

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2021-2026. Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini dijelaskan langkah untuk mencapai target-target yang ingin dicapai, penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan bagi seluruh APIP di Inspektorat Kota Balikpapan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2025. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Keberhasilan kegiatan pengawasan dapat mendukung tercapainya Visi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu , “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan misi ke 1 (satu), yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik”.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah Kota Balikpapan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yangtelah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya.

Balikpapan, Agustus 2025

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

PEMERINTAH KOTA INSPEKTORAT BALIKPAPAN

SILVIA RAHMADINA

LAMPIRAN 5

RENCANA AKSI (RENAKSI)

TAHUN 2025

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT
KOTA BALIKPAPAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	-	-	81,15	-	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal	Nilai	-	-	-	88		20.129.173.897	Sekretaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	80	82	84	88		12.808.990.922	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	46	46	46	46	Penyediaan Gaji dan Tunjangan untuk 46 orang Pegawai Inspektorat	12.808.990.922	Kasubag Umum dan Perencana Ahli Muda	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	80	82	84	88		1.789.079.375	Kasubag Umum		√	√		√	√	√	√	√	√	√	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	-	2	-	-	Topi dan PDH	89.079.375	Kasubag Umum		√	√									
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	-	-	-	30	Diklat Terkait teknis pengawasan	1.000.000.000	Kasubag Umum		√			√	√	√	√	√	√	√	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah orang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Orang	50	-	50	-	Bimbingan Teknis terkait pengawasan	700.000.000	Kasubag Umum		√					√					
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	80	82	84	88		1.464.757.100	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
																TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	-	2	-	-	Pengadaan BBM Genset dan Pengadaan Alat Listrik	21.371.400	Kasubag Umum				√	√	√							
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	-	-	-	Pengadaan peralatan kantor pendukung kegiatan pengawasan	450.000.000	Kasubag Umum		√	√									
						Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	7	7	7	7	Pengadaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Peralatan Komputer, Peralatan Kantor, Makanan dan Minuman Rapat	415.335.000	Kasubag Umum		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	1	1	Pengadaan Alat Tulis Kantor (Barang Cetakan, Dekorasi dan Penggandaan serta Penjilidan)	138.050.700	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	5	5	5	5	Pengadaan Bahan Bacaan	40.000.000	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	5	10	15	10	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	400.000.000	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	80	82	84	88		1.237.500.000	Kasubag Umum					√	√	√					
						Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	32	-	-	-	Pengadaan kamera, printer, Televisi, Hardisk, Kabel HDMI, Scanner	437.500.000	Kasubag Umum					√	√	√					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
																TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	1	Pengadaan Gedung Arsip pengawasan	800.000.000	Kasubag Umum					√	√	√	√	√	√	√	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	80	82	84	88		1.404.523.100	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	1	1	Pengadaan Materai (benda pos) dan paket pengiriman	7.000.000	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	3	3	3	Belanja Jasa Komunikasi (Telepon/Internet) , Air dan Listrik	192.950.500	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	3	3	3	Pengadaan peralatan kebersihan kantor, Jasa tenaga administrasi, Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan	1.204.572.600	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	80	82	84	88		1.424.323.400	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	5	5	5	12	Pengadaan BBM Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4, Penggantian suku cadang kendaraan, Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan, Pemeliharaan Kendaraan (service)	716.531.000	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tertentu	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	30	5	10	Pemeliharaan Mesin Fotocopy, CCTV, Finger Print, Genset, Meubelair, AC, Sound system dan pendukung teleconference, Komputer dan Laptop serta Printer dan Scanner	207.792.400	Kasubag Umum		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	-	-	-	1	Pemeliharaan gedung kantor dan jaringan listrik	500.000.000	Kasubag Umum					√	√	√					
Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP				Level 4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persen	25%	50%	75%	89,33%		1.510.000.000	Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	Persen	25%	50%	75%	87,50%		1.135.000.000	Inspektur Pembantu II	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
																TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lLanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	-	2	-	2	- Melakukan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi objek temuan - Melakukan input data tindak lanjut pada sistem SIPTL/SIM HP - Melakukan pemutakhiran data dengan BPK RI	310.000.000	Inspektur Pembantu II					√	√					√	√
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	laporan	36	5	6	6	Pemeriksaan Kas dan Persediaan sesuai PKPT Berbasis Risiko	825.000.000	Inspektur Pembantu II	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan denan tujuan tertentu	Persen	25%	50%	75%	82,50%		375.000.000	Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	laporan	-	-	-	3	Rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi objek temuan	75.000.000	Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	laporan	1	1	1	10	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sewa Core Drill, Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, Join Audit	300.000.000	Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						PROGRAM PERUMUSAN KEGIATAN, PEMDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	Persen	25%	50%	75%	87%		1.999.800.000	Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
																TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kinerja perumusan regulasi daerah di bidang pengawasan yang telah dilaksanakan	Persen	25%	50%	75%	93,33%		150.000.000	Inspektur Pembantu III					√	√				√	√	
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Dokumen	-	1	-	1	Rapat perumusan/ penyusunan/ pembahasan kebijakan	150.000.000	Pengendali Teknis Irban III					√	√				√	√	
						Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	Persen	25%	50%	75%	80,00%		1.849.800.000	Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	36	36	36	36	Pendampingan SPIP, Bimtek/Rakor SPIP, Koordinasi terkait Maturitas SPIP	675.000.000	Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	36	36	36	36	Rapat koordinasi/sosialisasi/ evaluasi RB	87.000.000	Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	1	0	1	1	Rapat/ sosialisasi/ evaluasi pencegahan korupsi	1.000.000.000	Inspektur Pembantu IV	√	√	√				√	√	√	√	√	√
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat Daerah	-	-	-	36	Rapat koordinasi/ sosialisasi/ FGD/ pencanangan Saber Pungli dan Zona Integritas serta studi tiru ZI	87.800.000	Inspektur Pembantu IV										√	√	√

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL ANGGARAN														25,338,973,897	Inspektur											

Balikpapan, Januari 2025

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

PEMERINTAH KOTA INSPEKTORAT BALIKPAPAN

SILVIA RAHMADINA

LAMPIRAN 6

RENCANA AKSI (RENAKSI)

PERUBAHAN TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT
KOTA BALIKPAPAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
																TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	-	-	81,15	-	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal	Nilai	-	-	-	88		22.920.445.359	Sekretaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	80	82	84	88		14.598.843.000	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	46	56	56	56	Penyediaan Gaji dan Tunjangan untuk 56 orang Pegawai Inspektorat	14.598.843.000	Kasubag Umum dan Perencana Ahli Muda	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	80	82	84	88		3.357.167.570	Kasubag Umum		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	-	2	-	-	Topi dan PDH	89.079.375	Kasubag Umum		√	√	√	√							
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	-	-	-	40	Diklat Terkait teknis pengawasan	1.100.000.000	Kasubag Umum					√	√	√	√	√	√	√	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah orang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Orang	50	-	-	50	Bimbingan Teknis terkait pengawasan	2.168.088.195	Kasubag Umum		√								√		
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	80	82	84	88		1.229.526.315	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	-	-	-	2	Pengadaan BBM Genset dan Pengadaan Alat Listrik	21.371.400	Kasubag Umum											√	√	√
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	-	1	-	4	Pengadaan peralatan kantor pendukung kegiatan pengawasan	436.218.300	Kasubag Umum		√	√									√	√
						Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	7	7	7	7	Pengadaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Peralatan Komputer, Peralatan Kantor, Makanan dan Minuman Rapat	405.643.775	Kasubag Umum		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	1	1	Pengadaan Alat Tulis Kantor (Barang Cetakan, Dekorasi dan Penggandaan serta Penjilidan)	166.292.840	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	-	-	-	-	Pengadaan Bahan Bacaan	-	Kasubag Umum													
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	5	5	5	5	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	200.000.000	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	80	82	84	88		1.244.631.486	Kasubag Umum					√	√	√	√	√	√	√	√
						Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	35	Pengadaan kamera, printer, Televisi, Hardisk, Kabel HDMI, Scanner	347.131.486	Kasubag Umum					√	√	√						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
																TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	1	Kendaraan Dinas Jabatan Inspektur	50.700.000	Kasubag Umum										√	√	√
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	1	Kendaraan Dinas Operasional	46.800.000	Kasubag Umum										√	√	√
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	1	Pengadaan Gedung Arsip pengawasan	800.000.000	Kasubag Umum					√	√	√	√	√	√	√	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	80	82	84	88		1.017.727.088	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	1	1	Pengadaan Materai (benda pos) dan paket pengiriman	7.000.000	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	3	3	3	Belanja Jasa Komunikasi (Telepon/Internet), Air dan Listrik	251.853.500	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	3	3	3	Pengadaan peralatan kebersihan kantor, Jasa tenaga administrasi, Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan	758.873.588	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
																TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	80	82	84	88		1.472.549.900	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	5	5	5	12	Pengadaan BBM Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4, Penggantian suku cadang kendaraan, Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan, Pemeliharaan Kendaraan (service)	742.629.000	Kasubag Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tertentu	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	30	5	10	Pemeliharaan Mesin Fotocopy, CCTV, Finger Print, Genset, Meubelair, AC, Sound system dan pendukung teleconference, Komputer dan Laptop serta Printer dan Scanner	191.233.900	Kasubag Umum		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	-	-	-	1	Pemeliharaan gedung kantor dan jaringan listrik	538.687.000	Kasubag Umum									√	√	√	√
Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP				Level 3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persen	25%	50%	75%	89,33%		889.911.105	Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
																TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	Persen	25%	50%	75%	87,50%		687.221.105	Inspektur Pembantu II	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lLanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	-	2	-	2	- Melakukan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi objek temuan - Melakukan input data tindak lanjut pada sistem SIPTL/SIM HP - Melakukan pemutakhiran data dengan BPK RI	528.491.105	Inspektur Pembantu II					√	√					√	√
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	laporan	36	5	6	6	Pemeriksaan Kas dan Persediaan sesuai PKPT Berbasis Risiko	158.730.000	Inspektur Pembantu II	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan denan tujuan tertentu	Persen	25%	50%	75%	82,50%		202.690.000	Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	laporan	-	-	-	-	Rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi objek temuan	-	Inspektur Pembantu IV						√						√
						Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	laporan	1	1	1	10	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sewa Core Drill, Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, Join Audit	202.690.000	Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
																TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PROGRAM PERUMUSAN KEGIATAN, PEMDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	Persen	25%	50%	75%	87%		2.157.922.500	Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kinerja perumusan regulasi daerah di bidang pengawasan yang telah dilaksanakan	Persen	25%	50%	75%	93,33%		178.350.000	Inspektur Pembantu III					√	√					√	√	
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Dokumen	-	-	-	2	Rapat perumusan/ penyusunan/ pembahasan kebijakan	178.350.000	Pengendali Teknis Irban III					√	√					√	√	
						Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	Persen	25%	50%	75%	80,00%		1.979.572.500	Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	36	36	36	36	Pendampingan SPIP, Bimtek/Rakor SPIP, Koordinasi terkait Maturitas SPIP	386.280.000	Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	36	36	36	36	Rapat koordinasi/sosialisasi/ evaluasi RB	105.225.000	Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	1	1	1	1	Rapat/ sosialisasi/ evaluasi pencegahan korupsi	1.484.762.500	Inspektur Pembantu IV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
																TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat Daerah	-	-	-	36	Rapat koordinasi/ sosialisasi/ FGD/ pencanangan Saber Pungli dan Zona Integritas serta studi tiru ZI	3.305.000	Inspektur Pembantu IV										√	√	√
TOTAL ANGGARAN														25.968.278.964	Inspektur											

Balikpapan, September 2025

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

PEMERINTAH KOTA INSPEKTORAT BALIKPAPAN

SILVIA RAHMADINA

LAMPIRAN 7

SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
INSPEKTORAT
Jl. Ruhui Rahayu I Telp. / Fax. : (0542) 7218734 Kotak Pos 1111
Balikpapan 76115
Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 188.46/ 092 /ITKOT

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk mendukung Misi Kesatu Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik, maka Inspektorat Kota Balikpapan sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai salah satu tujuan dalam misi kesatu perlu menyusun tolak ukur yang jelas dan sistematis guna mengukur pencapaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

b. bahwa untuk penguatan terhadap Rencana Strategis Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021-2026 maka perlu penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan 2021-2026;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Inspektorat Kota Balikpapan yang tertuang dalam LHE Nomor : 700/093/TIM-II/ITKOT dengan salah satu rekomendasi yaitu perlu dilakukan reviu Renstra agar terjadi upaya perbaikan yang signifikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Perubahan Keputusan Inspektur Kota Balikpapan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 060.4/01799/Org tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Maturitas SPIP;
2. Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan Perubahan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam dokumen suplemen perbaikan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama.

KETIGA : Penjabaran Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Unit kerja di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 22 Desember 2023

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

PEMERINTAH KOTA INSPEKTORAT BALIKPAPAN

SILVIA RAHMADINA

<u>Salinan</u> Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Balikpapan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Lampiran : Keputusan Inspektur Kota Balikpapan
Nomor : 188.46/092/ITKOT
Tanggal : 22 Desember 2023

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Penghitungan berdasarkan pada Penilaian Mandiri Perangkat Daerah atas Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP dan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat dengan Komponen, Unsur dan Sub unsur penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut: 1. Penetapan Tujuan (40%) a. Kualitas sasaran strategis b. Kualitas strategi pencapaian sasaran strategis 2. Struktur dan Proses (30%) a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian risiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi dan komunikasi e. Pemantauan 3. Pencapaian Tujuan (30%) a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi b. Keandalan pelaporan keuangan c. Pengamanan atas aset d. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	Penghitungan berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan proses penilaian meliputi : a. Perencanaan kinerja b. Pengukuran kinerja c. Pelaporan kinerja d. Evaluasi Akuntabilitas Internal	Inspektorat Kota Balikpapan

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

SILVIA RAHMADINA

LAMPIRAN 8

SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
INSPEKTORAT
Jl. Ruhui Rahayu I Balikpapan, Kalimantan Timur 76115
Telepon (0542) 7218734 Email itkotbpp@gmail.com
Website inspektorat.balikpapan.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 188.46/001/Itkot

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Balikpapan, maka diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan setiap tahun perencanaannya;
b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang termuat dalam RENSTRA Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Balikpapan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Unit Kerja pada Inspektorat Kota Balikpapan dalam menyusun:
a. Rencana kerja dan anggaran;
b. Penetapan kinerja;
c. Pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja;
d. Evaluasi kinerja; dan
e. Pelaporan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 12 Januari 2026

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN INSPEKTORAT

SILVIA RAHMADINA, AP.

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Wali Kota Balikpapan (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Inspektur Kota Balikpapan;
4. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan.

Lampiran Keputusan Inspektur Kota Balikpapan
Nomor : 188.46/001/Itkot
Tanggal : 12 Januari 2026
Tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas hasil Penilaian Mandiri Perangkat Daerah dan Penjaminan Kualitas APIP dengan komponen penilaian yaitu : 1. Penetapan Tujuan (40%) 2. Struktur dan Proses (30%) 3. Pencapaian Tujuan (30%)
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	Kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.	Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada lima elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP yaitu : 1. Kualitas Peran dan Layanan (40%) 2. Profesionalisme Penugasan (20%) 3. Manajemen Pengawasan (20%) 4. Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya (10%) 5. Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN
3	Nilai AKIP Inspektorat	Nilai	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya	Penghitungan berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan proses penilaian meliputi : 1. Perencanaan kinerja (30%) 2. Pengukuran kinerja (30%) 3. Pelaporan kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Internal (25%)

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN

SILVIA RAHMADINA, AP.

LAMPIRAN 9

PERJANJIAN KINERJA (PK)

PERUBAHAN TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SILVIA RAHMADINA, AP., CGCAE., CGRE., QIA.**

Jabatan : **INSPEKTUR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.**

Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 23 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.	SILVIA RAHMADINA, AP., CGCAE., CGRE., QIA.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Level	3	3
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	Nilai	80,82	81,15

Program		Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	22.920.445.359,-	APBD-P
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	889.911.105,-	APBD-P
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.	2.157.922.500,-	APBD-P
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**25.968.278.964,-**	**APBD-P**

Balikpapan, 23 Oktober 2025

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

SILVIA RAHMADINA, AP., CGCAE., CGRE., QIA.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
ATAS RENSTRA TAHUN 2025-2029
INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	*Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*	*Nilai*	*3,292*	*3,317*
1.1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,000	3,025
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Inspektorat	Nilai	80,82	81,15

Balikpapan, 23 Oktober 2025

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

SILVIA RAHMADINA, AP., CGCAE., CGRE., QIA.

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman No.1 RT.13 Kelurahan Klandasan Ulu
Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos 76100
Surel : persuratan.setda @balikpapan.go.id

BERITA ACARA
Nomor : 000.8.6.3_ 87 /Org/IX/2025

RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT SAKIP TRIWULAN II

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di ruang rapat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut SAKIP Triwulan II, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Hasil Pembahasan:

1. Inspektorat sepakat untuk memanfaatkan data capaian yang termuat dalam LAKIP 2024 sebagai dasar (*baseline*) penetapan target kinerja 2025 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Adapun target kinerja tahun 2025 yang disesuaikan dengan capaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025
1.	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	80,82	81,15

2. Melengkapi dan mengunggah ulang dokumen kinerja terbaru/terupdate atau hasil perbaikan pada sistem e-SAKIP Reviu melalui alamat www.esr.menpan.go.id, serta menyiapkan data tersebut apabila sewaktu-waktu diminta oleh Tim Evaluator KemenPAN RB. Adapun dokumen kinerja yang dimaksud meliputi:

Jenis Dokumen	Tahun Dokumen	Keterangan
Rencana Strategis (Renstra)	2024 dan 2025	1. Dokumen 2024 adalah dokumen periode tahun 2021-2026 yang telah diformalkan;

Jenis Dokumen	Tahun Dokumen	Keterangan
		2. Dokumen 2025 adalah dokumen draf periode tahun 2025-2030.
Pohon Kinerja	2024 dan 2025	1. Dokumen 2024 adalah pohon kinerja periode tahun 2021-2026; 2. Dokumen 2025 adalah pohon kinerja periode tahun 2025-2030.
Cascading Kinerja	2025	Dokumen termutakhir/ terkini yang telah diformalkan
SK IKU	2025	Dokumen termutakhir/ terkini yang telah diformalkan
Perjanjian Kinerja	2024 dan 2025	Dokumen termutakhir/ terkini (PK Perubahan) yang telah diformalkan
Renja	2025	Dokumen termutakhir/ terkini yang telah diformalkan
Rencana Aksi (Renaksi)	2025	Dokumen yang telah diformalkan
RKA/ DPA	2025	Dokumen termutakhir/ terkini yang telah diformalkan
SKP Seluruh Pegawai	2025	Dokumen yang telah diformalkan
Laporan Kinerja (LAKIP)	2024	Dokumen yang telah diformalkan
LHE AKIP Internal dari Inspektorat	2025	Dokumen yang telah diformalkan

3. Perangkat daerah wajib melakukan input data kinerja secara berkala dan berkesinambungan melalui aplikasi https://reaksi.balikpapan.go.id/ sebagai bentuk pemantauan, evaluasi, serta pelaporan capaian kinerja;

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan tindaklanjut.

Yang Mengikuti Pembahasan :

1. Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Organisasi : Sayektiningsih :
2. Peserta : Auditor Madya : Herawati :
3. Peserta : Analis Kebijakan Muda : Dina Yuni Aditya :
4. Peserta : Perencana Ahli Muda : Dyna Evi Septiana :

5.	Peserta	:	Penelaah Teknis Kebijakan	:	Reinindya Ashaumei	:
6.	Peserta	:	Penelaah Teknis Kebijakan	:	Dwi Ayu Septianingrum	:
7.	Peserta	:	Pengolah Data	:	Dina M.	:

LAMPIRAN 10

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2025

(FORM E-81)

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Inspektorat
Tahun 2025 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Meningkatnya Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian**	**Kapabilitas APIP**	**Level**	**4**		**3**		**4**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**3**		**0**		**Inspektorat**	
1.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan**	**%**	**91.33**	**5,701,228,670**	**91.9**	**3,072,256,335**	**89.33**	**889,911,105**	**25**	**1,150,000**	**50**	**111,609,680**	**70**	**226,848,889**	**89.33**	**366,815,126**	**89.33**	**706,423,695**	**100**	**79.38**	**89.33**	**3,778,680,030**	**97.81**	**66.28**	Inspektorat	**Komponen perhitungan adalah rata-rata persentase penyelesaian TLRHP BPK dan TLRHP APIP Semester II yaitu (98,78 + 79,88) / 2 = 89,33**
1.1.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat**	**Persentase**	**88.5**	**3,542,041,000**	**85.77**	**2,469,565,675**	**87.5**	**687,221,105**	**25**	**1,150,000**	**50**	**65,033,820**	**70**	**216,358,689**	**100**	**315,892,126**	**100**	**598,434,635**	**114.29**	**87.08**	**100**	**3,068,000,310**	**112.99**	**86.62**	Inspektorat	**Komponen perhitungan adalah persentase jumlah LHP dibandingkan dengan rencana jumlah PKPT. Seluruh pengawasan terlaksana sesuai PKPT dan laporan diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan yaitu sebanyak 208 penugasan dan 208 LHP.**
1.1.1.1	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen					4	158,730,000	0	0	2	0	0	64,831,170	2	52,354,950	4	117,186,120	100	73.83					Inspektorat;	Dokumen hasil monev TLHP BPK dan APIP dilaksanakan pada Semester II
1.1.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan					53	528,491,105	36	1,150,000	24	65,033,820	9	151,527,519	10	263,537,176	79	481,248,515	149.06	91.06					Inspektorat;	Terdapat pemeriksaan mandatory diluar PKPT
1.1.2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu**	**Persentase**	**83.5**	**2,159,187,670**	**81.5**	**602,690,660**	**82.5**	**202,690,000**	**25**	**0**	**50**	**46,575,860**	**70**	**10,490,200**	**100**	**50,923,000**	**100**	**107,989,060**	**121.21**	**53.28**	**100**	**710,679,720**	**119.76**	**32.91**	Inspektorat	**Berdasarkan persentase terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu dibandingkan dengan rencana PDTT dan penyelesaian kerugian negara/daerah yaitu PDTT terlaksana 19 penugasan dan 3 penyelesaian kerugian.**
1.1.2.1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan					13	202,690,000	2	0	4	46,575,860	3	10,490,200	10	50,923,000	19	107,989,060	146.15	53.28					Inspektorat;	Penambahan pelaksanaan Probity Audit tahap Perencanaan untuk proyek strategis tahun 2026 yaitu pada DPU (2 paket), DKK (1 paket), Dishub (1 Paket), Disdik (1 Paket) serta penelaahan pengaduan masyarakat (1 penugasan)
2	**Meningkatnya Nilai SAKIP**	**Nilai SAKIP Kota pada Komponen Evaluasi**	**Nilai**	**0**		**80.82**		**7.43**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**80.82**		**0**		**Inspektorat**	
2.1	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan**	**%**	**98.33**	**6,817,929,000**	**75**	**4,487,365,907**	**86.67**	**2,157,922,500**	**25**	**33,583,960**	**50**	**294,008,800**	**67**	**42,739,000**	**86.67**	**1,646,242,054**	**86.67**	**2,016,573,814**	**100**	**93.45**	**86.67**	**6,503,939,721**	**88.14**	**95.39**	Inspektorat	**Kinerja Tata Laksana Pengawasan terlaksana dengan kegiatan pendampingan kepada Perangkat Daerah dan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan**
2.1.1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan**	**Persentase**	**96.67**	**432,913,000**	**90**	**179,060,720**	**93.33**	**178,350,000**	**25**	**0**	**50**	**0**	**80**	**4,682,000**	**100**	**151,974,600**	**100**	**156,656,600**	**107.15**	**87.84**	**100**	**335,717,320**	**103.44**	**77.55**	Inspektorat	**Komponen pembentuk adalah jumlah rencana pelaksanaan perumusan dibandingkan dengan realisasi. Dimana telah terlaksana perumusan Pedoman Standar Kerja Pengawasan Intern, Pedoman Jasa Konsultansi, Pedoman Manajemen Penugasan. Adapun faktor pendukung yaitu adanya perubahan/penambahan anggaran pada sub tersebut pada DPA Perubahan.**
2.1.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi					2	178,350,000	0	0	0	0	2	4,682,000	1	151,974,600	3	156,656,600	150	87.84					Inspektorat;	Penambahan Pedoman Manajemen Penugasan karena kebutuhan penilaian model baru Kapabilitas APIP dengan melakukan perubahan anggaran pada DPA Perubahan.
2.1.2	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan**	**Persentase**	**300**	**6,385,016,000**	**105**	**4,308,305,187**	**80**	**1,979,572,500**	**25**	**33,583,960**	**25**	**294,008,800**	**20**	**38,057,000**	**30**	**1,494,267,454**	**100**	**1,859,917,214**	**125**	**93.96**	**205**	**6,168,222,401**	**68.33**	**96.6**	Inspektorat	**Komponen pembentuk adalah persentase dari sub kegiatan pendampingan dibandingkan dengan realisasi dan telah terlaksana kinerja pendampingan dan asistensi bagi seluruh Perangkat Daerah. Adapun faktor pendukung adalah komitmen pimpinan serta seluruh APIP untuk secara optimal melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah serta penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan Pendampingan pada DPA Perubahan tahun 2025.**
2.1.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	OPD					36	386,280,000	36	11,275,000	36	0	36	27,062,000	36	285,799,100	36	324,136,100	100	83.91					Inspektorat;	Pendampingan manajemen risiko fraud dan kemitraan serta Lini 1 dan 2
2.1.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD					36	105,225,000	0	0	0	1,890,000	0	0	36	90,220,800	36	92,110,800	100	87.54					Inspektorat;	Sosilalisasi Insight Pengawasan Terkait Trend Temuan
2.1.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan					4	1,484,762,500	1	22,308,960	1	291,198,800	1	8,720,000	1	1,118,247,554	4	1,440,475,314	100	97.02					Inspektorat;	Telah terlaksana seluruh target kegiatan yaitu MCSP, Sosialisasi Anti korupsi, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan serta Hari Antikorupsi Sedunia
2.1.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD					36	3,305,000	0	0	36	920,000	36	2,275,000	36	0	36	3,195,000	100	96.67					Inspektorat;	Kegiatan sudah dilaksanakan pada triwulan II dan III
3	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Nilai**	**0**		**0**		**32.44**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Inspektorat**	
3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**90**	**65,746,964,540**	**81.44**	**42,311,010,506**	**88**	**22,920,445,359**	**80.94**	**4,030,242,791**	**83.40**	**3,730,109,309**	**85.37**	**2,989,242,223**	**88.14**	**9,078,761,404**	**88.14**	**19,828,355,727**	**100.16**	**86.51**	**88.14**	**62,139,366,233**	**97.93**	**94.51**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan IV**

No	Sasaran / Program / Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**90**	**43,144,654,455**	**81.44**	**28,084,277,081**	**88**	**14,598,843,000**	**80.78**	**2,929,282,492**	**84.64**	**3,245,628,625**	**85.16**	**2,446,095,366**	**88.13**	**4,435,236,367**	**88.13**	**13,056,242,850**	**100.15**	**89.43**	**88.13**	**41,140,519,931**	**97.92**	**95.35**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan IV**
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan					56	14,598,843,000	46	2,929,282,492	57	3,245,628,625	57	2,446,095,366	58	4,435,236,367	58	13,056,242,850	103.57	89.43					Inspektorat;	Sesuai dengan jumlah ASN Inspektorat pada triwulan 2 yaitu dengan adanya penambahan 1 orang CPNS PPUPD
3.1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**90**	**6,234,379,375**	**81.44**	**5,158,373,916**	**88**	**3,357,167,570**	**81.86**	**492,135,849**	**84.41**	**242,869,000**	**86.89**	**32,431,202**	**88.02**	**1,941,381,088**	**88.02**	**2,708,817,139**	**100.02**	**80.69**	**88.02**	**7,867,191,055**	**97.8**	**126.19**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan IV**
3.1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang					40	1,100,000,000	4	0	32	161,594,000	54	7,725,000	54	634,419,748	54	803,738,748	135	73.07					Inspektorat;	Diklat Peran Konsultansi bagi Auditor Internal dan diklat substantif lainnya
3.1.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Orang					50	2,168,088,195	42	492,135,849	0	6,750,000	19	24,706,202	50	1,306,961,340	50	1,830,553,391	100	84.43					Inspektorat;	Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP dan PPBR
3.1.2.3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket					2	89,079,375	0	0	3	74,525,000	0	0	0	0	3	74,525,000	150	83.66					Inspektorat;	Terdapat kesalahan saat mengisi realisasi pada triwulan II dimana realisasi berdasarkan jumlah jenis barang (3 jenis) sedangkan pemaketan (hastag) pada DPA hanya 2 paket.
3.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**430**	**4,425,041,540**	**166**	**3,527,694,819**	**88**	**1,229,526,315**	**80.48**	**366,300,217**	**2.13**	**64,280,398**	**2.09**	**100,436,124**	**3.31**	**532,896,155**	**88.01**	**1,063,912,894**	**100.01**	**86.53**	**254.01**	**4,591,607,713**	**59.07**	**103.76**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan IV**
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket					2	21,371,400	0	0	0	0	0	0	2	17,553,850	2	17,553,850	100	82.14					Inspektorat;	Bahan Bakar dan Alat Listrik
3.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket					7	405,643,775	7	0	4	17,777,500	7	48,788,500	7	283,217,388	7	349,783,388	100	86.23					Inspektorat;	Terealisasi seluruh paket bahan logistik
3.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket					1	166,292,840	1	16,866,700	1	30,642,200	1	28,491,600	1	52,149,828	1	128,150,328	100	77.06					Inspektorat;	Rutin cetak dan penggadan LHP
3.1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Inspektorat;	dilakukan efisiensi karena pekerjaan sudah terakomodir pada belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan yang terdapat pada sub kegiatan lainnya
3.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					20	200,000,000	9	99,233,517	3	15,860,698	6	23,156,024	7	28,182,589	25	166,432,828	125	83.22					Inspektorat;	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah
3.1.3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket					5	436,218,300	1	250,200,000	0	0	0	0	4	151,792,500	5	401,992,500	100	92.15					Inspektorat;	Pengadaan peralatan personal komputer, meja kantor, kursi pegawai dan lemari arsip gantung
3.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**90**	**3,385,890,300**	**81.44**	**450,083,998**	**88**	**1,244,631,486**	**80.31**	**0**	**82.27**	**0**	**85.54**	**0**	**88.56**	**1,038,299,545**	**88.56**	**1,038,299,545**	**100.64**	**83.42**	**88.56**	**1,488,383,543**	**98.4**	**43.96**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan IV**
3.1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit					35	347,131,486	0	0	0	0	4	0	29	300,602,850	33	300,602,850	94.29	86.6					Inspektorat;	Pengadaan kabel HDMI, kulkas, smart TV, dispenser, hardisk, scanner, printer
3.1.4.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit					1	50,700,000	0	0	0	0	0	0	1	50,347,920	1	50,347,920	100	99.31					Inspektorat;	Sewa kendaraan dinas jabatan Inspektur
3.1.4.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit					1	800,000,000	0	0	0	0	0	0	1	641,148,775	1	641,148,775	100	80.14					Inspektorat;	Pengadaan bangunan kantor ruang arsip
3.1.4.4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1	46,800,000	0	0	0	0	0	0	2	46,200,000	2	46,200,000	200	98.72					Inspektorat;	Terdapat pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain sehingga ada penambahan anggaran untuk pengadaan (sewa) Kendaraan dinas operasional Sekretariat sebanyak 2 unit.
3.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**90**	**4,128,951,060**	**81.44**	**2,317,092,435**	**88**	**1,017,727,088**	**82.04**	**135,690,483**	**84.46**	**58,503,537**	**85.91**	**274,924,929**	**88.08**	**410,490,029**	**88.08**	**879,608,978**	**100.09**	**86.43**	**88.08**	**3,196,701,413**	**97.87**	**77.42**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan IV**
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan					4	7,000,000	1	0	1	92,000	1	3,000,000	1	2,920,000	4	6,012,000	100	85.89					Inspektorat;	Laporan Triwulan IV
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan					12	251,853,500	3	54,329,063	3	47,802,122	3	49,574,707	3	53,017,235	12	204,723,127	100	81.29					Inspektorat;	Laporan bulan Oktober, November dan Desember
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan					12	758,873,588	3	81,361,420	3	10,609,415	3	222,350,222	3	354,552,794	12	668,873,851	100	88.14					Inspektorat;	Laporan bulan Oktober, November dan Desember
3.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**90**	**4,428,047,810**	**81.44**	**2,773,488,257**	**88**	**1,472,549,900**	**80.15**	**106,833,750**	**1.89**	**118,827,749**	**2.02**	**135,354,602**	**88.05**	**720,458,220**	**88.05**	**1,081,474,321**	**100.06**	**73.44**	**88.05**	**3,854,962,578**	**97.83**	**87.06**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan IV**
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					27	742,629,000	10	106,833,750	10	118,827,749	7	86,407,157	27	84,658,445	27	396,727,101	100	53.42					Inspektorat;	Biaya BBM seluruh kendaraan roda 4 dan roda 2
3.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					50	191,233,900	6	0	39	0	1	18,350,000	4	153,526,288	50	171,876,288	100	89.88					Inspektorat;	Pemeliharaan laptop
3.1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					1	538,687,000	0	0	0	0	0	30,597,445	1	482,273,487	1	512,870,932	100	95.21					Inspektorat;	Pemeliharaan bangunan kantor lantai 2
																	Rata-rata capaian Kinerja (%)			**107.85**	**82.01**			**64.18**	**54.66**		
																	Predikat Kinerja			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Rendah**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**109.04**	**81.47**						
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN			**106.86**	**82.21**			**97.91**	**78.6**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**100.05**	**86.45**			**94.63**	**85.39**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Evaluasi dan Monitoring dari pimpinan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan

No	Sasaran / Program / Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Beberapa pekerjaan memerlukan perubahan penganggaran sehingga baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV setelah penetapan APBD P TA 2025																							
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :				-																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :				1. Capaian kinerja Renja 2025 dijadikan sebagai dasar penentuan target pada Renja 2027. 2. Faktor penghambat dan faktor pendorong dianalisa lebih lanjut sebagai pertimbangan dalam penyusunan strategi pelaksanaan dan mitigasi resiko kegiatan di Renja 2027. 3. Tetapkan definisi operasional target baik pada tahapan murni maupun perubahan.																							

Disusun di :
Balikpapan,

Inspektur
Kota Balikpapan

PEMERINTAH KOTA INSPEKTORAT BALIKPAPAN

SILVIA RAHMADINA

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI

LAMPIRAN 11

PIAGAM PENGHARGAAN

TAHUN 2025

PENGHARGAAN INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

BEKERJA DENGAN HATI SEPENUH HATI

rumah integritas

SAKIP PREDIKAT BB





INSPEKTUR BERKINERJA TERBAIK NASIONAL TAHUN 2025





INSPEKTUR BERKINERJA TERBAIK TAHUN 2025



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 – 4482 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN HASIL PENILAIAN KINERJA
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

Kategori Kota

1) Sangat Baik (Nilai 81 – 100) : 14 Kota
2) Baik (Nilai 61 – 80) : 56 Kota
3) Cukup (Nilai 41 – 60) : 16 Kota
4) Kurang (Nilai 21 – 40) : 2 Kota
5) Sangat Kurang (Nilai 0 – 20) : 5 Kota

NO	PEMERINTAH DAERAH	NILAI	KETERANGAN
1	Kota Surabaya	90.00	Sangat Baik
2	Kota Bontang	90.00	Sangat Baik
3	Kota Denpasar	89.00	Sangat Baik
4	Kota Batam	86.00	Sangat Baik
5	Kota Magelang	85.60	Sangat Baik
6	Kota Banjarbaru	84.20	Sangat Baik
7	Kota Tebing Tinggi	84.00	Sangat Baik
8	Kota Balikpapan	83.60	Sangat Baik
9	Kota Padang Panjang	83.40	Sangat Baik
10	Kota Blitar	83.00	Sangat Baik



UNIT KERJA TELADAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN





PIAGAM

PENGHARGAAN

Dengan bangga kami berikan kepada

Inspektorat Kota Balikpapan

NPWP 96.431.282.1-721.000

Atas pencapaiannya sebagai

Unit Kerja Teladan **dalam ketertiban penyampaian Laporan SPT Tahunan Pegawai**
Serta komitmen terhadap kepatuhan perpajakan

Balikpapan, 27 Januari 2026

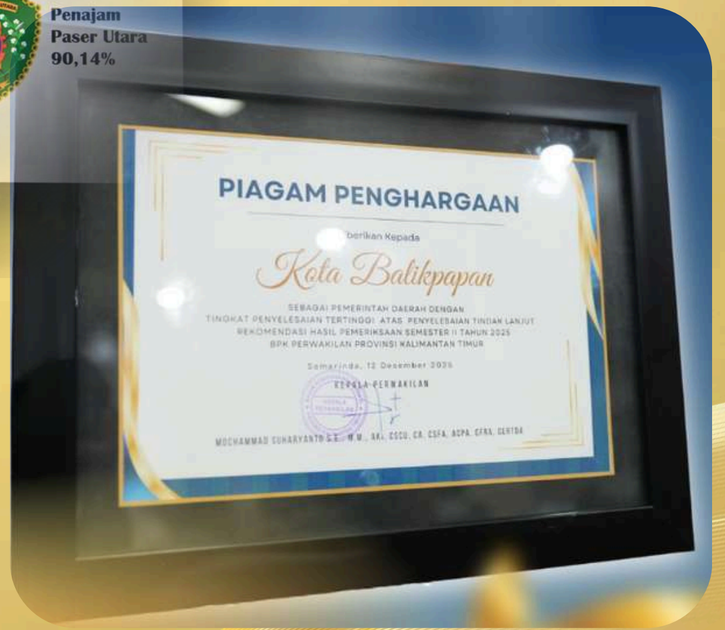
Kepala Kantor

Theresia Naniek Widyaningsih

PENYELESAIAN TLRHP TERTINGGI SEMESTER II TAHUN 2025







KONTRIBUTOR TERBAIK PIC SPI 2025


KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

SERTIFIKAT

Survei Penilaian Integritas

Penghargaan diberikan kepada

Ahdini Faurina

Sebagai nominasi
Kontributor Terbaik Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dari
Pemerintah Kota Balikpapan

atas dedikasi dan kerjasamanya sebagai PIC dalam mendukung pelaksanaan **Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025** yang diselenggarakan oleh **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**.

Yogyakarta, 9 Desember 2025

Wahyu Dewantara Susilo
Kepala Satuan Tugas Integritas Sektor Publik



PENGELOLA KEPEGAWAIAN TERBAIK TAHUN 2025



1



AKTUALISASI TERBAIK PELATIHAN DASAR CPNS







THE BEST PAPER
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABILITY AND TECHNOLOGY IN CLIMATE CHANGE (IC-STCC) 2025





WALI KOTA AWARD BIDANG PENGAWASAN





PENYELESAIAN TLRHP TERTINGGI SEMESTER II TAHUN 2024



Peringkat pertama penyelesaian TLRHP BPK RI dengan nilai capaian 98,03%



PIAGAM
PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

Kota Balikpapan

SEBAGAI PEMERINTAH DAERAH DENGAN
TINGKAT PENYELESAIAN TERTINGGI ATAS TLRHP BPK S.D. SEMESTER II TAHUN 2024
PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 20 Desember 2024

KEPALA PERWAKILAN

AGUS PRIYONO, S.E., M.SI., AK, CA, CSFA,CFRA, ERMAP

PENGELOLA DATA DAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN TERBAIK TAHUN 2024



TERBAIK I
PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2023





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
MEMBERIKAN

Piagam Penghargaan

Kepada :

KOTA BALIKPAPAN

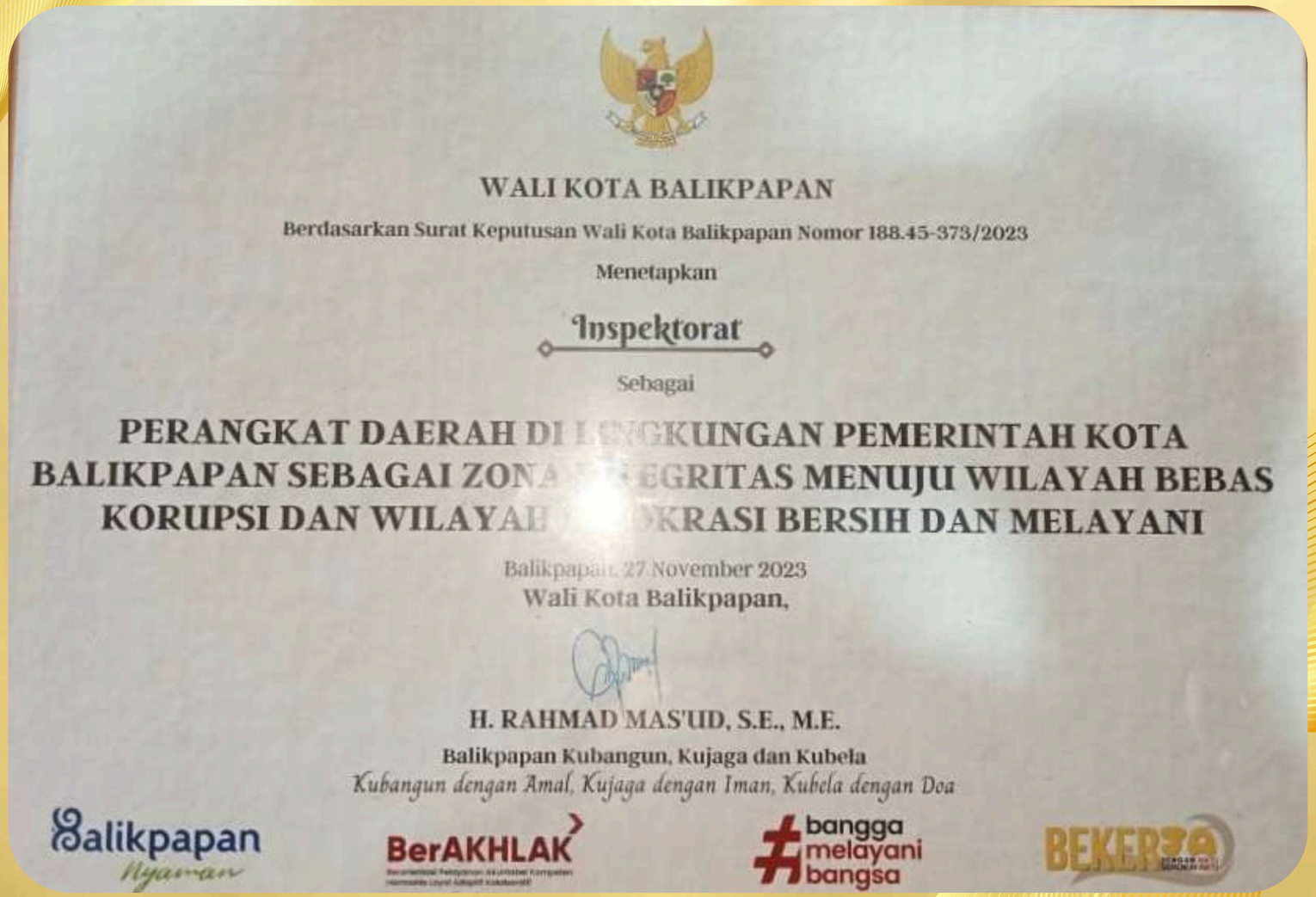
TERBAIK I

BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE 67
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 09 Januari 2024
Pj. Gubernur Kalimantan Timur

Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si

PERANGKAT DAERAH ZONA INTEGRITAS



WALI KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-373/2023

Menetapkan

Inspektorat

Sebagai

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Balikpapan, 27 November 2023

Wali Kota Balikpapan,

H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela

Kubangun dengan Amal, Kujaga dengan Iman, Kubela dengan Doa

Balikpapan Nyaman

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

BEKERJA

PENYELESAIAN TLRHP TERTINGGI SEMESTER II TAHUN 2023



1

PENYELESAIAN TLRHP TERTINGGI SEMESTER I TAHUN 2023



TERBAIK II
PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2022





PENCAPAIAN SPIP LEVEL 3



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan hasil evaluasi
memberikan penghargaan kepada:

Pemerintah Kota Balikpapan

atas prestasinya dalam pencapaian

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LEVEL 3

*dalam skala 1-5

Jakarta, 08 Maret 2022

**Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah**

Ditandatangani secara elektronik oleh

Raden Suhartono, SE, M.Ak., CA, QIA, CPA, CGCAE

TERBAIK III
PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2021





PENYELESAIAN TLRHP TERTINGGI SEMESTER II TAHUN 2022





PENYELESAIAN TLRHP TERTINGGI SEMESTER II TAHUN 2021





PENYELESAIAN TLRHP TERTINGGI SEMESTER I TAHUN 2021





LAMPIRAN 12

LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP

INSPEKTORAT TAHUN 2025

INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NOMOR	:	700/095/IRBAN-I/ITKOT
TANGGAL	:	19 MEI 2025
TIM AUDIT	:	TIM-II
OBRIK	:	INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NOMOR	:	700/095/IRBAN-I/ITKOT
TANGAL	:	19 MEI2025
TIM AUDIT	:	TIM-II
OBRIK	:	INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

INSPEKTORAT
KOTA BALIKPAPAN

rumah integritas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

EVALUASI AKIP INSPEKTORAT

Perencanaan Kinerja

27,23 dari Nilai Maksimal 30,00

Pengukuran Kinerja

26,43 dari Nilai Maksimal 30,00



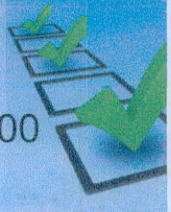


Pelaporan Kinerja

12,90 dari Nilai Maksimal 15,00

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

15,37 dari Nilai Maksimal 25,00



Predikat

Nilai Total 81,92 dengan predikat A - Memuaskan

Hal ini menunjukan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV/Pengawas/Subkoordinator.

Saran / Rekomendasi

- Agar Dokumen Perencanaan Kinerja dapat dipublikasikan tepat waktu, termasuk dokumen Renstra, Renja OPD dan Perjanjian Kinerja dengan memutakhirkan data pada website Inspektorat Kota Balikpapan.
- Agar menarasikan tabel isu isu strategis yang termuat dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.
- Agar setiap Pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.



BEKERJALAH DENGAN HATI, SEPENUH HATI, HATI HATI

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
INSPEKTORAT
Jl. RUHUI RAHAYU I Telp./Fax. (0542) 7218734 KOTAK POS 1111
BALIKPAPAN 76115
Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **81,92 dengan predikat Memuaskan (A).** Hal ini menunjukan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV/Pengawas/Subkoordinator. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	27,23
2	Pengukuran Kinerja	30	26,43
3	Pelaporan Kinerja	15	12,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,37

Terdapat kenaikan hasil evaluasi pada Inspektorat Kota Balikpapan, jika dibandingkan Perbandingan Hasil evaluasi tahun 2023 dengan hasil evaluasi tahun 2024 sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30.00	26.87	27,23
2	Pengukuran Kinerja	30.00	27.64	26,43
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.73	12,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	13.75	15,37
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,82	81,92
			A	A

Komponen/Sub Komponen/Kriteria perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal mengalami kenaikan, hal ini disebabkan telah terpenuhinya dokumen yang diperlukan seperti terdapat perbandingan/benchmark secara nasional, serta telah ditindaklanjutinya seluruh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, sedangkan pada pengukuran kinerja mengalami sedikit penurunan dikarenakan belum seluruhnya pegawai memahami dan berkomitmen mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

BAB I
PENDAHULUAN

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kapabel dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil maka dilakukan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

Telah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2025 guna mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

1. Dasar Hukum Evaluasi

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-492/2024, tanggal 24 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025;

g. Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor: ST 090.1/053/Audit/M /Itkot Tanggal 27 Maret 2025 dan ST 090.1/054/Audit/M/Itkot Tanggal 27 Maret 2025.

2. Latar Belakang Evaluasi

Konsistensi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan terus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui monitoring terhadap sistem yang ada pada perangkat daerah dengan melakukan evaluasi terhadap Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi, LKjIP, Pemantauan Kinerja pada Perangkat Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja serta penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan adalah kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk

perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Inspektorat Kota Balikpapan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

No	Rekomendasi Inspektorat	Langkah Perbaikan	Keterangan
1	Agar Dokumen Perencanaan Kinerja dapat dipublikasikan tepat waktu, termasuk dokumen Renstra, Renja OPD dan Perjanjian Kinerja dengan memutakhirkan data pada website Inspektorat Kota Balikpapan;	Telah ditindaklanjuti	-
2	Agar setiap Pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;	Telah ditindaklanjuti	-

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2024 pada Inspektorat Kota Balikpapan Nomor: 700/133/Tim-II/Itkot, tanggal 12 Juni 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi atas AKIP Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **81,92 dengan predikat Memuaskan (A).** Hal ini menunjukan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	27,23
2	Pengukuran Kinerja	30	26,43
3	Pelaporan Kinerja	15	12,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,37

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja:

Dari penilaian atas komponen perencanaan kinerja diperoleh nilai 27,23 dari nilai maksimal sebesar 30,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Dokumen perencanaan kinerja	6,00	6,00	- Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja sesuai dengan mandat ; - Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
2	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)	7,16	9,00	- Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan, akan tetapi belum dipublikasikan tepat waktu; hal ini dikarenakan website Inspektorat mengalami gangguan sejak tahun lalu. - Sebagian besar isu strategis telah tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja - Sebagian besar indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART;
3	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	14,06	15,00	- Sebagian besar anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung pada kinerja yang ingin dicapai; - Sebagian besar target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik

b. Pengukuran Kinerja:

Dari penilaian atas komponen pengukuran kinerja diperoleh nilai 26,43 dari nilai maksimal sebesar 30,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6,00	6,00	- Mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi sebagian kriteria yang ditetapkan.
2	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif, efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan	6,67	9,00	Data kinerja yang dikumpulkan sebagian besar telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

	berkelanjutan			Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
3	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	13,76	15,00	- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas telah dibuat per semester. Hasil pengukuran capaian kinerja terkait *reward and punishment* belum terdapat perbedaan (dapat diidentifikasi) tingkat *reward and punishment*-nya, antara lain: pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja, yang mencapai target dan tidak mencapai target, yang selesai tepat waktu dan yang tidak tepat waktu, capaian diatas standar dengan yang standar. (sudah buat, tapi belum dapat diidentiikasi tingkat *reward and punishment*nya)

c. Pelaporan Kinerja:

Dari penilaian atas komponen pelaporan kinerja diperoleh nilai 12,90 dari nilai maksimal sebesar 15,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	2,63	3,00	Laporan Kinerja agar dilakukan secara berkala sebulan sekali
2	Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	3,40	4,50	Penyajian informasi kinerja telah menyajikan informasi: - Pencapaian sasaran - Kinerja yang diperjanjikan - Evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja - Perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya
3	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	6,87	7,50	- Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, namun hanya bersifat sebagian. - Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja, namun belum bersifat ekstensif dan menyeluruh

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

Dari penilaian atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal diperoleh nilai 15,37 dari nilai maksimal sebesar 25,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi	7,00	7,00	- Pemantauan rencana aksi telah dilakukan secara periodik (triwulan); - Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak dan telah ditindaklanjuti;
2	Capaian *outcome*	8,37	18,00	- Evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program telah dilaksanakan, terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi namun belum didukung dengan eviden/ bukti tindak lanjut dari rekomendasi atas evaluasi program tersebut; - Pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja telah dilaksanakan.

BAB III
SARAN REKOMENDASI

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan AKIP, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Agar Dokumen Perencanaan Kinerja dapat dipublikasikan tepat waktu, termasuk dokumen Renstra, Renja OPD dan Perjanjian Kinerja dengan memutakhirkan data pada website Inspektorat Kota Balikpapan.
b. Agar menarasikan tabel isu isu strategis yang termuat dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.
c. Agar setiap Pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Inspektorat Kota Balikpapan, kami mengharapkan Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran meningkatkan implementasi AKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan.

Inspektur Kota Balikpapan,

PEMERINTAH KOTA INSPEKTORAT BALIKPAPAN

Silvia Rahmadina,AP, CGCAE,CGRE, QIA

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Penjelasan	%	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai
			Jawaban	Nilai					
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30.00**		**27.23**					
1.a	**Dokumen Perencanaan kinerja**	**6.00**	AA	**6.00**		**100.00%**			**1.00**
Kriteria:									
1	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				a. apabila seluruh komponen dokumen perencanaan jangka menengah sesuai mandat; b. apabila sebagian komponen dokumen perencanaan jangka menengah sesuai mandat; c. apabila komponen dokumen perencanaan jangka menengah tidak sesuai mandat; d. belum terdapat dokumen perencanaan jangka menengah.		A/B/C/D	A	1.00
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				a. apabila seluruh komponen dokumen perencanaan jangka pendek sesuai mandat; b. apabila sebagian komponen dokumen perencanaan jangka pendek sesuai mandat; c. apabila komponen dokumen perencanaan jangka pendek tidak sesuai mandat d. belum terdapat dokumen perencanaan jangka pendek.		A/B/C/D	A	1.00
3	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				a. apabila seluruh dokumen perencanaan aktivitas sesuai mandat; b. apabila sebagian dokumen perencanaan aktivitas sesuai mandat; c. apabila dokumen perencanaan aktivitas tidak sesuai mandat/belum terdapat dokumen perencanaan aktivitas.		A/B/C	A	1.00
4	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				Ya, apabila terdapat dokumen perencanaan anggaran		Ya/Tidak	Ya	1.00
1.b	**Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)**	**9.00**	BB	**7.16**		**79.58%**			**0.80**
Kriteria:									
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.								1.00
	Renstra				Ya, jika dokumen renstra diformalkan		Ya/Tidak	Ya	0.33
	Renja OPD				Ya, jika Renja diformalkan		Ya/Tidak	Ya	0.33
	Perjanjian Kinerja				Ya, jika Perjanjian Kinerja diformalkan		Ya/Tidak	Ya	0.33
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.								0.67
	Renstra				Ya, jika renstra dipublikasikan tepat waktu		Ya/Tidak	Ya	0.33
	Renja OPD						Ya/Tidak	Ya	0.33
	Perjanjian Kinerja				Ya, jika perjanjian kinerja dipublikasikan tepat waktu		Ya/Tidak	Tidak	0.00
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				a. apabila seluruh (100%) isu strategis tertuang dalam Renstra; b. apabila sebagian besar (>75%-99%) isu strategis tertuang dalam Renstra c. apabila sebagian kecil (>30%-75%) isu strategis tertuang dalam Renstra d. apabila tidak ada (<30%) isu strategis tertuang dalam Renstra		A/B/C/D	A	1.00
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.								0.67
	Renstra				a. apabila seluruh (100%) tujuan/sasaran tertuang dalam Renstra; b. apabila sebagian besar (>75%-99%) tujuan/sasaran tertuang dalam Renstra; c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) tujuan/sasaran tertuang dalam Renstra; d. apabila tidak ada (<30%) tujuan/sasaran tertuang dalam Renstra.		A/B/C/D	B	0.17
	Perjanjian Kinerja				a. apabila seluruh (100%) tujuan/sasaran tertuang dalam PK; b. apabila sebagian besar (>75%-99%) tujuan/sasaran tertuang dalam PK c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) tujuan/sasaran tertuang dalam PK d. apabila tidak ada (<30%) tujuan/sasaran tertuang dalam PK		A/B/C/D	A	0.50
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.								0.46

	Renstra				a. apabila seluruh (100%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART b. apabila sebagian besar (>75%-99%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART d. apabila tidak ada (<30%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART				0.00
	Perjanjian Kinerja				a. apabila seluruh (100%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART b. apabila sebagian besar (>75%-99%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART d. apabila tidak ada (<30%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART				0.46
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).				a. apabila seluruh (100%) IKU menggambarkan Kinerja utama, dan tertuang di dalam dokumen perencanaan *b. apabila seluruh* (100%) IKU menggambarkan Kinerja utama, namun tidak tertuang di dalam dokumen perencanaan c. apabila sebagian besar (>75%-99%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART d. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART e. apabila tidak ada (<30%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART				0.92
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.								0.75
	Renstra				a. apabila seluruh (100%) target sesuai dengan kriteria b. apabila sebagian besar (>75%-99%) target sesuai dengan kriteria c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) target sesuai dengan kriteria d. apabila tidak ada (<30%) target sesuai dengan kriteria				0.75
	Perjanjian Kinerja				a. apabila seluruh (100%) target sesuai dengan kriteria b. apabila sebagian besar (>75%-99%) target sesuai dengan kriteria c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) target sesuai dengan kriteria d. apabila tidak ada (<30%) target sesuai dengan kriteria				0.75
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).				a. apabila pohon kinerja telah mengacu pohon kinerja instansi sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja dan telah dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi; b. apabila pohon kinerja telah mengacu pohon kinerja instansi dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja, namun belum dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi; c. apabila pohon kinerja belum mengacu pohon kinerja instansi dan belum memenuhi prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja; d. Belum menyusun pohon kinerja.		A/B/C/D	A	1.00
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				a. apabila pohon kinerja telah mengidentifikasi kinerja urusan/sektor lain dan melibatkan instansi pengampu dalam perencanaan kinerja b. apabila pohon kinerja telah mengidentifikasi kinerja urusan/sektor lain, namun belum melibatkan instansi pengampu dalam perencanaan kinerja c. Belum ada crosscutting		A/B/C	B	0.50
10	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				a. apabila seluruh (100%) pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi b. apabila sebagian besar (<75-99%) pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi c. apabila sebagian kecil (30-75%) pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi d. apabila tidak ada (<30%) pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi		A/B/C/D	A	1.00
1.c	**Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**	**15.00**	A	**14.06**		**93.75%**			~~0.94~~
Kriteria:									

1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				a. apabila seluruh (100%) anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai b. apabila sebagian besar (<75-99%) anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai c. apabila sebagian kecil (30-75%) anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai d. apabila tidak ada (<30%) anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.		A/B/C/D	A	1.00
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.				a. apabila seluruh (100%) aktivitas yang dulaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai b. apabila sebagian besar (<75-99%) aktivitas yang dulaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai c. apabila sebagian kecil (30-75%) aktivitas yang dulaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai d. apabila tidak ada (<30%) aktivitas yang dulaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai		A/B/C/D	A	1.00
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.								0.88
	Renstra				a. apabila seluruh (100%) target kinerja tercapai dengan baik/*on the right track* b. apabila sebagian besar (<75-99%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track c. apabila sebagian kecil (30-75%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track d. .apabila tidak ada (<30%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track		A/B/C/D	A	0.50
	Perjanjian Kinerja				a. apabila seluruh (100%) target kinerja tercapai dengan baik/*on the right track* b. apabila sebagian besar (<75-99%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track c. apabila sebagian kecil (30-75%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track d. .apabila tidak ada (<30%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track				0.38
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.				a. apabila monitoring dan evaluasi menghasilkan RATL, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti b. apabila hasil monitoring dan evaluasi menghasilkan RATL, dan sebagian besar (<75-99%) telah ditindaklanjuti c. apabila monitoring dan evaluasi menghasilkan RATL, dan sebagian kecil (30-75%) telah ditindaklanjuti d. apabila tidak dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja/RATL tidak ditindaklanjuti		A/B/C/D	A	1.00
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.				a. apabila seluruh (100%) hasil perbaikan/penyempurnaan telah ditindaklanjuti dalam perencanaan kinerja b. apabila sebagian besar (>75%-99%) hasil perbaikan/penyempurnaan telah ditindaklanjuti dalam perencanaan kinerja c. apabila sebagian kecil (30%-75%) hasil perbaikan/penyempurnaan telah ditindaklanjuti dalam perencanaan kinerja d. apabila tidak ada (<30%) hasil perbaikan/penyempurnaan telah ditindaklanjuti dalam perencanaan kinerja		A/B/C/D	A	1.00
6	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				a. apabila seluruh (100%) pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan b. apabila sebagian besar (>75%-99%) pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan c. apabila sebagian kecil (30%-75%) pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan d. apabila tidak ada (<30%) pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan		A/B/C/D/E	B	0.75
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30.00**		**26.43**					
2.a	**Pengukuran Kinerja telah dilakukan**	**6.00**	AA	**6**		**100.00%**			**1.00**
1	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.				a. apabila seluruh definisi operasional jelas; b. apabila sebagian definisi operasional jelas; c. belum ada definisi operasional.		A/B/C	A	1.00
2	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				a. apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; b. apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi sebagian kriteria yang ditetapkan; c. belum ada mekanisme pengumpulan data kinerja		A/B/C	A	1.00
2.b	**Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**	**9.00**	B	**6.67**		**0.741**			**0.74**

1	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.				a. apabila seluruh (100%) data kinerja relevan b. apabila sebagian besar (>75%-99%) data kinjera relevan c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) data kinerja relevan d. apabila tidak ada (<30%) data kinerja yang relevan		A/B/C/D	A	1.00
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.				a. apabila seluruh (100%) data kinerja andal b. apabila sebagian besar (>75%-99%) data kinjera andal c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) data kinerja andal d. apabila tidak ada (<30%) data kinerja yang andal				0.38
3	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				a. apabila pengukuran kinerja dilakukan per triwulan (3 Bulan); b. apabila pengukuran kinerja dilakukan per semester (6 bulan); c. apabila pengukuran kinerja dilakukan 1 tahun sekali d. tidak dilakukan pengukurang kinerja secara berkala		A/B/C/D	C	0.33
4	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.				a, Apabila dilakukan pemantauan hingga unit terkecil dan diberikan feedback b. Apabila dilakukan pemantauan hingga unit terkecil namun tidak diberikan feedback c. Pemantauan belum dilakukan sampai unit terkecil		A/B/C	A	1.00
5	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Ya, Jika pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi		Ya/Tidak	Ya	1.00
2.c	**Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**	**15.00**	A	**13.76**		**91.75%**			**0.92**
1	Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.				a. apabila seluruh pimpinan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis setelah pengukuran kinerja b. apabila sebagian pimpinan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis setelah pengukuran kinerja c. apabila pimpinan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis setelah pengukuran kinerja		A/B/C	A	1.00
2	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas, Anggaran dalam mencapai kinerja.				Ya, Apabila pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja		Ya/Tidak	Ya	1.00
3	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.				a. efisiensi terjadi didapat dari perbaikan kegiatan/aktivitas yang tidak berdampak terhadap kinerja (outcome/impact) b. Jika besaran efisiensi di dapat dari pengurangan rincian aktivitas/biaya yang tidak terkait terhadap output kegiatan c. sudah terdapat proses identifikasi aktivitas/kegiatan yang tidak terkait terhadap kinerja, namun belum dilaksanakan d. Jika tidak ada upaya efisiensi		A/B/C/D	A	1.00
4	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				a. apabila seluruh (100%) pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja b. apabila sebagian besar (>75%-99%) pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja c. apabila sebagian kecil (30%-75%) pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja d. apabila tidak ada (<30%) pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja		A/B/C/D	B	0.67
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15.00**		**12.90**					
3.a	**Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja**	**3.00**	BB	**2.63**		**87.50%**			**0.88**
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				Ya, jika laporan kinerja disusun		Ya/Tidak	Ya	1.00
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				a. apabila laporan kinerja dilakukan per triwulan (3 Bulan); b. apabila laporan kinerja dilakukan per semester (6 bulan); c. apabila laporan kinerja dilakukan 1 tahun sekali d. tidak dilakukan pelaporan kinerja		A/B/C/D	A	1.00
3	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				a. apabila laporan kinerja dipublikasikan secara luas (dapat diakses masyarakat luas); b. apabila laporan kinerja dipublikasikan secara terbatas (internal pemerintah); c. apabila laporan kinerja belum dipublikasikan		A/B/C	B	0.50
4	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.				Ya, jika laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu		Ya/Tidak	Ya	1.00
3.b	**Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**	**4.50**	BB	**3.40**		***75.56%***			***0.76***
1	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				Ya, jika laporan kinerja telah diformalkan		Ya/Tidak	Ya	1.00

2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi pencapaian kinerja b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi pencapaian kinerja c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi pencapaian kinerja d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi pencapaian kinerja				0.47
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.				a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi analisis dan evaluasi realsiasi kinerja sesuai dengan target tahunan b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi analisis dan evaluasi realsiasi kinerja sesuai dengan target tahunan c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi analisis dan evaluasi realsiasi kinerja sesuai dengan target tahunan d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realsiasi kinerja sesuai dengan target tahunan				0.38
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.				a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah		A/B/C/D	A	1.00
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya				0.63
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).				a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional		A/B/C/D	C	0.33
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.				a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja		A/B/C/D	A	1.00
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi terkait efisiensi yang mempertimbangkan efektivitas dengan capaian kinerja b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi terkait efisiensi yang mempertimbangkan efektivitas dengan capaian kinerja c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi terkait terkait efisiensi yang mempertimbangkan efektivitas dengan capaian kinerja d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi terkait terkait efisiensi yang mempertimbangkan efektivitas dengan capaian kinerja		A/B/C/D	A	1.00
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan		A/B/C/D	A	1.00
3.c	**Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**	**7.50**	A	**6.875**		**91.67%**			**0.92**

1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				a. apabila seluruh Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan; b. apabila sebagian Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan; c. apabila Informasi dalam laporan kinerja tidak menjadi perhatian utama pimpinan.		A/B/C	A	1.00
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				a. apabila lebih dari 95% pegawai peduli terhadap informasi dalam laporan kinerja; b. apabila 80%< pegawai peduli terhadap informasi dalam laporan kinerja < 95%; c. apabila 40%< pegawai peduli terhadap informasi dalam laporan kinerja <80%; d. apabila 20% < pegawai peduli terhadap informasi dalam laporan kinerja <40% e. apabila pegawai peduli terhadap informasi dalam laporan kinerja < 20%.		A/B/C/D/E	B	0.75
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi dan penyesuaian perencanaan kinerja untuk mencapai kinerja.				a. apabila seluruh Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; b. apabila sebagian Informasi *dalam laporan kinerja berkala* telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; c. apabila Informasi dalam laporan kinerja berkala tidak digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja		A/B/C	A	1.00
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25.00**		**15.37**					
4.a	**Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**	**7.00**	AA	**7**		**100.00%**			**1**
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.				a. Jika seluruh rekomendais hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti, b Jika sebagian besar rekomendais hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti c. Jika sebagian kecil rekomendais hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti d. Jika tidak ada rekomendais hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang ditindaklanjuti		A/B/C/D	A	1.00
4.b	**Capaian Outcome**	**18.00**	C	**8.37**		**46.50%**			**0.47**
1	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja (Outcome) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.				a. Jika seluruh indikator kinerja mengalami kenaikan capaian kinerja, b Jika sebagian besar indikator kinerja mengalami kenaikan capaian kinerja c. Jika sebagian kecil indikator kinerja mengalami kenaikan capaian kinerja d. Jika tidak ada indikator kinerja yang mengalami kenaikan capaian kinerja				0.47
					TOTAL SKOR	**81.92**	**A**	**MEMUASKAN**	

INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

JALAN RUHUI RAHAYU I
TELP / FAX : (0542) 7218734 KOTAK POS 1111 BALIKPAPAN 76115
EMAIL : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

2025